



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BADUNG  
TAHUN 2020**

**TAHUN 2021**

### KATA PENGANTAR

#### **Om Swastyastu**

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Waranungraha-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020 dapat disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang memuat informasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk itu, segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung terhadap jalannya pemerintahan.

Terlebih dalam era sekarang dan ke depan kita masih dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19 berikut dampaknya terhadap kualitas kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang senantiasa menuntut perhatian serta kerja keras

## KATA PENGANTAR

---

kita bersama sebagai upaya dalam rangka pemulihan dan arah perbaikan ke depannya.

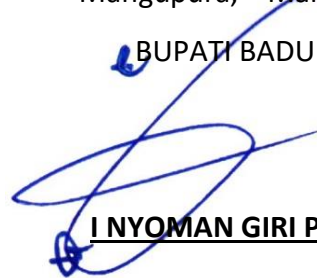
Kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Badung atas segala kerja sama yang selama ini terbina dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini bermanfaat bagi masyarakat dan selalu mendapat perlindungan, kekuatan serta petunjuk dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

**Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.**

Mangupura, Maret 2021

BUPATI BADUNG,



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 DASAR HUKUM .....	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	I - 5
A. Visi .....	I - 6
B. Misi .....	I - 7
C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	I - 8
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH .....	I - 9
1.3.1 Data Geografis Wilayah .....	I - 9
1.3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Badung .....	I - 11
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung .....	I - 12
1.3.4 Jumlah PNS Kabupaten Badung .....	I - 13
A. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan.....	I - 14
B. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan .....	I - 14
C. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan Struktural .....	I - 15
D. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan .....	I - 16
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	I - 17
1.3.5.1. Pendapatan Asli Daerah .....	I - 17
A. Pajak Daerah .....	I - 19
B. Retribusi Daerah .....	I - 23
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	I - 23
D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah .....	I - 23
1.3.5.2. Dana Perimbangan .....	I - 24
A. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak .....	I - 24
B. Dana Alokasi Umum .....	I - 24
C. Dana Alokasi Khusus .....	I - 25



1.3.5.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	I - 25
A. Pendapatan Hibah .....	I - 26
B. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya .....	I - 26
C. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus .....	I - 27
D. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.....	I - 27
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	I - 27
A. Belanja Tidak Langsung .....	I - 28
B. Belanja Langsung .....	I - 30
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	I - 31
<b>II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
A. PENDAPATAN .....	II - 1
1. Pendapatan Asli Daerah .....	II - 1
2. Dana Perimbangan .....	II - 3
3. Komponen Pos Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah .....	II - 4
B. BELANJA .....	II - 8
1. Belanja Tidak Langsung .....	II - 9
2. Belanja Langsung .....	II - 12
3. Permasalahan Utama Belanja Daerah .....	II - 13
4. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah .....	II - 16
5. Prioritas dan Plafon Perubahan Belanja Daerah .....	II - 16
C. PEMBIAYAAN .....	II - 17
1. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan .....	II - 18
2. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan .....	II - 18
3. Strategi dan Prioritas Pembiayaan .....	II - 18
<b>III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>III- 1</b>
I. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III - 1
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR .....	III - 1
A. Urusan Pendidikan .....	III - 1
B. Urusan Kesehatan .....	III - 20
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III - 44
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III - 65

E.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	III - 78
E.	Urusan Sosial.....	III - 105
F.	Urusan Tenaga Kerja.....	III - 115
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR .....	
A.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	III - 121
B.	Urusan Pangan .....	III - 125
C.	Urusan Pertanahan .....	III - 128
D.	Urusan Lingkungan Hidup .....	III - 131
E.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	III - 143
F.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III - 149
G.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	III - 158
H.	Urusan Perhubungan .....	III - 167
I.	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	III - 178
J.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	III - 187
K.	Urusan Penanaman Modal.....	III - 195
L.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....	III - 205
M.	Urusan Statistik .....	III - 208
N.	Urusan Persandian .....	III - 211
O.	Urusan Kebudayaan .....	III - 215
P.	Urusan Kearsipan .....	III - 224
Q.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III - 230
3.	URUSAN PILIHAN .....	
A.	Urusan Pariwisata .....	III - 240
B.	Urusan Pertanian.....	III - 253
C.	Urusan Perdagangan .....	III - 264
D.	Urusan Perindustrian .....	III - 274
II.	KEBIJAKAN STRATEGI .....	III - 284
III	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2019 .....	III - 288
<b>IV</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
<b>V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>V - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung per Kecamatan Tahun 2020	I - 9
Tabel 1.2	Keadaan Cuaca Rata-rata Kabupaten Badung Tahun 2020.....	I - 10
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2020 .....	I - 12
Tabel 1.4	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020.....	I - 19
Tabel 1.5	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.....	II - 20
Tabel 1.6	Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020.....	II - 24
Tabel 1.7	Lain-lain Pendapatn Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 .	II - 26
Tabel 2.1	Ringkasan Pendapatan Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 .....	II - 8
Tabel 2.2	Ringkasan Belanja Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 .....	II - 17
Tabel 2.3	Ringkasan Pembiayaan Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.....	II - 19
Tabel 3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 1
Tabel 3.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) .....	III - 2
Tabel 3.1.1.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan).....	III - 17
Tabel 3.1.1.3.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan) .....	III - 21
Tabel 3.1.1.4.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah Mangusada) .....	III - 41
Tabel 3.1.1.5.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) .....	III - 45

Tabel 3.1.1.6.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) .....	III - 49
Tabel 3.1.1.7.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III - 66
Tabel 3.1.1.8.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) .....	III - 79
Tabel 3.1.1.9.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) .....	III - 85
Tabel 3.1.1.10.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).....	III - 92
Tabel 3.1.1.11.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan) .....	III - 99
Tabel 3.1.1.12.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada (Dinas Sosial) .....	III - 106
Tabel 3.1.1.13.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) .....	III - 116
Tabel 3.1.1.14.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemberdayaann Perempuan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) .....	III - 122

Tabel 3.1.1.15.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan .....	III - 126
Tabel 3.1.1.16.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan (Bagian Pemerintahan .....	III - 129
Tabel 3.1.1.17.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan).....	III - 132
Tabel 3.1.1.18.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ....	III - 144
Tabel 3.1.1.19.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa .....	III - 150
Tabel 3.1.1.20.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) .....	III - 159
Tabel 3.1.1.21.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan .....	III - 168
Tabel 3.1.1.22.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Komunikasi dan Informatika) .....	III - 179
Tabel 3.1.1.23.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Koperasi (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	III - 188
Tabel 3.1.1.24.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) .....	III - 196

Tabel 3.1.1.25.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga).....	III - 206
Tabel 3.1.1.26.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika).....	III - 209
Tabel 3.1.1.27.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika).....	III - 212
Tabel 3.1.1.28.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan).....	III - 216
Tabel 3.1.1.29.	Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) .....	III - 225
Tabel 3.1.1.30.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan) .....	III - 231
Tabel 3.1.1.31.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata).....	III - 241
Tabel 3.1.1.32.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan) .....	III - 254
Tabel 3.1.1.33.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan )......	III - 265
Tabel 3.1.1.34.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja).....	III - 275

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2016-2020 .....	I - 13
Grafik 1.2	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 .....	I - 14
Grafik 1.3	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan.....	I - 15
Grafik 1.4	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan Struktural.....	I - 15
Grafik 1.5	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan .....	I - 16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. DASAR HUKUM**

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang di atas, yang selanjutnya juga diatur lebih rinci dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam perspektif amanah dan substansi pemerintahan, penyampaian progres hasil kinerja pemerintahan kepada DPRD ini dimaksudkan untuk merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Periode Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Periode Tahun 2005-2025. Agenda penyampaian LKPJ Kabupaten Badung diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak Pemda dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dasar hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 12);

**1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

Perumusan Visi dan Misi serta pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (resources) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.

5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

### A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana  
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. **Tri Hita Karana**. Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sektor pembangunan dan

kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.

4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

### B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

### **C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung**

Peranan RKPD sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan visi dan misi Kabupaten Badung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 ditekankan pada memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah :

"PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA MELALUI INOVASI PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR  
BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Berdasarkan tema tersebut diatas, terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Tahun 2020, yaitu :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman

6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### **1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

#### **1.3.1. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Badung, secara geografis terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" Bujur Timur dengan luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43% dari daratan Pulau Bali). Hamparan geografis ini dibagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang yaitu 115 Km<sup>2</sup> (27,48%), sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 17,52Km<sup>2</sup> (4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Badung**  
**Per Kecamatan Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (km<sup>2</sup>)</b>	<b>PERSENTASE LUAS WILAYAH</b>
1	KUTA SELATAN	101,13	24,16 %
2	KUTA	17,52	4,19 %
3	KUTA UTARA	33,86	8,09 %
4	MENGWI	82,00	19,59 %
5	ABIANSEMAL	69,01	16,49 %
6	PETANG	115,00	27,48 %
	<b>KABUPATEN BADUNG</b>	<b>418,52</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2020*



Wilayah Kabupaten Badung secara geografis berada pada posisi paling Selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buleleng
- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Kabupaten Tabanan

Dari aspek klimatologis, Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan serta diselingi dengan musim pancaroba. Keadaan suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 31,9 °C, sedangkan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 29,3 °C. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 25,9 °C dan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 24,7 °C. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 311,0 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 0 mm. Kemudian untuk persentase kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 84%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 76%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Cuaca Rata – Rata**  
**Kabupaten Badung Tahun 2020**

KETERANGAN	VOLUME
Suhu Maksimum Tertinggi	31,9 °C
Suhu Maksimum Terendah	29,3 °C
Suhu Minimum Tertinggi	25,9 °C
Suhu Minimum Terendah	24,7 °C
Curah Hujan Tertinggi	311,0 mm
Curah Hujan Terendah	0 mm
Kelembaban Udara Tertinggi	84 %
Kelembaban Udara Terendah	76 %

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2020*

**1.3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung**

Salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia. Maka dari itu dalam pencapaian tujuan pembangunan, komponen penduduk yang berkualitas merupakan modal dasar yang sangat penting. Dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas dan distribusi penduduk mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi penduduk yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara yang mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*social cultural*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Berdasarkan data registrasi Semester I Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2020 sejumlah 492.826 jiwa, meningkat 2,26% dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 sejumlah 490.564 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 245.697 jiwa (49,85%) dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 247.129 (50,15%), dimana jumlah penduduk laki-laki Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,01% dibandingkan tahun

2019 sejumlah 244.691 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,26% dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 245.873 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Badung Tahun 2020 sejumlah 128.395 Kepala Keluarga. Adapun laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020 mencapai 0,92%. Jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2020**

KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah Penduduk	492.826	Jiwa
Laki – Laki	245.697	Jiwa
	49,85	%
Perempuan	247.129	Jiwa
	50,15	%
Jumlah Rumah Tangga	128.395	KK
Laju Pertumbuhan	0,92	%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung  
(data registrasi)*

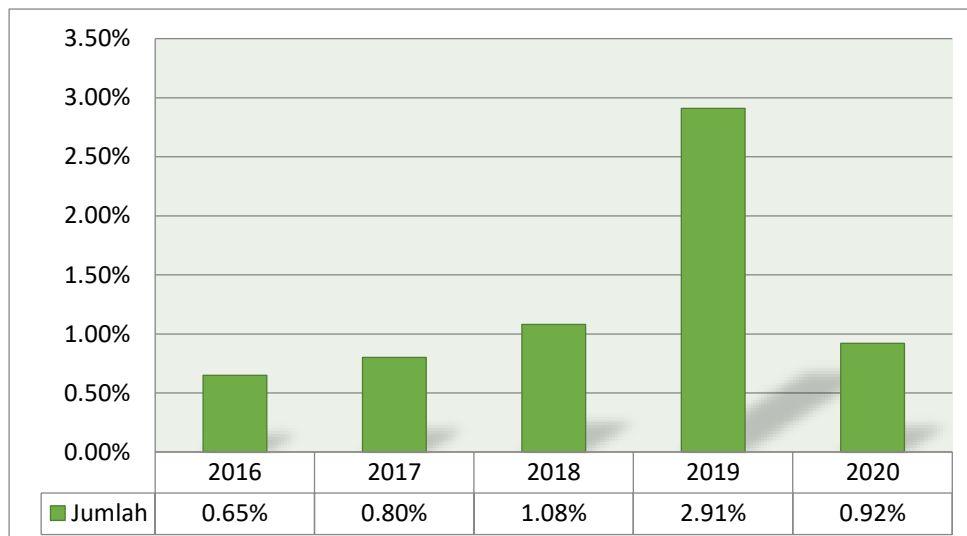
*Catatan : Data Semester I Tahun 2020*

### **1.3.3. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung**

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor kependudukan, diantaranya adalah kelahiran, kematian dan juga adanya migrasi penduduk. Jumlah penduduk akan terus bertambah dari waktu ke waktu dan tentunya akan mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu pula, sejalan dengan perubahan jumlah penduduk dan segala bentuk aktivitasnya, dengan kata lain penduduk akan saling berinteraksi di dalam usahanya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduknya akan menyebabkan jumlah penduduk akan meningkat dengan cepat. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung laju pertumbuhan penduduk periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada Grafik 1.1. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Badung mencapai 0,65% dan mengalami peningkatan menjadi 0,80% pada tahun 2017, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,08% dan pada tahun 2019 mencapai 2,91%. Data laju pertumbuhan Kabupaten Badung tahun 2016 hingga 2019 merupakan Data Semester II sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 0,92% merupakan Data Semester I tahun 2020.

**Grafik 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*

#### **1.3.4. Jumlah PNS Kabupaten Badung**

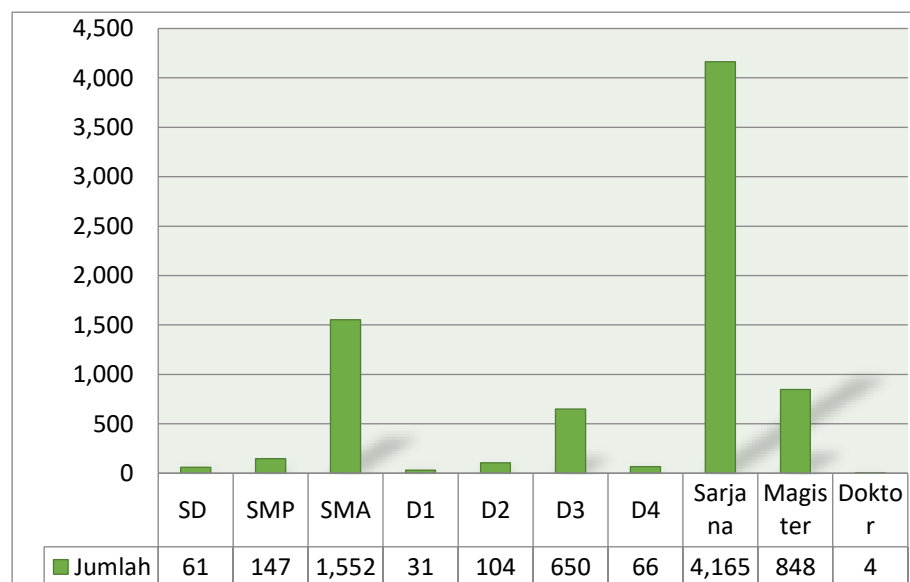
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.

Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteris (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Badung jumlah PNS Kabupaten Badung Tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut:

**A. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Pendidikan**

Jenjang pendidikan terakhir PNS pada lingkup Pemerintah Kabupaten Badung bervariasi. Grafik 1.2 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang terbanyak adalah tingkat Sarjana yaitu sejumlah 4.165 PNS hingga jenjang pendidikan yang masih sedikit yaitu Doktor sebanyak 4 PNS. Peningkatan jenjang pendidikan tersebut penting sebab semakin tinggi jenjang pendidikan seorang PNS maka akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga harapan untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang prima akan semakin mudah terwujud.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**



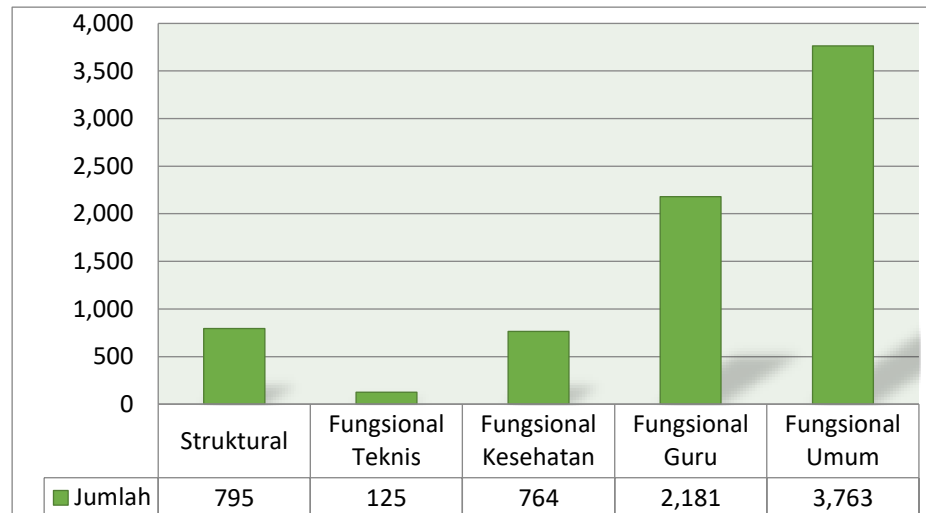
*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2020*

**B. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Jabatan**

Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan jabatan Struktural maupun Fungsional pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 1.3. Jabatan Struktural sebanyak 795 orang, sedangkan jabatan Fungsional dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Fungsional Teknis, Fungsional Kesehatan, Fungsional Guru dan Fungsional Umum. Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Badung jabatan Fungsional Umum merupakan

jabatan terbanyak mencapai 3.763 orang dan paling sedikit Fungsional Teknis yaitu 125 orang.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2020**

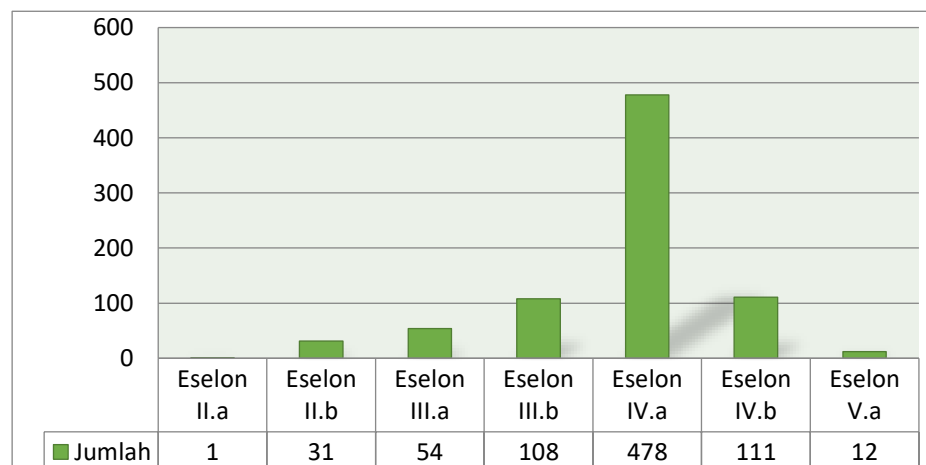


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2020

### C. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan Struktural bertingkat-tingkat dari tingkat tertinggi (eselon II.a) hingga yang terendah (eselon V.a). Berikut merupakan jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan jabatan Struktural Tahun 2020.

**Grafik 1.4**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2020**

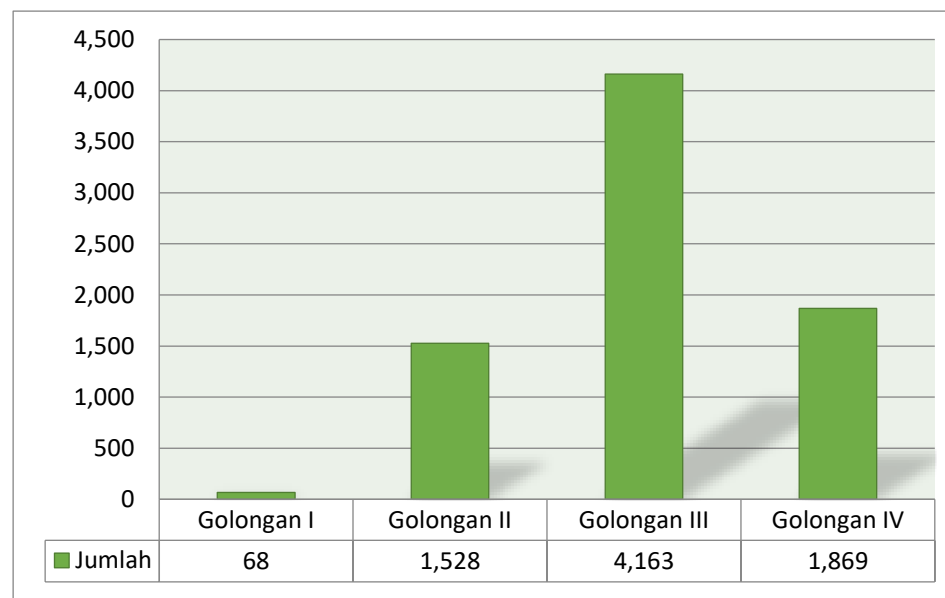


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2020

**D. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan**

Dalam karir PNS dibagi menjadi 4 (empat) Golongan, dimana Golongan I disebut Juru, Golongan II disebut Pengatur, Golongan III disebut Penata dan Golongan IV disebut Pembina, sedangkan untuk ruang terbagi atas a, b, c, d. Golongan tersebut disesuaikan dengan jabatan masing-masing individu, prestasi maupun masa kerja yang telah ditempuh. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Golongan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 1.5.

**Grafik 1.5**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2020**



NO.	I		II		III		IV	
1	I.a		II.a	180	III.a	1247	IV.a	881
2	I.b	10	II.b	171	III.b	896	IV.b	936
3	I.c	19	II.c	585	III.c	947	IV.c	47
4	I.d	39	II.d	592	III.d	1073	IV.d	5
	68		1528		4163		1869	

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2020*

**1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan****1.3.5.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberi dampak yang sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Badung.

Diakui bersama bahwa dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi secara global sangat mempengaruhi pencapaian target Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

Selama Tahun 2020, upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengurangi dampak Covid - 19 kepada masyarakat khususnya usaha yang bergerak di bidang pariwisata berupa pemberian Insentif Pajak Daerah antara lain dengan menerbitkan **Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2020** tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*.

Selain itu, Bupati Badung juga telah mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 413 Tahun 2020** tentang Perpanjangan Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 di Kabupaten Badung Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* serta memberikan pengurangan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak, permohonan angsuran atau permohonan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pokok pajak.

Kebijakan tersebut dalam rangka memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak daerah selama masa Pandemi Covid - 19, menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak serta menindaklanjuti **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya penanganan dampak ekonomi terhadap dunia usaha dan masyarakat.



Selama periode Pandemi Covid - 19, Pemerintah Kabupaten Badung tetap melakukan pengawasan kepada aktivitas Wajib Pajak melalui pemantauan petugas ke lapangan dan memberikan himbauan untuk tetap patuh melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp.2.701.549.221.693,04 (**Dua Triliun Tujuh Ratus Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Empat Sen**) terhadap target tersebut, pencapaian pendapatan asli daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2020 sebesar Rp.2.116.974.302.051,93 (**Dua Triliun Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen**) atau mencapai **78,36%**. Adapun rincian PAD Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

**TABEL 1.4**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
a	Pendapatan Pajak Daerah	2.200.196.693.545,02	1.613.756.122.745,06	73,35
b	Hasil Retribusi Daerah	84.784.857.162,00	68.412.915.969,10	80,69
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	246.526.835.894,02	243.081.327.172,33	98,60
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.040.835.092,00	191.723.936.165,44	112,75
<b>JUMLAH</b>		<b>2.701.549.221.693,04</b>	<b>2.116.974.302.051,93</b>	<b>78,36</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 18 Pebruari 2021)*

Dari Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

**a. Pajak Daerah**

Target Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.2.200.196.693.545,02 (**Dua Triliun Dua Ratus Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Dua Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.613.756.122.745,06 (**Satu Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Enam Sen**) atau **73,35%**. Secara rinci pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1.5**  
**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%
1	Hotel	1.080.021.553.440,60	670.803.265.683,85	62,11
2	Restoran	420.429.042.735,85	255.065.894.487,66	60,67
3	Hiburan	73.047.649.876,29	35.575.211.795,58	48,70
4	Parkir	16.319.234.714,87	12.242.978.980,25	75,02
5	Reklame	1.000.000.000,00	888.400.639,09	88,84
6	Air Tanah	38.999.877.772,92	40.293.440.694,92	103,32
7	Mineral Bukan Logam dan Batuan	73.271.221,27	49.545.000,00	67,62
8	Penerangan Jalan	110.570.470.966,42	117.079.252.250,00	105,89
9	PBB P2	159.735.592.816,80	147.068.176.988,36	92,07
10	BPHTB	300.000.000.000,00	334.689.956.225,35	111,56
<b>JUMLAH</b>		<b>2.200.196.693.545,02</b>	<b>1.613.756.122.745,06</b>	<b>73,35</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 18 Pebruari 2021)*

Berdasarkan tabel di atas untuk Pajak Hotel merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung sebesar **41,57%**. Penerimaan Pajak Hotel dalam kas daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

- 1) Pajak Hotel, di tahun 2020 dengan target sebesar Rp.1.080.021.553.440,60 (**Satu Triliun Delapan Puluh Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah Enam Puluh Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.670.803.265.683,85 (**Enam Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Lima Sen**) atau **62,11%**;

- 2) Pajak Restoran, dengan target sebesar Rp.420.429.042.735,85 (**Empat Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Lima Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.255.065.894.487,66 (**Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Enam Sen**) atau **60,67%**;
- 3) Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp.73.047.649.876,29 (**Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.35.575.211.795,58 (**Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Delapan Sen**) atau **48,70%**;
- 4) Pajak Parkir, dengan target sebesar Rp.16.319.234.714,87 (**Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.12.242.978.980,25 (**Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah Dua Puluh Lima Sen**) atau **75,02%**;
- 5) Pajak Reklame, dengan target sebesar Rp.1.000.000.000,00 (**Satu Milyar Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp.888.400.639,09 (**Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Sen**) atau **88,84%**. Terhadap rendahnya realisasi pajak reklame disebabkan adanya penzonasian wilayah yang boleh dipasang reklame agar tidak mengganggu estetika penataan kota, ditambah adanya tiang reklame yang berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pihaknya tak bisa melakukan penarikan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP;
- 6) Pajak Air Tanah, dengan target sebesar Rp.38.999.877.772,92 (**Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta**

**Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.40.293.440.694,92 **(Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)** atau **103,32%**;

- 7) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, dengan target sebesar Rp.73.271.221,27 **(Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.49.545.000,00 **(Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau **67,62%**;
- 8) Pajak Penerangan Jalan, dengan target sebesar Rp.110.570.470.966,42 **(Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Dua Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.117.079.252.250,00 **(Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau **105,89%**;
- 9) Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.159.735.592.816,80 **(Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen)** dengan realisasi sebesar Rp.147.068.176.988,36 **(Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)** atau **92,07%**;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.300.000.000.000,00 **(Tiga Ratus Milyar Rupiah)** dengan realisasi sebesar Rp.334.689.956.225,35 **(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen)** atau **111,56%**.

**b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.84.784.857.162,00 **(Delapan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus**

**Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah)** dapat direalisasikan sebesar Rp.68.412.915.969,10 (**Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sepuluh Sen**) atau **80,69%**.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp.246.526.835.894,02 (**Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Dua Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.243.081.327.172,33 (**Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen**) atau **98,60%**.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target sebesar Rp.170.040.835.092,00 (**Seratus Tujuh Puluh Milyar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.191.723.936.165,44 (**Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Empat Sen**) atau **112,75%**.

**1.3.5.2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.568.349.154.472,00 (**Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**) dengan realisasi sebesar Rp.472.515.501.116,00 (**Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Seratus Enam Belas Rupiah**) atau mencapai **83,14%**. Adapun rincian Dana Perimbangan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

**TABEL 1.6**  
**DANA PERIMBANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.368.175.000,00	88.941.535.805,00	116,46
b	Dana Alokasi Umum	335.170.598.000,00	330.780.978.000,00	98,69
c	Dana Alokasi Khusus	156.810.381.472,00	52.792.987.311,00	33,67
<b>JUMLAH</b>		<b>568.349.154.472,00</b>	<b>472.515.501.116,00</b>	<b>83,14</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 18 Pebruari 2021)*

Dari Tabel 1.6 diatas Dana Perimbangan Kabupaten Badung menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari target sebesar Rp.76.368.175.000,00 (**Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.88.941.535.805,00 (**Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah**) atau **116,46%**.

**b. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum dari target sebesar Rp.335.170.598.000,00 (**Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.330.780.978.000,00 (**Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah**) atau **98,69%**.

**c. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus dari target sebesar Rp.156.810.381.472,00 (**Seratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.52.792.987.311,00 (**Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah**) atau **33,67%**.

**1.3.5.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.363.649.079.456,95 (**Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen**) dengan realisasi sebesar Rp.1.260.947.772.475,91 (**Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen**) atau mencapai **92,47%**. Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut:



**TABEL 1.7**  
**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
a	Pendapatan Hibah	1.022.004.920.000,00	913.918.551.000,00	89,42
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	187.481.540.456,95	155.145.886.475,91	82,75
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	152.072.619.000,00	191.383.335.000,00	125,85
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.090.000.000,00	500.000.000,00	23,92
<b>JUMLAH</b>		<b>1.363.649.079.456,95</b>	<b>1.260.947.772.475,91</b>	<b>92,47</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung (Per tanggal 18 Pebruari 2021)*

Dari Tabel 1.7 diatas Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pendapatan Hibah**

Pendapatan Hibah dari target sebesar Rp.1.022.004.920.000,00 (**Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.913.918.551.000,00 (**Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah**) atau **89,42%**.

**b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari target sebesar Rp.187.481.540.456,95 (**Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen**) dapat direalisasikan sebesar Rp.155.145.886.475,91 (**Seratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam**

**Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) atau 82,75%.**

**c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari target sebesar Rp.152.072.619.000,00 (**Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.191.383.335.000,00 (**Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah**) atau **125,85%.**

**d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dari target sebesar Rp.2.090.000.000,00 (**Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah**) dapat direalisasikan sebesar Rp.500.000.000,00 (**Lima Ratus Juta Rupiah**) atau **23,92%.**

**1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2018-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penurunan alokasi belanja dilakukan dengan menyesuaikan terhadap penurunan target Pendapatan Daerah sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid- 19. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseise 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Permendagri tersebut diamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran Pendapatan Daerah dan alokasi Belanja Daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Belanja Daerah tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.4.793.391.784.707,68 (**Empat Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah Enam Puluh Delapan Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.3.821.313.758.726,33 (**Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen**) atau **79,72%**. Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.2.781.605.222.380,57 (**Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen**) Dan realisasinya sebesar Rp. 2.092.086.778.422,64 (**Dua Triliun Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Empat Sen**) atau **75,21%** yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.216.344.927.602,36 (**Satu Triliun Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah Tiga Puluh Enam Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.1.104.941.956.555,40 (**Satu Triliun Seratus Empat Milyar**

**Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sen) atau 90,84%;**

- 2) Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp.8.433.880.000,00 (**Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**) dan realisasinya sebesar Rp.1.121.800.000,00 (**Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**) atau **13,30%;**
- 3) Belanja Hibah dalam tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.760.410.839.350.00 (**Tujuh Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) realisasinya Rp.586.039.663.272,31 (**Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Satu Sen**) atau **77,07 %;**
- 4) Belanja Bantuan Sosial berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2020 sebesar Rp.162.865.000.000.00 (**Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah**) realisasinya sebesar Rp.50.192.100.00.00 (**Lima Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah )** atau **30,82 %;**
- 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp.321.020.147.046,70 (**Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Sen**) realisasinya sebesar Rp.234.503.321.092,00 (**Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah**) atau **73,05%;**
- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp.67.728.024.527.74 (**Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh**

**Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)** realisasinya Rp.1.187.275.000,00 **(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau **1,75%;**

- 7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.244.802.403.853,77 **(Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen)** dan realisasinya sebesar Rp.114.100.662.502,93 **(Seratus Empat Belas Milyar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen)** atau **46,61 %.**

**b. Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2020 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp.2.011.786.526.327,11 **(Dua Triliun Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen)** dapat direalisasikan sebesar Rp.1.729.226.980.303.69 **(Satu Triliyun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen)** atau **85,95%** yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.118.688.350.284,00 **(Seratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** realisasinya sebesar Rp.108.629.082.831,00 **(Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau **91,52%;**

- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.1.385.653.885.015,92 (**Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Belas Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.1.167.770.501.355,75 (**Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen**) atau **84,27%**;
- 3) Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.507.444.327.027,19 (**Lima Ratus Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Belas Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.452.827.396.116,94 (**Empat Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen**) atau **89,24%**.

#### **1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dirancang sebesar Rp.278.775.207.361,18 (**Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen**) dan realisasinya sebesar Rp.279.401.874.053,18 (**Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen**) atau **100,22%**.

Dari Pembiayaan tersebut diatas diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp.278.775.207.361,18 (**Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen**) atau **100% (pra audit)**. Perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan tersebut termasuk sisa dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.204.754.700.671,43 (**Dua Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh**

**Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tiga Sen)** yang tidak terealisasi dan wajib disetor kembali ke kas Negara.

Penarikan kembali pokok dana bergulir realisasinya sebesar Rp.126.666.692,00 (**Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah**).

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### A. PENDAPATAN

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam Tingkat Nasional pada akhir Bulan Maret Tahun 2020. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 5.303.069.994.167,98 ( **Lima Triliun Tiga Ratus Tiga Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.701.549.221.693,04 ( **Dua Triliun Tujuh Ratus Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Empat Sen** ) atau



berkurang sebesar Rp. 2.601.520.772.474,94 ( **Dua Triliun Enam Ratus Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen** ) atau **49,06 %**. Penurunan Target penerimaan ini disebabkan karena Pandemi Covid-19, yang berpengaruh terhadap turunnya kunjungan wisatawan yang sangat signifikan ke Bali khususnya Kabupaten Badung, sehingga terjadi penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.760.834.664.439,97 ( **Empat Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen** ) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.200.196.693.545,02 ( **Dua Triliun Dua Ratus Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Dua Sen** ) atau berkurang sebesar Rp.2.560.637.970.894,95 ( **Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen** ) atau **53,79%**.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 159.253.480.054,00 ( **Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah** ) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.84.784.857.162,00 ( **Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah** ) atau berkurang sebesar Rp.74.468.622.892,00 ( **Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah** ) atau **46,76%**.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 186.841.202.808,01 ( **Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua**

**Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Satu Sen)** dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.59.685.633.086,01 (**Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Satu Sen**) atau **31,94%** sehingga menjadi Rp. 246.526.835.894,02 (**Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Dua Sen**)

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 196.140.646.866,00 (**Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah**) dalam perubahan APBD 2020 ditargetkan sebesar Rp.170.040.835.092,00 (**Seratus Tujuh Puluh Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah**) atau berkurang sebesar Rp.26.099.811.774,00 (**Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah**) atau **13,31%**.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 600.415.190.000,00 (**Enam Ratus Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah**) dan dalam Perubahan APBD 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 32.066.035.528,00 (**Tiga Puluh Dua Miliar Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah**) atau **5,34 %** sehingga menjadi Rp.568.349.154.472,00 (**Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 65.804.133.000,00 (**Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.

10.564.042.000,00 ( **Sepuluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah**) atau **16,05 %** sehingga menjadi Rp. 76.368.175.000,00 ( **Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**) .

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 365.572.975.000,00 ( **Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 30.402.377.000,00 ( **Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah**) atau **8,32 %** sehingga menjadi Rp. 335.170.598.000,00 ( **Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah**).

3) Dana Alokasi Khusus yang dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 169.038.082.000,00 ( **Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 12.227.700.528,00 ( **Dua Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah**) atau **7.23%** sehingga menjadi Rp. 156.810.381.472,00 ( **Seratus Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**).

c. Komponen Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 73.998.200.000,00 ( **Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 948.006.720.000,00 ( **Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**) atau sebesar **1.218,12 %** sehingga menjadi Rp.

1.022.004.920.000 (**Satu Triliun Dua Puluh Dua Miliar Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**) Kenaikan ini bersumber dari Hibah Pariwisata sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07,02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.

- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 183.612.836.564,12 (**Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Dua Belas Sen**) mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.868.703.892,83 (**Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen**) atau **2,11 %** sehingga menjadi Rp. 187.481.540.456,95 (**Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen**)
- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 137.606.994.000,00 (**Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah**) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.465.625.000,00 (**Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**) atau **10,51 %** sehingga menjadi Rp. 152.072.619.000,00 (**Seratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah**)
- 4) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 3.650.000.000,00

( **Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah** ) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.560.000.000,00 ( **Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah** ) atau **42,74 %** sehingga menjadi Rp. 2.090.000.000,00 ( **Dua Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah** )

Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

1. Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas.
5. Memberdayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
6. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
7. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menuntaskan pembahasan Regulasi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut :

1. Menerapkan sistem pendataan yang sistematis, kuantitatif dan formatif, untuk dapat memberi bahan-bahan yang akurat dan obyektif dalam menentukan potensi pajak.
2. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat melalui pelayanan antar jemput atau melalui bendahara khusus penerima.
3. Memberikan diklat pemeriksaan pembukuan sesuai standard akuntansi Indonesia serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah.
4. Melaksanakan sosialisasi produk hukum pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
5. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang berwujud Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan juklak lainnya.
6. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya memaksimalkan potensi penggalan sumber-sumber PAD.

Berikut ini disajikan Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.

**Tabel I**  
**RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH DI APBD INDUK DAN SETELAH PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	%
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	6.302.353.214.732,10	4.633.547.455.621,99	(1.668.805.759.110,11)	(26,48)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	5.303.069.994.167,98	2.701.549.221.693,04	(2.601.520.772.474,94)	(49,06)
1.1.1	Pajak Daerah	4.760.834.664.439,97	2.200.196.693.545,02	(2.560.637.970.894,95)	(53,79)
1.1.2	Retribusi Daerah	159.253.480.054,00	84.784.857.162,00	(74.468.622.892,00)	(46,76)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	186.841.202.808,01	246.526.835.894,02	59.685.633.086,01	31,94
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	196.140.646.866,00	170.040.835.092,00	(26.099.811.774,00)	(13,31)
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	600.415.190.000,00	568.349.154.472,00	(32.066.035.528,00)	(5,34)
1.2.1	Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak	65.804.133.000,00	76.368.175.000,00	10.564.042.000,00	16,05
1.2.2	Dana Alokasi Umum	365.572.975.000,00	335.170.598.000,00	(30.402.377.000,00)	(8,32)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	169.038.082.000,00	156.810.381.472,00	(12.227.700.528,00)	(7,23)
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	398.868.030.564,12	1.363.649.074.456,95	964.781.043.892,83	241,88
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.998.200.000,00	1.022.004.920.000,00	948.006.720.000,00	1.281,12
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	183.612.836.564,12	187.481.540.456,95	3.868.703.892,83	2,11
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137.606.994.000,00	152.072.619.000,00	14.465.625.000,00	10,51
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.650.000.000,00	2.090.000.000,00	(1.560.000.000,00)	(42,74)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2020

## B. BELANJA

Dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Negara, seiring perubahan dampak Pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, alokasi pengurangan belanja sebesar Rp. 1.508.961.430.024,42 ( **Satu Triliun Lima Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Dua Sen** ) atau sebesar **23,94** % dari target anggaran belanja sebelumnya yaitu sebesar Rp. 6.302.353.214.732,10 ( **Enam Triliun Tiga Ratus Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Sepuluh Sen** ) sehingga setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 4.793.391.784.707,68 ( **Empat Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah Enam Puluh Delapan Sen** )

Hal-hal yang disesuaikan dalam Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

### 1. **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung berkurang sebesar Rp. 67.795.433.837,53 ( **Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Tiga Sen** ) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp. 208.173.295.376,35 ( **Dua Ratus Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Lima Sen** ) atau **14,61** % dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 1.424.518.222.978,71 ( **Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 1.216.344.927.602,36 ( **Satu Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah Tiga Puluh Enam Sen** )



- b. Belanja Subsidi berkurang sebesar Rp. 3.007.607.840,00 ( **Tiga Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah** ) atau **26,29%**. dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 11.441.487.840,00 ( **Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 8.433.880.000,00 ( **Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah** )
- c. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp. 656.615.994.000 ( **Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah** ) atau **632.61%** dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 103.794.845.350,00 ( **Seratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp.760.410.839.350,00 ( **Tujuh Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah** )
- d. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 136.069.000.000,00 ( **Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah** ) atau **45,52%** dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp.298.934.000.000,00 ( **Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 162.865.000.000,00 ( **Seratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah** )
- e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkurang sebesar Rp. 311.728.668.002,69 ( **Tiga Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen** ) atau **49,27%**. dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 632.748.815.049,39 ( **Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar

Rp.321.020.147.046,70 ( **Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Sen** )

Kebijakan berkurangnya anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa karena target pendapatan berkurang sehingga terkoreksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengalami penurunan sebesar Rp. 295.235.260.472,26 ( **Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Enam Sen** ) atau **81,34%** dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 362.963.285.000 ( **Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 67.728.024.527,74 ( **Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen** ) Kebijakan berkurangnya anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.229.802.403.853,77 ( **Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen** ) atau **1.532,02%** dari target anggaran belanja sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 ( **lima belas miliar** ) sehingga setelah perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 244.802.403.853,77 ( **Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen** ) yang dialokasikan kepada belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial.

## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dirancang dalam perubahan menurun sebesar Rp. 1.441.165.996.186,89 ( **Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen** ) atau **41,74** % dari anggaran induk sebesar Rp.3.452.952.558.514,00 ( **tiga triliun empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah**) sehingga menjadi Rp. 2.011.786.562.327,11 ( **Dua Triliun Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen** ) Belanja tersebut mengalami perubahan karena ada beberapa kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan, yaitu belanja penanganan Pandemi Covid-19 dan belanja operasional kantor serta belanja wajib sesuai kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian Anggaran Belanja Langsung pada struktur Perubahan APBD Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai dirancang dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 46.250.596.639 (**Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah** ) atau **28,04%** dari anggaran induk sebesar Rp. 164.938.946.923,00 ( **Seratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah** ) sehingga menjadi Rp. 118.688.350.284 ( **Seratus Delapan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah** )
- b. Belanja Barang dan Jasa dirancang dalam perubahan menurun sebesar Rp. 646.881.294.985,76 ( **Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen**) atau **31,83** % dari anggaran induk sebesar Rp.2.032.535.180.001,68 ( **Dua Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Satu Rupiah Enam Puluh Delapan Sen** ) sehingga menjadi Rp.

**1.385.653.885.015,92 ( Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Belas Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen )**

- c Belanja Modal dirancang dalam perubahan menurun sebesar Rp.748.034.104.562,13 **( Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Belas Sen )** atau **59,58 %** dari anggaran induk sebesar Rp. 1.255.478.431.589,32 **( Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen )** sehingga menjadi Rp. 507.444.327.027,19 **( Lima Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Belas Sen )**

### **3. Permasalahan Utama Belanja Daerah**

Permasalahan, tantangan dan kendala utama yang dihadapi serta perlu menjadi perhatian pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada prioritas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai berikut:
- 1) Proses belajar mengajar terganggu dengan terjadinya Pandemic Covid-19;
  - 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga;
  - 3) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
  - 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- b. Permasalahan pada prioritas Kesehatan adalah sebagai berikut:
- 1) Terganggunya layanan kesehatan lainnya kepada masyarakat karena penanganan Pandemi Covid-19 mendapatkan prioritas utama;
  - 2) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif;

- 3) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif;
  - 4) Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- c. Permasalahan pada prioritas Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut:
- 1) Menurunnya pendapatan asli daerah, dan melemahnya perekonomian nasional dan perekonomian global akibat Pandemi Covid-19;
  - 2) Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas;
  - 3) Terbatasnya jiwa kewirausahaan dalam membuka peluang usaha;
  - 4) Belum terpenuhinya kebutuhan pasar akan kualitas pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan sehat;
  - 5) Belum optimalnya produksi pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal.
- d. Permasalahan pada prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; adalah sebagai berikut:
- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri;
  - 2) Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online;
  - 3) Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
- e. Permasalahan pada prioritas Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:
- 1) Belum lengkapnya ketersediaan bendung untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (Propinsi Bali);
  - 2) Belum Optimalnya pengelolaan air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat;
  - 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.

- f. Permasalahan pada prioritas Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya masalah sosial karena dampak Pandemi Covid-19;
  - 2) Belum optimalnya sinergi antar stakeholder dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - 3) Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru;
  - 4) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang mendukung kaum ibu pada ruang publik dan tempat-tempat umum.
- g. Permasalahan pada prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
- 1) Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
  - 2) Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
  - 3) Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
- h. Permasalahan pada prioritas Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
- 1) Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan selama pandemi Covid-19;
  - 2) Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung;
  - 3) Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
  - 4) Terbatasnya daya saing produk hasil peternakan dan perikanan.
  - 5) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan.
  - 6) Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda.
  - 7) Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
  - 8) Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
  - 9) Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

- i. Permasalahan pada prioritas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih belum optimal;
  - 2) Masih terbatasnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat;
  - 3) Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana;
  - 4) Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat;
  - 5) Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.

#### **4. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah**

Arah dan Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan serta penanganan pandemi Covid-19.
- c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

#### **5. Prioritas dan Plafon Perubahan Belanja Daerah**

Sebagai tindak lanjut antisipatif dari berbagai permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan belanja daerah, maka strategi dan prioritas Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 lebih difokuskan pada beberapa hal berikut:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan.

## Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha daerah agar tetap hidup;
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;
- d. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat.

Ringkasan Belanja Daerah di APBD Induk dan setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tertera dalam Tabel II berikut ini :

Tabel II  
RINGKASAN BELANJA DAERAH DI APBD INDUK DAN SETELAH PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	BELANJA	6.302.353.214.732,10	4.793.391.784.707,68	(1.508.961.430.024,42)	(23,94)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.849.400.656.218,10	2.781.605.222.380,57	(67.795.433.837,53)	(2,38)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.424.518.222.978,71	1.216.344.927.602,36	(208.173.295.376,35)	(14,61)
2.1.2	Belanja Subsidi	11.441.487.840,00	8.433.880.000,00	(3.007.607.840,00)	(26,29)
2.1.3	Belanja Hibah	103.794.845.350,00	760.410.839.350,00	656.615.994.000,00	632,61
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	298.934.000.000,00	162.865.000.000,00	(136.069.000.000,00)	(45,52)
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota & Pemerintahan Desa	632.748.815.049,39	321.020.147.046,70	(311.728.668.002,69)	(49,27)
2.1.6	Belanja Bantuan Keu. kpd Provinsi/ Kab/Kota & Pemerintahan Desa	362.963.285.000,00	67.728.024.527,74	(295.235.260.472,26)	(81,34)
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	244.802.403.853,77	229.802.403.853,77	1.532
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.452.952.558.514,00	2.011.786.562.327,11	(1.441.165.996.186,89)	(41,74)
2.2.1	Belanja Pegawai	164.938.946.923,00	118.688.350.284,00	(46.250.596.639,00)	(28,04)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.032.535.180.001,68	1.385.653.885.015,92	(646.881.294.985,76)	(31,83)
2.2.3	Belanja Modal	1.255.478.431.589,32	507.444.327.027,19	(748.034.104.562,13)	(59,58)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2020

### C. PEMBIAYAAN

Kondisi Pembiayaan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun anggaran 2020 terdiri dari :



Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya bersumber dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran.

### **1. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan**

Alokasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya masih harus diperuntukkan sebagai pembiayaan tahun berikutnya.

### **2. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan**

Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan, berkaitan dengan penggunaan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada tahun berikutnya.

### **3. Strategi dan Prioritas Pembiayaan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung senantiasa melaksanakan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan tidak mengesampingkan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Struktur Anggaran Pembiayaan di APBD Induk dan setelah Perubahan Tahun Anggaran 2020 diuraikan dalam Tabel III berikut ini :

**Tabel III**  
**RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH DI APBD INDUK DAN SETELAH PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	PEMBIAYAAN	0,00	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya	0,00	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00		-	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (PD Pasar)	0,00		-	
	Pembiayaan Netto	0,00	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Tahun 2020*

*Catatan :*

*Perolehan silpa sebesar Rp. 278.775.207.361,18 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Delapan Belas Sen ) termasuk sisa dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf sebesar Rp. 204.754.700.671,43 ( Dua Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Puluh Tiga Sen) Yang tidak terealisasi dan wajib harus disetor kembali ke Kas Negara.*

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**A. URUSAN PENDIDIKAN**

**A.1 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.604.468.392.117,92 dan realisasi sebesar Rp.531.872.631.386,94,00 atau 87,99% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.1

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Memantapkan tata kelola pendidikan	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>1.1</b> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik <b>1.2</b> Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan <b>1.3</b> Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir <b>1.4</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor <b>1.5</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan <b>1.6</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <b>1.7</b> Penyediaan makanan dan minuman <b>1.8</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah <b>1.9</b> Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan <b>1.10</b> Penyediaan Upacara Keagamaan <b>1.11</b> Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	100% 100% 100% 13 Orang 8 kantor 8 kantor 7 jenis 100% 1 paket 66,042 liter 12 jenis 12 bulan	100% 100% 100% 13 Orang 8 kantor 8 kantor 7 jenis 100% 1 paket 66,042 liter 12 jenis 12 bulan			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.11 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	12 bulan	12 bulan			
				1.12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Dinas /Operasional	94 unit	94 unit			
				1.13 Pengelolaan Kebersihan Kantor	7 kantor	7 kantor			
				2. <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1 tahun	1 tahun			
				2.1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94 unit	94 unit			
				2.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	17 unit	17 unit			
				2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8 kantor	8 kantor			
				3 <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100%	100%			
				3.1 Laporan standar pelayanan minimal Disdikpora	1 dokumen	1 dokumen			
				3.2 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Disdikpora	276 sekolah	276 sekolah			
				3.3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%			
				3.4 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	1 dokumen			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.5	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	50 laporan	50 laporan		
				4	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	100%	100%		
				4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)	3 dokumen	3 dokumen		
				4.2	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kabupaten Badung	4 kali	4 kali		
			Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun	5	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	100%	100%		
				5.1	Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung	216 siswa	216 siswa		
				5.2	Pengadaan raport dan STTB TK	1 paket	1 paket		
				5.3	Pengadaan Gambelan Baleganjur untuk Taman Kanak Kanak di Kabupaten Badung	12 set	-		
				5.4	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	3,960 orang	3,960 orang		
				5.5	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	4 lembaga	4 lembaga		
				5.6	Penyelenggaraan Ijin Operasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Badung	100 lembaga	100 lembaga		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6 <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan</b>	100%	100%	Adanya fenomena beberapa sekolah negeri yang menerima siswa melebihi ketentuan, hal ini disebabkan oleh jumlah anak usia sekolah yang ada di lingkungan sekolah tersebut lebih banyak dari daya tampung sekolah	Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan langkah-langkah optimalisasi, serta pemerataan pembangunan sarana prasarana yang telah tersedia dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).	
				6.1 Penyelenggaraan Tes sumatif SD	284 sekolah	284 sekolah			
				6.2 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	324 sekolah	324 sekolah			
				6.3 Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	156 peserta	156 peserta			
				6.4 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	249 SD	249 SD			
				6.5 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	28 SMP	28 SMP			
			Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik	6.6 Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International	2 jenjang	2 jenjang			
				6.7 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	8.500 stel	-			
				6.8 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	7.490 stel	-			
				6.9 Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung	10.411 siswa	10.411 siswa			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.10 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	249 sekolah	249 sekolah			
				6.11 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	22 sekolah	22 sekolah			
				6.12 Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	51 sekolah	-			
				6.13 Pendampingan Teknis pembangunan sarana pendidikan	1 Paket	1 Paket			
				6.14 Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemai	1 Paket	-			
				6.15 Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemai	1 Paket	-			
				6.16 Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	1 Paket	-			
				6.17 Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	1 Paket	-			
				6.18 Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	1 Paket	-			
				6.19 Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	1 Paket	-			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.20 Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	1 Paket	-			
				6.21 Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	1 Paket	-			
				6.22 Pangawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	1 Paket	-			
				6.23 Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	1 Paket	-			
				6.24 Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	1 Paket	-			
				6.25 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	1 Paket	-			
				6.26 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	1 Paket	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.27 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	1 Paket	-			
				6.28 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	1 Paket	-			
				6.29 Pembangunan RKB, Rehab Ringan Plafond dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemai	1 Paket	-			
				6.30 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kecamatan Mengwi	1 Paket	-			
				6.31 Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	1 Paket	-			
				6.32 Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	1 Paket	-			
				6.33 Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	1 Paket	-			
				6.34 Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	1 Paket	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.35	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	1 Paket	-		
				6.36	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	1 Paket	-		
				6.37	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwi	1 Paket	-		
				6.38	Pelaksanaan Lomba - Lomba Dalam Bidang Pendidikan Jenjang SMP di Kabupaten Badung	5 cabang	5 cabang		
				6.39	Sosialisasi Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung	60 SMP	60 SMP		
				6.40	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ONLINE SMP Kabupaten Badung	28 SMP Negeri	28 SMP Negeri		
				6.41	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD di Kabupaten Badung	10.411 siswa	10.411 siswa		
				6.42	Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD di Kabupaten Badung	284 sekolah	284 sekolah		
				6.43	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD di Kabupaten Badung	10.411 siswa	10.411 siswa		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.44 Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 paket	-			
				6.45 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	1 paket	-			
				6.46 Pemeliharaan Laptop Siswa SD Negeri di Kabupaten Badung	1 paket	-			
				6.47 Pengadaan Tanah untuk SMP Negeri 3 Kuta Utara	1 paket	-			
				6.48 Pengawasan Pembangunan RKB, Rehab Ringa, Plafon dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansema	1 paket	-			
				6.49 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	1 paket	-			
				6.50 Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	1 paket	-			
				6.51 Pekerjaan anti rayap pada SD Negeri di Kecamatan Abiansema	1 paket	-			
				6.52 Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 3 Werdi Buana	1 paket	-			
				6.53 Pengadaan Tanah Untuk SD No.1 Sempidi	1 paket	1 paket			
				6.54 Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	1 paket	-			
				6.55 Pemelaspasan Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	1 paket	1 paket			
				6.56 Pembangunan Sarana dan Prasarana SD No. 4 Penarungan	1 paket	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.56	Pembangunan Sarana dan Prasarana SD No. 4 Penarungan	1 paket	-		
				6.57	Pengadaan Sarana Prasarana Pramuka untuk SD dan SMP di Kabupaten Badung	1 paket	-		
				6.58	Pekerjaan anti rayap pada SD Negeri di Kecamatan Petang	1 paket	-		
				6.59	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri di Kecamatan Mengwi	1 paket	-		
				6.60	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta Utara	1 paket	-		
				6.61	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta	1 paket	-		
				6.62	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta Selatan	1 paket	-		
				6.63	Penataan Halaman SD No. 5 Kerobokan Kelod	1 paket	1 paket		
				7	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	100%	100%		
				7.1	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	1 kelompok	1 kelompok		
				7.2	Penyusunan Naskah/Soal Ujian Paket A, B dan C di Kabupaten Badung	33.600 lembar	33.600 lembar		
				8	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	100%	100%		
				8.1	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	200 orang	200 orang		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8.2 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP	100 orang	100 orang			
				8.3 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	50 orang	50 orang			
				8.4 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	249 SD Negeri	249 SD Negeri			
				8.5 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	28 sekolah	28 sekolah			
				8.6 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	4 TK Negeri	4 TK Negeri			
				8.7 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi	148 orang	148 orang			
				8.8 WORKSHOP GURU BK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )	30 orang	30 orang			
				9 Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	100%	100%			
				9.1 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung	77 jenis	77 jenis			
				9.2 Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	7.676 unit	7.676 unit			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.2 Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	7.676 unit	7.676 unit			
				10 <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	100%	100%			
				10.1 Pemberian Beasiswa Berprestasi di Kabupaten Badung	20 orang	20 orang			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (Sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.1)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Partisipasi Penduduk Memperoleh Pelayanan Pendidikan, yang didukung dengan 3 (tiga) indikator yaitu: 1). Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, 2). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD dan SMP), 3). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan. Capaian kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%. Tercapainya capaian kinerja ini karena adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap perkembangan pendidikan anak
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu 1). Angka Kelulusan, 2). Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi. Capaian kinerja ke dua indikator tersebut pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan.



- Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu 1). Indeks PMPRB Perangkat Daerah, 2). Nilai AKIP Perangkat Daerah. Capaian kinerja ke dua indikator tersebut pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%.

**A.2 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.262.435.574,00 dan realisasi sebesar Rp. 606.486.650,00 atau 9,68% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.2

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel . 3.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

NO	URUSAN PEMERINTAH AN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pendidikan	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Mempercepat proses pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	1. <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	6000 orang	3447 orang	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan	Peningkatan layanan melalui pusling, silang layanan koleksi promosi perpustakaan dan meningkatkan peran perpustakaan berbasis inklusi sosial (transformasi perpustakaan	
				1.1 Kegiatan Layanan Pustaka dan Informasi	6000 orng	3447 orang			
				1.2 Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	100 eksemplar	100 eksemplar			
				1.3 Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi	2 perpustakaan	2 perpustakaan			
				1.4 Kegiatan Lomba Minat Baca	4 orang	4 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.5 Kegiatan Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	16 sekolah	16 sekolah			
				1.6 Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	30 kali	30 kali			
				1.7 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Taman Bacaan	1 lokasi	1 lokasi			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.2)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Adanya rasionalisasi dan refocusing tersebut berpengaruh terhadap capaian target kinerja program/kegiatan.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan target 6000 orang pengunjung perpustakaan dengan realisasi sebesar 3447 orang pengunjung, hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid 19 untuk melaksanakan himbauan pemerintah agar melaksanakan pembatasan kerumunan. Walaupun demikian masyarakat dapat mencari informasi/bahan bacaan melalui perpustakaan digital Kabupaten Badung Pustaka Gita (<https://pustakagita.moco.co.id>) disamping itu Perpustakaan Sastra Mangutama memberikan kemudahan melalui pelayananan tarpustaka yang disebut Latar Kuta.

**B. URUSAN KESEHATAN**

**B.1. DINAS KESEHATAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.309.678.385,76 dan realisasi sebesar Rp327.382.640.053,46 atau 87,93 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.3

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel . 3.1.1.3 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kesehatan ( Dinas Kesehatan)

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KESEHATAN	1 DINAS KESEHATAN		1 Program pelayanan administrasi perkantoran	100%				
				Kegiatan :					
			1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal( ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat	1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	88.62%			
			2. Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi	1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	323 unit	94.23%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	1.3 Pelayanan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	100%			
			4. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1.4 Penyediaan alat tulis kantor	2 Paket	70.91%			
			5. Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan	1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	84.02%			
			6. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta	1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	39.45%			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7. Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan	1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17 Paket	98.05%			
			8. Peningkatan inivasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat	1.8 Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	100%			
			9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)	1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Ls	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10. Peningkatan ketersediaan obat ( obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis	1.10 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	1 Paket 90.53%			
				11. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based)	1.11 Penyediaan upacara keagamaan	203537 tanding 89.20%			
				12. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa KLB)/wabah	1.12 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	1 orang 90.30%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.13 Penyediaan dekorasi	1 Paket	0%			
				1.14 Pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	98.11%			
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
				2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	57.0 %			
				2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	321 Unit	218 Unit			
				2.3 Pemeliharaan perlengkapan kantor	100 %	38.0 %			
				2.4 Pemeliharaan peralatan kantor	100 %	57.0 %			
				2.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	100%			
				2.6 Survey sarana kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	100 %	3.89%			
				2.7 Pemeliharaan Mesin Genset	1 Paket	93.99%			
				2.8 Pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL	1 paket	23.63%			
3				<b>3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					
				3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	100%			
				3.2 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	100 %	100%			
				3.3 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100 %	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.4 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Periksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	100 %	100%			
4				4 <b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>					
				4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	100 %	100%			
				4.2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)	100 %	50%			
				1 <b>Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>					
				1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	88.5%			
				1.2 Pengelolaan dan Distribusi Obat	100%	100%			
				2 <b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					
				2.1 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	6 Kec	100%			
				2.2 Peningkatan Kualitas layanan puskesmas	6 Kec	100%			
				2.3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian	13 Pusk dan IFK	100%			
				2.4 Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kel.	62 desa/kel	100%			
				2.5 Penjangkaran kesehatan anak sekolah	27.717 siswa	14,058 siswa			
				2.6 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Dinas Kesehatan	1 Paket	66.9%			
				2.7 Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas	13 Pusk	13 Pusk			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.8 Peningkatan Pelayanan Posyandu	564 posyandu	40%			
				2.9 Lomba Puskesmas Berprestasi	1 Pt	50%			
				2.10 Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	13 Pusk dan 54 Pustu	100%			
				2.11 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	1 Pt	31.50%			
				2.12 Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	6 Kec	100%			
				2.13 Survey Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas layanan Kesehatan	13 Pusk	100%			
				2.14 Survey dan intervensi lanjutan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga	100%	100%			
				2.15 Lomba Sekolah Sehat Tingkat provinsi	3 sekolah	60%			
				2.16 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	9 nakes	50%			
				2.17 Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi	1 klinik	99.49%			
				2.18 Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	8 pos	100%			
				2.19 Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	1 kab	98.13%			
				2.20 Saka Bakti Husada	36 orang	100%			
				2.21 Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK Reguler )	13 pusk	100%			
				2.22 Pembinaan Kader Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa	310 org	0%			
				2.23 Pameran Promosi kesehatan masyarakat	4 hari	0 hari			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.24 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Petang I	1 Paket	100%			
				2.25 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Petang II	1 Paket	100%			
				2.26 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Abiansemai I	1 Paket	100%			
				2.27 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Abiansemai II	1 Paket	100%			
				2.28 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Abiansemai III	1 Paket	100%			
				2.29 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Abiansemai IV	1 Paket	100%			
				2.30 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Mengwi I	1 Paket	100%			
				2.31 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Mengwi II	1 Paket	100%			
				2.32 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Mengwi III	1 Paket	100%			
				2.33 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Kuta Utara	1 Paket	100%			
				2.34 Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Kuta I	1 Paket	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.35	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Kuta II	1 Paket	100%		
				2.36	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. Puskesmas Kuta Selatan	1 Paket	100%		
				2.37	Pelatihan Advanced Traumatic Life Support (ATLS)	12 bln	100%		
				2.38	Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Jiwa bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	39 org	100%		
				2.39	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record (EPHR)	6 Kec	100%		
				2.40	Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Napza	380 org	100%		
				2.41	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker terpadu Peripuma	100%	95%		
				2.42	Penguatan Kader Untuk Menunjang Program Garbasari	2755 orang	0%		
				2.43	Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Bidang Kesehatan	30 Nakes	80%		
				2.43	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	3 Sekolah	0		
3				<b>3 Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					
				3.1	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	100 TPM	100 %		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.2 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Badung	130124 Apotek dan 6 Toko Obat	100%			
				3.3 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	100%	100%			
4				<b>4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>					
				4.1 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	85%	100%			
				4.2 Penurunan Stunting	1 Pt	100%			
5				<b>5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>					
				5.1 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	95%	95 %			
				5.2 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	100%	100%			
				5.3 Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	18 Desa/ Kelurahan	9 Desa			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1 Kasus Pandemi Covid-19	1 Gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. 2 3T yakni "testing" (tes), "tracing" (pelacakan), dan "treatment" (penanganan) 3 Vaksinasi	
				6.1 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	500 fokus	372 Fokus (74,4 %)	Adanya Peningkatan Kasus Demam Berdarah	1 Melakukan Fogging fokus pada kasus DBD dengan hasil Penyelidikan Epidemiologi positif untuk memutus rantai penyebaran kasus lebih luas	
				6.2 Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	9721 org	10063 org		2 Meningkatkan Surveillance untuk penemuan kasus secara dini	
				6.3 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit	8 jam	8 jam		3 Meningkatkan kinerja petugas jumantik untuk melaksanakan	
				6.4 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	100,0%	75%		4 pengamatan vektor secara berkala dan	
				6.5 Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	4800 Orang	10 Kali			
				6.6 Evaluasi Pasca Imunisasi	868 KK	0 KK			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.6 Pengendalian Penyakit (DAK)	13 Pusk	100.00	Kecendrungan adanya peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Hypertens	Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat ( GERMAS ) baik lewat media cetak dan elektronik	
				6.7 Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	62 Desa	62 Desa			
7				<b>7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>					
				7.1 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	9 Hari	100%			
				7.2 Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat (KBS)	1750 SIP/SIK	100			
				7.3 Peningkatan Pelaksanaan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) Dinas Kesehatan	67 Instansi	67 Instansi			
				7.4 Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Puskesmas	13 Pusk	100.000			
				7.5 Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	13 Pusk	100			
8				<b>8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya</b>					
				8.1 Pengadaan Alat Kesehatan	1 paket	100			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9				<b>9 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>					
				9.1 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	200Tenaga Medis	100			
				9.2 Pengawasan Kesehatan Tradisional , rumah sakit , Pemerintah/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapis/perawat/optikal	100%	100			
10				<b>10 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita</b>					
				10.1 Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	100%	100%			
11				<b>11 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>					
				11.1 Pelayanan Kesehatan Lansia	564 Posyandu	68%			
12				<b>12 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>					
				12.1 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	13 Pusk	100%			
				12.2 Jaminan Persalinan (Jampersal)	1 paket	87.50%			
13				<b>13 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis</b>					
				13.1 Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	1 Paket	95.19%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14				14 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	100%				
				14.1 Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	13 Pusk	67.95%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.3)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

**a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 Kegiatan dimana 9 kegiatan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan 5 kegiatan belum sesuai target dengan program kegiatan yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh karena :

1. Realisasi Penggunaan telpon , listrik dan air sesuai dengan kebutuhannya.
2. Puskesmas sudah menganggarkan belanja ATK untuk BLUD sehingga belanja ATK Puskesmas tidak terealisasi sepenuhnya.
3. Belanja Cetak tidak bisa terealisasi sepenuhnya karena Puskesmas Juga Menganggarkan Belanja cetak
4. Kegiatan dekorasi tidak bisa dilaksanakan karena kasus pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial.

**b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 dimana yang sudah memenuhi target sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebanyak 3 kegiatan sedangkan yang belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebanyak 5 kegiatan hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pemeliharaan permohonan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dan Puskesmas menggunakan Dana BTT untuk pemeliharaan kendaraan.
2. Belum adanya perekrutan tenaga teknik sehingga target yang sudah ditetapkan tidak tercapai

**c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 Program kegiatan dimana ke 4 kegiatan sudah mencapai target Kinerja sesuai dengan Program kinerja yang telah ditetapkan.

**d. Program Perencanaan Perangkat Daerah**

Program Perencanaan Perangkat Daerah terdiri dari 2 kegiatan dimana 1 kegiatan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh karena Perjalanan dinas luar daerah tidak bisa di laksanakan karena pelaksanaan Desk anggaran DAK dilaksanakan melalui Zoom Meeting.

**e. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Program pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dimana kegiatan kebiatan tersebut sudah mencapai target Kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

**f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Program Upaya kesehatan masyarakat terdiri dari 48 kegiatan dimana 35 kegiatan sudah sesuai dengan target Kinerja program sedangkan 13 Kegiatan belum mencapai target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan penjangkaran kesehatan tidak berjalan karen situasi covid-19 karena sistem pembelajaran melalui sistem daring.
2. Kegiatan program tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan tdk berjalan sesuai dengan target sudah di tetapkan.

**g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan, di mana ke 2 kegiatan tersebut sudah mencapai target dan sesuai dengan program kinerja yang sudah ditetapkan

**h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Program Pengembangan lingkungan sehat terdiri dari 3 Kegiatan dimana 2 kegiatan sudah sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan sedangkan 1 kegiatan belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini di sebabkan karen situasi covid-19 karena adanya pembatasan sosial masyarakat.

**i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari 14 kegiatan dimana 5 kegiatan belum mencapai

target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adapun penyebab

**j. Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringan**

Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringan terdiri dari 1 kegiatan dimana kegiatan sudah mencapai target program sesuai dengan perjanjian kinerja.

**k. Program Pengadaan Alat Kesehatan**

Program Pengadaan Alat Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan dimana ke 3 kegiatan sudah sesuai dengan target program dan sesuai dengan target kinerja perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

**l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita.**

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita **terdiri** dari 3 kegiatan dimana 2 kegiatan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan 1 kegiatan belum mencapai target hal ini disebabkan karena kasus pandemi covid-19 dimana kegiatan posyandu lansia tidak bisa dilaksanakan secara maksimal .

**m. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak**

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak terdiri dari 4 kegiatan dimana ke 4 kegiatan mencapai target sesuai dengan kinerja program yang sudah ditetapkan.



**n. Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis**

Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis terdiri dari 1 kegiatan dimana kegiatan tersebut sudah mencapai target sesuai dengan kinerja program yang sudah ditetapkan.

**o. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan**

Program Pemeliharaan Alat Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan target ini belum tercapai karena belum adanya pelamar yang berminta sebagai tenaga kalibrasi di Kabupaten Badung.

**B.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.742.234.807,16 dan realisasisebesar Rp 262.449.571.853,25 atau 89,65% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.4

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.4 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah Mangusada)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1. Rumah Sakit Daerah Mangusada	1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	95.41%			1
				1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	85.67%			
				1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	99.04%			
				1.3 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100%	99.83%			
				1.4 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	100%	79.52%			
				2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	3.03%			
				2.1 Pengadaan Perlengkapan Kantor	100%	3.03%			
				3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%			
				3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%			
				4 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU - PARU/RUMAH SAKIT MATA	95%	65.67%	Adanya refocusing pelayanan pasien untuk penanganan pasien Covid-19 yang berakibat terhadap perubahan pengadaan obat-obatan untuk pelayanan pasien non covid	Efisiensi pengadaan obat-obatan untuk pelayanan minimal dan mengajukan anggaran pengadaan bahan medis dan obat-obatan pelayanan pasien Covid-19 ke RKA BTT Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.4

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4.1	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	100%	15%		
				4.2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	82%		
				4.3	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	1 paket	1 paket		
				5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD</b>	100%	96.21%		
				5.1	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	100%	96.21%		

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (Sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.4)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dengan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing kegiatan utk mendukung pelayanan kesehatan penanggulangan Covid-19 dan adanya penundaan operasional gedung baru rumah sakit.

**B.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 229.909.170.246,87 dan realisasi sebesar Rp. 229.171.069.626,31 atau 99,68 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.5

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kesehatan (DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kesehatan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan Infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	9. Program Penataan Bangunan/Gedung 9.65 Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak) 9.66 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung 9.67 Peningkatan Puskesmas Abiansemal I 9.68 Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	4 Pkt 100% 100% 100% 100%	4 Pkt 100% 100% 100% 100%	1. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur terkendala Pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan fisik yang tertunda dan dibatalkan pelaksanaannya untuk menangani pandemi Covid-19.	1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pembangunan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dan pelayanan masyarakat	
			2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan						
			3. Memelihara Infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan						

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.5

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistim dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan						
			5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi						
			6. Mengembangkan infrastruktur teknologi da komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Badung						



- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.5)
- 3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a) Penyediaan Prasarana Kesehatan telah dilaksanakan melalui Program Penataan Bangunan/Gedung berupa kegiatan Pembangunan Gedung D,F dan G RSUD Kabupaten Badung, Peningkatan Puskesmas Abiansemal I

**C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.872.969.111,71 dan realisasi sebesar Rp.165.576.093.258,36 atau 86,29 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.6

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.6 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan Infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	1. <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1.1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.6 Penyediaan Bahan Bacaan 1.7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.8 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.9 Penyediaan Upacara Keagamaan 1.10 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.11 Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.12 Monitoring Aset PUPR Kab. Badung 1.13 Biaya Penunjang Kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	13 Pkt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	13 Pkt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%			
			2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kaswasan perkotaan maupun kawasan pedesaan	2. <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 2.1 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional 2.2 Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 2.4 Pemeliharaan Gedung/ Kantor 2.5 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan 2.6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Pkt 100% 100% 100% 100% 100% 100%	13 Pkt 100% 100% 100% 100% 100% 100%			
			3. Memelihara Infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan						

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%		
			4.Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistim dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan	2.7	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%		
				2.8	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	100%	100%		
				2.9	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	100%	100%		
				2.10	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	100%	100%		
			5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi	2.11	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025;2017	100%	100%		
				2.12	Pengadaan Alat Berat Penunjang Kepariwisataaan	100%	100%		
				2.13	Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor Penunjang Kepariwisataaan	100%	100%		
				3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2 Pkt</b>	<b>2 Pkt</b>		
				3.1	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100%		
				3.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4. Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan</b>	<b>18 Pkt</b>	<b>17 Pkt</b>	<b>1</b> Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur terkendala Pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan fisik yang tertunda dan dibatalkan pelaksanaannya untuk menangani pandemi Covid-19.	<b>1.</b> Telah diupayakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pembangunan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dan pelayanan masyarakat	
			6. Mengembangkan infrastruktur teknologi da komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Badung	4.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pantai Pandawa menuju Pantai Timbis di Kecamatan Kuta Selatan	100%	100%			
				4.2 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Sayan-Ayunan	100%	100%			
				4.3 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Br. Pande-Br. Juwet	100%	100%			
				4.4 Feasibility Studi (FS) Pengembangan Jalan di Kecamatan Kuta Utara	100%	0%			
				4.5 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	100%	100%			
				4.6 Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	100%	100%			
				4.7 Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%			
				4.8 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Penunjang Kepariwisataaan di Kabupaten Badung	100%	100%			
				4.9 Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	100%	100%			
				4.10 Pengawasan Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	100%	100%			
				4.11 Survey Kondisi Jembatan Kabupaten Badung	100%	100%			
				4.12 Koordinasi Survey Musrenbang RKPD	100%	100%			















### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4.13	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	100%	100%		
				4.14	Survey Kondisi Jalan	100%	100%		
				4.15	Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%		
				4.16	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	100%	100%		
				4.17	Kegiatan Peyusunan Dokumen Outline Bussines Case (OBC) dan Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kuta Kabupaten Badung	100%	100%		
				4.18	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pantai Pandawa menuju Pantai Timbis di Kecamatan Kuta Selatan	100%	100%		
				5.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>1 Pkt</b>	<b>1 Pkt</b>		
				5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA)	100%	100%		
				6.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi</b>	100%	100%		
				6.1	Pembinaan Jasa Konstruksi	100%	100%		
				6.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				 <b>7.</b> Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	<b>42 Pkt</b>	<b>42 Pkt</b>			
				 <b>7.1</b> Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	100%	100%			
				 <b>7.2</b> Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	100%	100%			
				 <b>7.3</b> Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza di Kab. Badung	100%	100%			
				 <b>7.4</b> Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	100%	100%			
				 <b>7.5</b> Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	100%	100%			
				 <b>7.6</b> Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	100%	100%			
				 <b>7.7</b> Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	100%	100%			
				 <b>7.8</b> Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi di Kelurahan Sempidi	100%	100%			
				 <b>7.9</b> Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal di Desa Sembung	100%	100%			
				 <b>7.10</b> Jasa Konsultansi Penataan Pebejian Pura Dalem Petingan di Desa Gulingan	100%	100%			
				 <b>7.11</b> Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Munggu Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	100%	100%			
				 <b>7.12</b> Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Let Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	100%	100%			
				 <b>7.13</b> Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Beringkit di Kecamatan Mengwi	100%	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.14	Jasa Konsultansi Penanggulangan Longsor Saluran Pembuang Subak Batan Asem di Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.15	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Dalem di Desa Kekeran	100%	100%		
				7.16	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Mengwi di Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.17	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Aya Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.18	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh di Desa Sembung	100%	100%		
				7.19	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.20	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	100%	100%		
				7.21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sandakan di Kecamatan Petang	100%	100%		
				7.22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tirtamangu di Kecamatan Petang	100%	100%		
				7.23	Biaya Penunjang DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	100%	100%		
				7.24	Penyusunan DED Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	100%	100%		
				7.25	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Abianbase Br. Gede Kelurahan Abianbase	100%	100%		



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.26	Jasa Konsultansi Penataan Saluran Air Melingkar di Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.27	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegan Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.28	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegan Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.29	Penataan Taman Beji Pura Desa Puseh Mengening Desa Adat Mengening Desa Cemagi Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.30	Jasa Konsultansi Penataan Taman Beji Pura Desa Puseh Mengening Desa Adat Mengening Desa Cemagi Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				7.31	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Pembuang di Lingkungan Cemengon Desa Penarungan	100%	100%		
				7.32	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Balawan Desa Abiansema Dauh Yeh Cani	100%	100%		
				7.33	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambal di Desa Mambal	100%	100%		
				7.34	Jasa Konsultansi Pembangunan Penampungan Air (Tower Air) di Subak Tirta Taman Sari Desa Sibanggede	100%	100%		
				7.35	Jasa Konsultansi Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Saluran Irigasi di Banjar Bedauh Desa Carangsari	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.36	Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	100%	100%		
				7.37	Peningkatan Senderan Subak Saih Perumahan Wana Sari Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.38	Jasa Konsultansi Peningkatan Senderan Subak Saih Perumahan Wana Sari Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.39	Peningkatan Senderan Drainase Jalan Beji Pura Selegendang Lingkungan Bebengan Desa Tangeb Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.40	Jasa Konsultansi Peningkatan Senderan Drainase Jalan Beji Pura Selegendang Lingkungan Bebengan Desa Tangeb Kelurahan Abianbase	100%	100%		
				7.41	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Pantai Seminyak, Pantai Legian dan Pantai Kuta di Kecamatan Kuta	100%	100%		
				7.42	Revitalisasi Pariwisata di Tukad Mati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	100%	100%		
				8.	<b>Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi</b>	<b>4 Pkt</b>	<b>3 Pkt</b>		
				8.1	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	100%	100%		
				8.2	Penyusunan Masterplan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8.3	Pengadaan dan Pemasangan Pompa UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	100%	100%		
				8.4	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	100%	0%		
				9.	<b>Program Penataan Bangunan/Gedung</b>	<b>64 Pkt</b>	<b>64 Pkt</b>		
				9.1	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	100%	100%		
				9.2	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	100%	100%		
				9.3	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%		
				9.4	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	100%	100%		
				9.5	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	100%	100%		
				9.6	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	100%	100%		
				9.7	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	100%	100%		
				9.8	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	100%	100%		
				9.9	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	100%	100%		
				9.10	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.11	Penyusunan DED Pembangunan Sarana dan Rehab Ruangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung	100%	100%		
				9.12	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Dalem Kediri Desa Sading	100%	100%		
				9.13	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Gede Batan Ancak Desa Sading	100%	100%		
				9.14	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Prajapati Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	100%	100%		
				9.15	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	100%	100%		
				9.16	Jasa Konsultasi Finishing Bale Banjar Adat Tiyang Tutul Desa Tumbak Bayuh	100%	100%		
				9.17	Jasa Konsultasi Finishing Bale Banjar Adat Kelepekan dan Pembuatan Lapangan Volly Desa Tumbak Bayuh	100%	100%		
				9.18	Jasa Konsultasi Pembangunan Banjar Adat Baler Pasar Desa Darmasaba	100%	100%		
				9.19	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Dalem Lebah Desa Darmasaba	100%	100%		
				9.20	Jasa Konsultasi Pembangunan Banjar Adat Gulingan Desa Darmasaba	100%	100%		
				9.21	Jasa Konsultasi Pembangunan Bale Banjar Umahanyar Desa Anggungan	100%	100%		
				9.22	Jasa Konsultasi Pembangunan Pura Desa Adat Mengwitani	100%	100%		
				9.23	Jasa Konsultasi Pembangunan Bale Banjar Adat Dangin Peken Desa Penarungan	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.24	Jasa Konsultansi Renovasi Balai Banjar Adat Pande Mas Kuta	100%	100%		
				9.25	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pasek Hyang Dukuh Kelurahan Kerobokan Kaja	100%	100%		
				9.26	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pecatu	100%	100%		
				9.27	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Pesanakan dan Bale Kulkul Pura Ratu Gede Beraban Desa Cemagi	100%	100%		
				9.28	Jasa Konsultansi Finishing dan Penataan Bale Banjar Adat Munggu Desa Mengwi	100%	100%		
				9.29	Jasa Konsultansi Pembangunan Kantor Bendesa Adat Pelaga Desa Petang	100%	100%		
				9.30	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Wanasuci Desa Sembung	100%	100%		
				9.31	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Banjar Dajan Peken Desa Sembung	100%	100%		
				9.32	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Tengah Desa Adat Tanjung Benoa	100%	100%		
				9.33	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pasek Kayu Putih Kedonganan	100%	100%		
				9.34	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Gede Desa Adat Blahkiuh	100%	100%		
				9.35	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Desa Adat Perang	100%	100%		
				9.36	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Kelan Desa	100%	100%		
				9.37	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Kelan Abian Desa Kelan	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.38	Penyusunan DED Penyempurnaan Fasilitas dan Utilitas Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	100%	100%		
				9.39	Penyusunan DED Penataan Parkir Timur dan Softscape Balai Budaya Giri Nata Mandala	100%	100%		
				9.40	Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Banjar Pande Lingkungan Pande Kelurahan Benoa	100%	100%		
				9.41	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Serbaguna Sanggar Seni Jagad Dhita Banjar Kedampal Kecamatan Abiansemai	100%	100%		
				9.42	Jasa Konsultansi Penataan Pura Desa, Desa Adat Sekarmukti Kecamatan Petang	100%	100%		
				9.43	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	100%	100%		
				9.44	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Melanting Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	100%	100%		
				9.45	Jasa Konsultansi Penataan Setra Desa Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	100%	100%		
				9.46	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	100%	100%		
				9.47	Jasa Konsultansi Pembangunan Wantilan Banjar Bucu Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemai	100%	100%		
				9.48	Jasa Konsultansi Finishing Bale Banjar Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.49	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Puseh Desa Adat Jempeng Desa Taman Kecamatan Abiansemal	100%	100%		
				9.50	Jasa Konsultansi Rehab Pura Padmasana Wisma Bayu Detasemen Intelijen Kodam IX Udayana	100%	100%		
				9.51	Jasa Konsultansi Penataan Pura Dalem Desa Adat Pangsan Kecamatan Petang	100%	100%		
				9.52	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Sedang Kecamatan Abiansemal	100%	100%		
				9.53	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pande Antap Sari Banjar Benekhawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	100%	100%		
				9.54	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pande Samuantiga Banjar Benekhawan Desa Blahkiuh Desa Abiansemal	100%	100%		
				9.55	Penyusunan DED Penambahan Instalasi Listrik Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	100%	100%		
				9.56	Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Serbaguna Sekaa Templekan Surya Kanthi Banjar Gambang Desa Munggu	100%	100%		
				9.57	Penyusunan DED Pembangunan Pura Taman Beji Br. Pengayehan Desa Cemagi	100%	100%		
				9.58	Pembangunan Pura Taman Beji Br. Pengayehan Desa Cemagi	100%	100%		
				9.59	Pengawasan Pembangunan Pura Taman Beji Br. Pengayehan Desa Cemagi	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.60 Renovasi Bale Kulkul dan Pembuatan Kanopi Banjar Pesanggaran Denpasar	100%	100%			
				9.61 Pengawasan Renovasi Bale Kulkul dan Pembuatan Kanopi Banjar Pesanggaran Denpasar	100%	100%			
				9.62 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Pandawa	100%	100%			
				9.63 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Geger	100%	100%			
				9.64 Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Sangeh	100%	100%			
				<b>10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang</b>	<b>7 Pkt</b>	<b>7 Pkt</b>			
				10.1 Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	100%	100%			
				10.2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	100%	100%			
				10.3 Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	100%	100%			
				10.4 Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Abiansemai	100%	100%			
				10.5 Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	100%	100%			
				10.6 Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Petang	100%	100%			
				10.7 Penataan Taman Pada Areal Lingkungan Abianbase Kecamatan Kuta	100%	100%			



3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (sudah termasuk dalam tabel 3.1.1.6)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a) Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan kondisi jalan Baik di Kabupaten Badung mencapai 83,173 % dan kemantapan jalan mencapai 96,50 % dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 686,324 km.
- b) Pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan jaringan irigasi berkodisi baik sebesar 95,95 % atau sepanjang 224,07 km dari panjang jaringan irigasi di Kabupaten Badung sepanjang 233,51 km
- c) Program Penyehatan Lingkungan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama di wilayah Kuta Selatan dalam penyediaan air bersih telah dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan
- d) Penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Badung telah dilaksanakan melalui penyusunan RDTR dengan tahapan penyempurnaan Raperda RDTR di masing- masing kecamatan yakni Harmonisasi Raperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang
- e) Pembangunan gedung yang dihibahkan kepada instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu :  
Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung  
Untuk peningkatan dan penyiapan infrastruktur sehubungan dengan Pandemi Covid-19 telah diberikan bantuan hibah dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menunjang sektor pariwisata yang

dilaksanakan dalam bentuk penyiapan sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata berupa :

- Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pantai Pandawa menuju Pantai Timbis di Kecamatan Kuta Selatan
- Revitalisasi Pariwisata di Tukad Mati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Pandawa
- Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Pantai Geger
- Pembangunan Toilet pada Objek Wisata Sangeh
- Penataan Taman Pada Areal Lingkungan Abianbase Kecamatan Kuta
- Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Penunjang Kepariwisata di Kabupaten Badung

**D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.435.925.608,91 dan realisasi sebesar Rp.11.388.309.846,00 atau 73,78 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel

3.1.1.7

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.7 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial						
			2. Alokasi anggaran bedah rumah dan peningkatan kualitas menjadi rumah sehat	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	63.70%		
			3. Pengendalian titik-titik permukiman kumuh	1. 1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	20.54%		
			4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	1. 2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	74.39%		
			5. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung PSU yang memadai	1. 3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	18.40%		
				1. 4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%		
				1. 5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%		
				1. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%		
				1. 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-		
				1. 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-		
				1. 9	Penyediaan Dekorasi	100%	100%		
				1. 10	Penyediaan Upacara Keagamaan	100%	100%		
				1. 11	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	100%	100%		
				1. 12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	100%		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. 13 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	100%	58.19%			
				1. 14 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	33 Keg.	-			
				1. 15 Penyediaan Jasa Komunikasi	100%	100%			
				1. 16 Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	-	-			
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	49.10%			
				2. 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	-			
				2. 2 Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%			
				2. 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%			
				2. 4 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	100%			
				2. 5 Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	30.72%			
				2. 6 Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	100%	-			
				2. 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	-			
				2. 8 Survey Hasil Musrenbang RKPD	100%	100%			
				2. 9 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	79 laporan verifikasi	79 laporan verifikasi			
				2. 10 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang / Jasa	62 laporan verifikasi	-			
				3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%			
				3. 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. 2 Penyusunan AKIP (Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	100%	100%			
				4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	100%	100%			
				5. Program peningkatan sistem pengawasan internal	100%	0%			
				1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	33 laporan monitoring	-			
				6 Program Lingkungan Sehat Perumahan	88.52	71.66			
				6. 1 Peningkatan Jalan Desa di Desa Sulangai Kecamatan Petang	1 desa	1 desa			
				6. 2 Peningkatan Jalan Desa di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal	1 desa	-			
				6. 3 Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	1 desa	-			
				6. 4 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	1 desa	1 desa			
				6. 5 Peningkatan Jalan Desa di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi	1 desa	-			
				6. 6 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi	1 desa	-			
				6. 7 Peningkatan Jalan Desa di Desa Sembung Kecamatan Mengwi	1 desa	-			
				6. 8 Peningkatan Jalan Desa di Desa Baha Kecamatan Mengwi	1 desa	-			
				6. 9 Peningkatan Jalan Desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara	1 desa	1 desa			
				6. 10 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara	1 kel.	1 kel.			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. 11 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta	1 kel.	-			
				6. 12 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta	1 kel.	1 kel.			
				6. 13 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	1 kel.	1 kel.			
				6. 14 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	1 kel.	-			
				6. 15 Peningkatan Jalan Desa di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan	1 desa	1 desa			
				6. 16 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	1 kel.	1 kel.			
				6. 17 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan	1 kel.	1 kel.			
				6. 18 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	1 kel.	-			
				6. 19 Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	1 desa	1 desa			
				6. 20 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta	1 kel.	1 kel.			
				6. 21 Peningkatan Jalan Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	1 desa	1 desa			
				6. 22 Peningkatan Jalan Desa di Desa Abiansemai Kecamatan Abiansemai	1 desa	1 desa			
				6. 23 Peningkatan Jalan Desa di Desa Abiansemai Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemai	1 desa	1 desa			
				6. 24 Peningkatan Jalan Desa di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemai	1 desa	1 desa			
				6. 25 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	1 kel.	1 kel.			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. 26 Peningkatan Jalan Desa di Desa Carangsari Kecamatan Petang	1 desa	1 desa			
				6. 27 Peningkatan Jalan Desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara	1 desa	1 desa			
				6. 28 Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Gang di Banjar Pengabetan (Benesari dan Komala Sari)	1 desa	-			
				7. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	100%	0%			
				7. 1 Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni akibat bencana	11 survey lapangan	-			
				8. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	67.21%			
				8. 1 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	6 BAST	6 BAST			
				8. 2 Pengawasan Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang di Kabupaten Badung	60 Perumahan	60 Perumahan			
				8. 3 Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	6 survey kondisi fisik	6 survey kondisi fisik			
				8. 4 Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	500 survey KK	500 survey KK			
				8. 5 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	2 sosialisasi dan lokakarya	2 sosialisasi dan lokakarya			
				8. 6 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	19 survey perumahan	19 survey perumahan			
				8. 7 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Petang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8. 8 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				8. 9 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Mengwi	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				8. 10 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				8. 11 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				8. 12 Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	-			
				8. 13 Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung	7 penyiapan dokumen	7 penyiapan dokumen			
				9. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%			
				9. 1 Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang	10 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 2 Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemal	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 3 Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring I di Kecamatan Abiansemal	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.7

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9. 4 Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Giri Land Pratama Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 5 Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 6 Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Grahalia Sari Gading Buduk di Kecamatan Mengwi	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 7 Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			
				9. 8 Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang	30 lbr. Penyiapan dok. Lelang			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.7)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada tahun 2020 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi fisik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 63,37 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan tidak mencapai target. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana antara lain : Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura – Pura Kahyangan Jagat. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya penanganan terhadap pandemik covid 19 yang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam penerapan physical distancing/ pembatasan kontak dekat. Pagu anggaran untuk kegiatan - kegiatan tersebut ditiadakan untuk penanganan pandemik covid 19 dan akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan situasi yang ada. Kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan; Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung. Kegiatan – kegiatan tersebut

tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi fisik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 49,10 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Peralatan Kantor; Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan pelaksanaannya akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan memperhatikan situasi yang ada seperti penanganan jalan lingkungan yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa yang menurut ketentuan Permendagri nomor 90 tahun 2019 penanganannya untuk tahun 2021 berada pada Dinas PUPR Kabupaten Badung.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah sesuai dengan target fisik yang ditetapkan dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai dengan target fisik yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2020 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal tidak mencapai target fisik yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2020 dikarenakan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung tidak terlaksana yang disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemik covid 19. Kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan memperhatikan situasi yang ada.

f. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pada Program Lingkungan Sehat Perumahan pelaksanaan kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemik covid 19. Realisasi Program sebesar 71,66 % dari target yang ditetapkan sebesar 88,52 %. Penyesuaian Kegiatan dilaksanakan melalui pelaksanaan subkegiatan belanja jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan sejumlah 17 dokumen perencanaan (DED).

g. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Pada Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial kegiatan fisik berupa Kegiatan Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana tidak dapat dilaksanakan dari yang ditargetkan sebesar 100% dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemik covid 19. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan memperhatikan situasi yang ada.

h. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman pelaksanaannya mencapai realisasi fisik sebesar 67,21 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Adapun kegiatan – kegiatan yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain :

Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung yakni pada tahap pendataan bangunan rusak di Kabupaten Badung terhambat pelaksanaan di lapangan akibat pandemik covid 19 namun sudah sebagai dasar uji sampling gambaran awal. Pelaksanaan pendataan tetap di rencanakan pada tahun anggaran berikutnya apabila situasi pandemik sudah selesai. Selain itu, Verifikasi juga melakukan sinkronisasi kembali usulan yang sudah terverifikasi namun belum terealisasi, yang sebelumnya pada akhir Desember 2019 sudah dilakukan evaluasi dengan hasil 798 KK. Dari hasil sinkronisasi dan validasi tahun 2020 bersama pihak Desa/ Kelurahan diperoleh hasil sejumlah 812 KK. Hasil 812 KK tersebut menjadi data terkini usulan calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) yang pada tahun 2020 sudah dilakukan survey verifikasi sebanyak 500 KK.

Kegiatan Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman; Kegiatan Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung terjadi penyesuaian kegiatan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan dalam penanganan pandemik covid 19 dilaksanakan sampai pada tahap penyiapan dokumen.

Kegiatan Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Badung; Kegiatan Pengawasan Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang di Kabupaten Badung; Kegiatan Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di kabupaten Badung; Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di kabupaten Badung; Kegiatan Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung, keseluruhan kegiatan tersebut telah mencapai target yang ada pada tahun 2020.

- i. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah sesuai dengan target fisik yang dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan dalam penanganan pandemik covid 19 sampai pada tahap penyiapan dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

**E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**E.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.349.381.429,82 dan realisasi sebesar Rp 39.661.268.652 atau 93.65 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel

3.1.1.8



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.8 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Satuan Polisi Pamong Praja )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja	1 Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada 2 Penegakan Hukum 3 Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 1.3 Penyediaan administrasi keuangan 1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.8 Penyediaan makanan dan minuman 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 Penyediaan bahan bakar kendaraan 1.11 Penyediaan Upacara Keagamaan 1.12 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.13 Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja <b>1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1.1 Pengadaan peralatan kantor	<b>100</b>  12 Bulan  44 Unit Materai, 12 Buku 38 Jenis 18 Jenis 1 Paket 7 Jenis 1000 Orang 10 kali 29.328 liter 12 jenis 2 orang 2 orang <b>100</b> 2 jenis	<b>100</b>  12 Bulan  44 Unit Materai, 12 Buku 38 Jenis 18 Jenis 1 Paket 7 Jenis 1000 Orang 10 kali 29.328 liter 12 jenis 2 orang 2 orang <b>100.00</b> 2 jenis			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1 .8

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>			
				1.1 Pengadaan peralatan kantor	2 jenis	2 jenis			
				1.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44 unit	44 unit			
				1.3 Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket			
				1.4 Pemeliharaan peralatan kantor	13 jenis	13 jenis			
				<b>1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
				1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya					
				<b>1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>98.16</b>			
				1.1 Pelatihan Kesamaptaaan	120 orang	120 orang			
				1.2 Monitoring dan Evaluasi Sat.Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung					
				<b>1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>87.83</b>			
				1.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				1.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	4 dokumen			
				1.1 Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)					

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1 .8

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>1 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>96,59</b>			
				1.1 Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	12 laporan	12 laporan			
				<b>1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>100</b>	<b>74,82</b>			
				1.1 Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPAMANPADU)	384 kali	384 kali			
				<b>1. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>100</b>	<b>93,30</b>			
				1.1 Penegakan PERDA dan PERKADA	120 pelanggar	120 pelanggar			
				1.2 Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	900 orang	900 orang			
				1.3 Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	1200 pelanggar	1200 pelanggar			
				1.4 Patroli keamanan dan ketertiban umum	2842 pelanggar	2842 pelanggar			
				1.5 Pengamanan Berbagai Acara/Event	130 kali	130 kali			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1 .8

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	100.00			
				1.1 Pemberdayaan Masyarakat tentang potensi Gangguan Keyenteraman dan Ketertiban Umum	62 desa/kel	62 desa/kel			
				1.2 Pemantauan Pengamanan Pilkada dan Pilkel 2020	62 desa/kel	62 desa/kel			
				1.3 Penerapan Disiplin oleh Satlinmas Dalam Penerapan Prokes Covid -19 di Kabupaten Badung	62 desa/kel	62 desa/kel			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.8)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan, baik Program Rutin maupun Program Prioritas.

**E.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.090.597.339,62 dan realisasi sebesar Rp 1.968.771.274,00 atau 94,17 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.9

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.9 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wajib Pelayanan Dasar	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Misi 1 / Memperkokoh Rasa Kebangsaan Serta Adanya Hubungan Yang Harmonis Dalam Masyarakat	<b>1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>1.1</b> Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan <b>1.2</b> Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional <b>1.3</b> Kegiatan : Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan <b>1.4</b> Kegiatan : Penyediaan Upacara Keagamaan <b>1.5</b> Kegiatan : Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan <b>1.6</b> Kegiatan : Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan <b>1.7</b> Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor <b>1.8</b> Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <b>1.9</b> Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>100%</b>  12 bulan 2 line 8 mobil 8 motor 9.696 liter 1 paket 0 paket 400 materai 6 buku cek 37 jenis 24 jenis 1 paket	<b>100%</b>  12 bulan 2 line 8 mobil 8 motor 9.696 liter 1 paket 0 paket 400 materai 6 buku cek 37 jenis 24 jenis 1 paket			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.10 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 paket	0 paket			
				1.11 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	492 exp	492 exp			
				1.12 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	177 tamu	177 tamu			
				1.13 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	15 kali	15 kali			
				1.14 Kegiatan : Penyediaan Dekorasi	1 paket	1 paket			
				<b>2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				2.1 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	0 unit			
				2.2 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket			
				2.3 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kantor	1 unit	1 unit			
				2.4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	8 mobil 8 motor	8 mobil 8 motor			
				2.5 Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0 paket	0 paket			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.6 Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Kantor	18 unit	18 unit			
				3. Program : Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%			
				3.1 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat	18 laporan	18 laporan			
				3.2 Kegiatan : Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 laporan	4 laporan			
				4. Program : Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%			
				4.1 Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	3 dokumen	3 dokumen			
				5. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%			
				5.1 Kegiatan : Tim Terpadu Penanganan Konflik	12 bulan	12 bulan			
				5.2 Kegiatan : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	100%	100%			
				5.3 Kegiatan : Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Badung	5 laporan	5 laporan			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.4 Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Badung	1 paket	1 paket			
				6. Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100%	100%			
				6.1 Kegiatan : Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten	1200 orang	1200 orang			
				7. Program : Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%			
				7.1 Kegiatan : Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan	5 parpol	5 parpol			
				7.2 Kegiatan : Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	0 orang	0 orang			
				7.3 Kegiatan : Pemantauan Pemilukada 2020	6 kecamatan	6 kecamatan			
				7.4 Kegiatan : Temu Komunikasi Study Tiru	0 parpol	0 parpol			
				7.5 Kegiatan : Temu Komunikasi Ormas di Kabupaten Badung	0 parpol	0 parpol			
				7.6 Kegiatan : Validasi Ormas di Kabupaten	58 ormas	58 ormas			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8. Program : Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%			
				8.1 Kegiatan : Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela	0 orang	0 orang			
				8.2 Kegiatan : Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	272 orang	272 orang			
				8.3 Kegiatan : Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	0 orang	0 orang			
				8.4 Kegiatan : Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	0 orang	0 orang			
				8.5 Kegiatan : Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	0 orang	0 orang			
				8.6 Kegiatan : Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) kabupaten Badung Musim Haji	0 orang	0 orang			
				8.7 Kegiatan : Bulan Bung Karno di Kabupaten Badung	0 orang	0 orang			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.9)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disinkronisasi, ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi Pagu Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target kinerja, program dan kegiatan, baik program rutin maupun program prioritas.

Dengan adanya Rasionalisasi Kegiatan Pagu Anggaran, untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan dengan penggunaan pagu anggaran seefektif mungkin dan mengutamakan kepada hal-hal yang memang membutuhkan penanganan yang prioritas, sehingga operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan lancar sehingga target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terealisasi .

**E.3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.533.112.977,55 dan realisasi sebesar Rp. 10.642.643.121 atau 73.23% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.10

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.10 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mendorong dan Menumbuhkan Budaya Sadar Bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 11. Penyediaan Upacara Keagamaan 12. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 13. Pengelolaan Kebersihan Kantor	<b>100%</b>  4 line  30 kendaraan  350 lembar 38 Jenis 49 jenis 4 jenis 18 jenis 516 exp 8 kali 26749 liter 13 jenis 1 orang 1 unit	<b>96,2%</b>  4 line  22 kendaraan  350 lembar 38 Jenis 49 jenis 4 jenis 18 jenis 516 exp 8 kali 21500 liter 13 jenis 1 orang 1 unit	Terjadi refocusing karena adanya pandemi Covid-19	Fokus pada kebutuhan penanganan Covid-19 dan penanganan kedaruratan	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.10

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	6 Org	6 Org			
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>			
			Penanganan Pasca Bencana yang Konprehensif	Kegiatan :					
				1. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	16 Unit	16 Unit			
				2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 unit	2 unit			
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30 Kendaraan	30 Kendaraan			
				4. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4 jenis	1 jenis			
				5. Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 jenis	2 jenis			
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan:					
				1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan			
				2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5 dokumen	5 dokumen			
				<b>Program Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan :					
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	4 dokumen	4 dokumen			
				<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<b>100%</b>	<b>66%</b>			
				Kegiatan:					
				1 Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung	1 dokumen	0			
				2 Bimtek pengurangan Resiko Bencana Covid-19	150 org	150 org			
				3 Bimbingan teknis pencegahan dan pengurangan resiko bencana waba Covid-19	300 org	300 org			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.10

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>68,7%</b>			
				Kegiatan :					
				1 Siaga penanggulangan bencana dan kesemaptaan	62 org	62 org			
				2 Penanganan bencana di Kab.Badung dan lintas Kabupaten	3 jenis	2 jenis			
				3 Pengadaan sarana kebencanaan	13 jenis	0			
				4 Desinfeksi di Destinasi wisata di Kabupaten Badung	6 destinasi	6 destinasi			
				<b>Program Pemulihan Pasca Bencana</b>	<b>90%</b>	<b>54,6%</b>			
				Kegiatan :					
				1 Verifikasi kejadian bencana	33 RAB	15 RAB			
				2 Rehabilitasi pasca bencana	13 unit	7 unit			
				3 Rekonstruksi pasca bencana	3 unit	2 unit			



- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.10)
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tahun 2020, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya suatu program tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan pendapatan daerah dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana tahun 2020 melaksanakan 7 (tujuh) program dengan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 14 kegiatan. Indikator kinerjanya adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100% terealisasi 96,2 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum pelayanan administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal, sehingga dukungan terhadap penyelenggaraan tugas pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang didukung 5 kegiatan dengan indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur. Target kinerja 100% terealisasi 85 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia dan siap pakai tahun 2020 memadai sehingga biaya pemeliharaan bisa

diminimalkan serta pelayanan penanggulangan bencana tetap dapat terlaksana dengan baik.

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang didukung oleh 2 kegiatan dan Program Perencanaan dan Penganggaran yang didukung oleh 1 Kegiatan capaian Kinerja 100% sesuai dengan target kinerja.
- d. Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang didukung 3 kegiatan dengan indikator kinerja persentase layanan pengurangan resiko bencana. Target kinerja 100% terealisasi 66 %. Kegiatan yang tidak terealisasi adalah Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung. Tidak terealisasinya kegiatan ini karena adanya reforcussing.
- e. Program Penanganan Darurat Bencana yang didukung 4 kegiatan dengan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang dapat ditangani. Target kinerja 100% terealisasi sesuai target, namun ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan sarana kebencanaan dengan target 13 jenis, terealisasi 0. Hal ini karena adanya reforcussing tetapi tidak mempengaruhi tingkat capaian kinerja karena kebutuhan sarana sebagai pendukung kegiatan tanggap darurat dipenuhi dengan menggunakan stok yang ada, bantuan dari instansi terkait dan dari masyarakat.
- f. Program Pemulihan Pasca Bencana yang didukung 3 kegiatan dengan indikator kinerja Persentase kerusakan/kerugian sarpras yang tertangani. Pemulihan Pasca Bencana dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Disamping itu juga untuk mencegah terjadinya resiko dampak bencana yang lebih besar, sehingga perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Capaian kinerja pemulihan kerusakan/kerugian sarpras terdampak bencana yang tertangani dengan target 90% terealisasi hanya 54,6%, sehingga masih terdapat dampak bencana yang belum tertangani

pemulihannya pada tahun 2020 dan tahun 2021 sudah dianggarkan biaya pemulihannya.

**E.4. DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.910.344.361,96 dan realisasi sebesar Rp.37.097.602.854 atau 92,95 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel dibawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.11

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.11 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebakaran dan Penyelamatan	1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung	Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /Operasional 1.3 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 1.4 Pengelola Kebersihan Kantor 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>100%</b>  10 Lokasi 58 Unit 1.612 Lembar 10 Lokasi 45 Jenis 12.999 Lembar 10 Lokasi 9 Jenis	<b>90.71%</b>  10 Lokasi 58 Unit 807 Lembar 10 Lokasi 44 Jenis 6.000 Lembar 10 Lokasi 9 Jenis			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	708 Paket	708 Paket		
				1.10	Penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	1 Paket		
				1.11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1 Paket	1 Paket		
				1.12	Penyediaan Dekorasi	1 Paket	0 Paket		
				1.13	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	37.200 Liter	16.848 Liter		
				1.14	Penyediaan Upacara Keagamaan	10 Lokasi	10 Lokasi		
				1.15	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	1 Orang		
				1.16	Pelaksanaan Upacara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	207 Orang	0 Orang		
				1.17	Peringatan HUT Damkar	1 Paket	1 Paket		
				<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>66.38%</b>		
				2.1	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	2.880 Stel	1.440 Stel		
				2.2	Pemeliharaan gedung kantor	10 Lokasi	10 Lokasi		
				2.3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31 Unit	31 Unit		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.4 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis			
				2.5 Pemeliharaan Peralatan Kantor	50 Kegiatan	50 Kegiatan			
				<b>3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>97.53%</b>			
				3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen			
				3.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				<b>4 Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>96.27%</b>			
				4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renstra, Renja, RKA )	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>90.65%</b>			
				5.1 Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	122 Lokasi	96 Lokasi			
				5.2 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	416 Kejadian	416 Kejadian			
				5.3 Sewa dan pemeliharaan repiter	1 Paket	1 Paket			
				5.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran beserta kelengkapannya	7 Jenis	7 Jenis			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.5	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	140 Objek	80 Objek		
				5.6	Pemeliharaan jaringan air/hydrant	157 Hydrant	78 Hydrant		
				5.7	Peningkatan pelayanan dan penyelamatan bahaya kebakaran	444 Kejadian	222 Kejadian		
				5.8	Pemeliharaan alat-alat komunikasi	3 Jenis	3 Jenis		
				5.9	Monitoring pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	11 Lokasi	11 Lokasi		
				5.10	Pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	17 Jenis	14 Jenis		
				5.11	Pendataan dan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran	160 Objek	30 Objek		
				5.12	Bimbingan teknis fire safety dalam CHSE (cleanlines, hyginie, safety, enviroment)	100%	100%		



3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.11)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dinas Kebakaran dan Penyalamatan Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Tahun 2020 melaksanakan 5 (lima) program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 15 kegiatan, dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100% terealisasi 90,71 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum pelayanan administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang didukung 5 kegiatan dengan indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur. Target kinerja 100% terealisasi 66,38 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum Program Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 belum berjalan maksimal karena adanya refocusing kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target pencapaian program.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung oleh 2 kegiatan, dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,

dengan target 100% terealisasi 97,53 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

- d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah didukung oleh 1 kegiatan, dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD , dengan target 100% terealisasi 96,27 %. Capaian tersebut menunjukkan secara umum Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran didukung oleh 11 kegiatan, dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase tercapainya response time/waktu tanggap 15 menit , dengan target 100% terealisasi 90,65 %. Meskipun adanya beberapa kegiatan yang mengalami refocusing pagu anggaran namun dalam pelaksanaannya capaian Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran tetap dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

**F. URUSAN SOSIAL**

**DINAS SOSIAL**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.624.443.849,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.353.800.661,00 atau 83,33% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.12

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.12 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Sosial)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SOSIAL	1. Dinas Sosial	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
			2 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	Kegiatan :					
			3 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
			4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	6 Unit			
				1.3 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.4 Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	9 Bulan			
				1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	9 Bulan			
				1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	324 Eksemplar	324 Eksemplar			
				1.9 Penyediaan Makanan dan	12 Bulan	6 Bulan			
				1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Paket	1 Paket			
				1.11 Penyediaan Bahan Dekorasi	12 Bulan	3 Bulan			
				1.12 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	23400 Liter	18743 Liter			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.13 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
				2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%			
				Kegiatan :					
				2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket			
				2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit Kendaraan	21 Unit Kendaraan			
				2.3 Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor	12 Bulan	6 Bulan			
				2.4 Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	1 Paket	1 Paket			
				3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%			
				Kegiatan:					
				3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisat Realisasi Kinerja PD	12 Bulan	12 Bulan			
				3.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	25 Buku	25 Buku			
				4 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	100%	100%			
				Kegiatan :					
				4.1 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	80 Buku	80 Buku			
				5 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%	100%			
				Kegiatan :					
				5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	3 Dokumen	3 Dokumen			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang PMKS Lainnya	100%	-	1 Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	
				Kegiatan :			2 Belum optimalnya sinergi antar stakeholder dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.	2 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	
				6.1 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	250 RTS	-			
				7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	1 Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.	1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	
				Kegiatan :			2 Adanya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.	2 Kebijakan memberikan Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net ).menyiapkan pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk Bantuan sosial Sembako kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19.	
				7.1 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	150 Orang	150 Orang			
				7.2 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	8 Karang Lansia	8 Karang Lansia			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.3 Pelayanan Dapur Umum Bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	50 Orang	0 Orang			
				7.4 Verifikasi bantuan sosial bagi penunggu pasien di Kab. Badung	6000 Orang	814 Orang			
				7.5 Rehabilitasi dan pembinaan Penyandang disabilitas di Kab. Badung	100 Orang	100 Orang			
				7.6 Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	300 Orang	51 Orang			
				7.7 Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kabupaten Badung	250 RTS	-			
				7.8 Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia	20.000 Orang	0 Orang			
				7.9 Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantaun Sosial Non Tunai (BPNT)	6.873 KPM	9.391 KPM			
				8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan :	100%	100%			
				8.1 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	1 Paket	0 Paket			
				8.2 Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket			
				8.3 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	200 Orang	200 Orang			
				8.4 Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	145 Orang	100 Orang			
				8.5 Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar	1 Hari Besar			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.12

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8.6 Peningkatan Peran PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	0 Organisasi			
				8.7 Pengawasan Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Pnti di Kabupaten Badung	20 LKS/Yayasan/Panti	20 LKS/Yayasan/Panti			
				8.8 Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung	1 Organisasi	1 Organisasi			
				8.9 Pelatihan Karang Taruna se-Kabupaten Badung	620 Orang	620 Orang			



3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.12

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan, kinerja/perjanjian, kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang diinginkan berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya suatu program tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan pendapatan daerah dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang menjadi pandemi di tahun 2020. Dari tabel 3.1 dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, dimana permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang PMKS Lainnya yang didukung oleh Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat dengan target kegiatan 250 RTS. Namun di tahun 2020 bantuan peningkatan kualitas rumah sehat ( rehab rumah ) bagi

250 RTS tersebut tidak dapat direalisasi atau bantuan tidak diberikan karena adanya penurunan pendapatan daerah serta adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Meskipun bantuan tidak diberikan, Dinas Sosial tetap melakukan verifikasi dan validasi data pemohon bantuan, sehingga tetap diperoleh data RTS yang akan dibantu pada saat kondisi keuangan sudah lebih baik. Jadi untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang PMKS Lainnya dengan target 100 % , realisasinya 0 %.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan target 100 %, pelaksanaan program ini di dukung dengan 9 (sembilan ) kegiatan, dimana pada tabel 3.1 dapat dilihat ada 2 kegiatan yang realisasinya 0 dan ada 1 kegiatan yang realisasinya sangat rendah. Kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Kegiatan Pelayanan Dapur Umum Bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung dengan target 50 orang, realisasi 0. Hal ini dikarenakan kegiatan ini akan dijalankan kalau ada bencana, dan tetap harus dianggarkan karena merupakan salah satu dari indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).
  - b. Kegiatan Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kabupaten Badung dengan target 250 RTS, realisasi 0. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan daerah dan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga bantuan UEP untuk 250 RTS tidak dapat dilaksanakan. Namun proses verifikasi dan validasi data pemohon bantuan tetap dilaksanakan.
  - c. Kegiatan Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia di Kabupaten Badung dengan target 20.000 orang, realisasi 0. Seperti penjelasan sebelumnya realisasi 0 karena penurunan pendapatan daerah dan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

- d. Kegiatan Verifikasi bantuan sosial bagi penunggu pasien di Kab. Badung target 6.000 orang, realisasi 814 orang ( 13,57 %). Rendahnya realisasi dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga sebagian besar orang menghindari untuk opname di rumah sakit, dan ketatnya protokol kesehatan untuk penunggu pasien. Selain itu, untuk kegiatan ini, semakin rendah realisasi target merupakan hal yang baik, artinya semakin sedikit orang sakit, dan dapat diindikasikan juga semakin mampu suatu masyarakat.
  - e. Kegiatan Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal dengan terget 300 orang, realisasi 51 orang ( 17 % ). Rendahnya realisasi dikarenakan adanya pengamanan semakin ketat terkait covid-19 sehingga para tunas sosial tidak banyak yang tersidak. Kegiatan ini sifatnya berbanding terbalik dengan target, artinya semakin sedikit realisasi semakin baik, semakin sedikit ada tuna sosial, semakin sejahtera suatu wilayah atau daerah.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan target 100 % ,pelaksanaan program ini di dukung dengan 9 (sembilan ) kegiatan, dimana pada tabel 3.1 dapat dilihat ada 2 kegiatan yang realisasinya 0 karena tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mana diharuskan mengurangi aktivitas keluar rumah dan berkerumun. Kegiatan tersebut yaitu :
- a. Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai
  - b. Peningkatan Peran PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung
- selain itu ada 2 kegiatan yang realisasinya rendah yaitu :
- a. Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung dengan target 145 orang, realisasi 100 orang,

dikarenakan acara peringatan HDI disederhanakan mengingat masa pandemi Covid-19.

- b. Peringatan Hari Besar Nasional dengan target 4 hari besar, realisasi 1 hari besar, hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 hanya peringatan HUT RI saja yang dilaksanakan, dengan memberlakukan pembatasan peserta serta protokol kesehatan yang ketat.

**A. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**1. URUSAN TENAGA KERJA**

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.305.361.788,88 dan realisasi sebesar Rp 3.978.568.072,00 atau 92,41%, melaksanakan program dan kegiatan sesuai tabel di bawah ini.

- 3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.13

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.13 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ( Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	1. <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b> 1.1 Sertifikasi dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor 1.2 Uji kompetensi kepada karyawan di sektor pariwisata	100%	40,51%	1. Belum maksimalnya penuntasan pengangguran. Kabupaten Badung merupakan tujuan urban (pencaker /pencari kerja) yang tinggi tanpa dukungan skill yang memadai	1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun luar negeri	-
			Pelaksanaan Akreditasi terhadap LPK yang ada di Kab. Badung	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Verifikasi Perijinan LPK	6 LPK	6 LPK	2 Minimnya jumlah LPKS yang terakreditasi	2 Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK	
			Meningkatkan jumlah dan kualitas asesor	-					
			Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Tripartit	1. <b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b> 1.1 Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	58%	69,86%	1. Belum semua Perusahaan menerapkan sistem pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.	1. Meningkatkan pembinaan kepada manajemen dan serikat pekerja akan manfaat struktur dan skala	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.13

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.2 Penyusunan UMK	100%	100%	3. Minimnya jumlah Lembaga Pelatihan	3. Melakukan pem-binaan dan	
				1.3 Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	30 pershn	30 pershn	Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi	sosialisasi terkait dengan	
				2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			4. Dinas wajib mener-bitkan rekomendasi ijin LPKS	8 standar mutu LPK	
				2.1 Pembinaan dan Monitoring TKWNAP	200 prshn	200 prshn		4. Melakukan verifikasi admi-nistrasi dan	
			Mengintesifkan pelatihan pencaker dan naker	-				visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran	
			Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	-			5. Perusahaan belum semua menerapkan sistem pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.	5. Meningkatkan pembinaan kpd manajemn dan serikat pekerja akan manfaat struktur dan akala upah agar menjadi	
			Mengintensifkan pelatihan kewira-usahaan	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100%	0%		kebutuhan perusah-an dan meningkatkan pembinaan kepada manajemen tentang	
				1.1 Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	0	0		ketentuan pelaksa-naan upah secara berkesinambungan	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.13

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Membuka akses kerjasama dengan negara - negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1 Kerja sama antar negara dalam rangka penyaluran calon tenaga kerja/tenaga kerja Kabupaten Badung	6 orang	6 orang	6. Perusahaan yang memiliki pekerja diatas 10 orang belum semua memiliki peraturan perusahaan 7. Masih banyak Perusahaan belum memahami perundang - undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dan masih banyak pekerja belum mentaati atau memakai alat pelindung diri dlm melaksanakan pekerjaan	6. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya 7. Memberikan pembinaan secara terus menerus baik kepada perusahaan maupun pekerja, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
			Mendukung revitalisasi fungsi BLK sesuai dg potensi daerah masing-masing	-			8. masih adanya perusahaan yang belum memahami dengan baik program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	8. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	



- 3.1.1. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.13)
- 3.1.2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tahun 2020 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut :
  - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dari target penetapan kinerja sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 40,51. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target seperti kegiatan Pelayanan Informasi Pasar Kerja, kegiatan Sertifikasi dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, dan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNAP). Kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.
  - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dari target 100%, tidak terealisasi sehingga capaian kinerja menjadi 0%. Tidak terealisasinya program ini akibat dari kegiatan pendukung program tersebut terkena rasionalisasi anggaran terkait dengan refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 dan akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.

- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dari target 58%, terealisasi 69,86%. Tercapainya kinerja program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan kegiatan Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menangani 73 kasus dari 118 kasus yang masuk dan menghasilkan kesepakatan dengan perjanjian bersama sebanyak 51 kasus.

**B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 666.114.242,29 dan realisasi sebesar Rp. 572.975.100 atau 86,02% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.14

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.14 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak))

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Perempuan.	1. Dinas P2KBP3A	Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan	<p>1. <b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b></p> <p>1.1 Penyusunan Statistik Analisis Anak Di Kabupaten Badung</p> <p>1.2 Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung</p> <p>1.3 Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung</p> <p>1.4 Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung</p> <p>1.5 Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak</p>	<p>100%</p> <p>100 buku</p> <p>620 desa/kel</p> <p>500 org</p> <p>12 bln</p> <p>1 pkt</p>	<p>100%</p> <p>0 (rasionalisasi)</p> <p>0 (covid)</p> <p>297 Org (covid)</p> <p>12 bln</p> <p>1 pkt</p>	<p>1. Masih tingginya angka KDRT terhadap perempuan dalam rumah tangga,</p> <p>2 Masih tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dan kasus kenakalan remaja.</p> <p>3 Tidak terlaksananya penilaian Kabupaten Layak Anak karena adanya situasi Pandemi Covid 19.</p>	<p>1. Mengoptimalkan layanan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam upaya pencegahan korban kekerasan perempuan dan anak</p> <p>2 Meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Pembentukan Satgas PPA dan PATBM di masing - masing desa/kelurahan.</p> <p>3 Melakukan kegiatan persiapan Evaluasi Penilaian Kabupaten Layak untuk tahun 2021 secara online.</p>	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)	100%	100%			
				2.1 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	62 org	0 (rasionalisasi)			
				2.1 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.14)
- 3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang terdiri dari 5 Kegiatan, program belum bisa tercapai sesuai target disebabkan 2 kegiatan sudah mencapai target dan 3 kegiatan belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyusunan Statistik Analisis Anak Kabupaten Badung Target sebesar 100 Buku terealisasi 0 disebabkan karena adanya refocusing untuk penanganan pandemic Covid19.
  2. Pembinaan dan Evaluasi Desa / Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung dari target 62 Desa/ Kelurahan terealisasi 0 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid19.
  3. Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung dari target sebesar 500 orang terealisasi 297 orang disebabkan karena pada waktu penginputan RKA perubahan pada SIMDA tidak melakukan perbaikan jumlah sasaran.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) terdiri dari 2 Kegiatan, program belum bisa tercapai sesuai target disebabkan 1 kegiatan sudah mencapai target dan 1 kegiatan belum mencapai target yaitu sebagai berikut :
1. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dari target sebesar 62 orang terealisasi 0 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19.

**C. URUSAN PANGAN**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 584.668.739,- dan realisasi sebesar Rp 566.219.250,- atau 96,84% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.15

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel . 3.1.1.15 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan)

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar BIDANG URUSAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)					
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUDP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS)	2.969 Ha	2.969 Ha			
					240 Ekor	240 Ekor			
				Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam	1 paket	1 paket			



3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.15)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- Sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS)
  - Keterlambatan pembayaran karena adanya prioritas anggaran tetapi hal ini tetap dapat dilaksanakan karena petugas tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap menyiapkan dokumen yang diperlukan

**D. URUSAN PERTANAHAN**

**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAH)**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 638.769.323,46 dan realisasi sebesar Rp. 555.584.600,00 atau 86.98% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.16

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel . 3.1.1.16 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan (Bagian Pemerintahan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertanahan	1. Bagian Pemerintahan		<div> <div>1.</div> <div>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</div> </div>	100%	100%			
				<div> <div>1.1</div> <div>Penataan Tanah Masuarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</div> </div>	20 kegiatan	43 kegiatan			
				<div> <div>1.2</div> <div>Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong</div> </div>	4 kegiatan	4 kegiatan			
				<div> <div>2</div> <div>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</div> </div>	100%	100%			
				<div> <div>2.1</div> <div>Fasilitasi Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan</div> </div>	5 Kasus	5 Kasus			
				<div> <div>2.1</div> <div>Fasilitasi Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan</div> </div>	5 Kasus	5 Kasus			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.16)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

a) Terfasilitasinya permohonan masyarakat dalam rangka koordinasi/pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong dengan Instansi terkait sebanyak 4 obyek untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Terlaksananya proses penataan tanah masyarakat untuk kepentingan umum sebanyak 43 bidang pendaftaran hapusnya hak

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Terfasilitasinya penanganan kasus-kasus atau sengketa pertanahan yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 5 kasus dan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

**E.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.975.903.340,00 dan realisasi sebesar Rp. 107.238.701.622,10 atau 83,80% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.17

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.17 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBDJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1. Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>94,29%</b>			1.
			2. Peningkatan Pelayanan Penerbitan Ijin Lingkungan	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61 rekening	61 rekening			
			3. Meningkatkan Petaan Masyarakat Terhadap Dokumen Lingkungan	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	206 unit	206 unit			
			4. Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Tanah	1.3 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	1100 lembar	553 lembar			
			5. Rehabilitasi Kualitas Lingkungan dan Cadangan Sumber Daya Alam	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%			
			6. Memantapkan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%			
			7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8. Mengoptimalkan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	50%			
			9. Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 media	7 media			
			10. Meningkatkan Kualitas Database Lingkungan	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	3 bulan			
			11. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan.	1.10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 ls	1 ls			
			12. Meningkatkan Pengelolaan Taman dan Optimalisasi Fungsi Taman Serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.11 Penyediaan Dekorasi	100%	0			
				1.12 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	28060 liter	27.150 liter			
				1.13 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	100%	100%			
				1.14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	20 orang	20 orang			
				1.15 Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	100%	0			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBDJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>51,10%</b>			
				Kegiatan :					
				2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	101 unit	101 unit			
				2.2 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	0			
				2.3 Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	0			
				2.4 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	100%	100%			
				2.5 Pemeliharaan Gedung Kantor	8 unit	8 unit			
				<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>36,05%</b>			
				Kegiatan :					
				3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102 OB	8 OB			
				3.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 dokumen	45 dokumen			
				<b>4 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>			
				Kegiatan :					
				4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	30 buku	15 buku			
				<b>5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>88,86%</b>	1 Terjadi peningkatan jumlah sampah plastik di sekolah, desa dan pasar-pasar di Kabupaten Badung	1 Terkelolanya sampah plastik di sekolah, desa dan pasar serta tertanganinya pengelolaan sampah dari sumbernya.	
				Kegiatan :					
				5.1 Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung.	618 orang	618 org, 43.810 buah	2 Akibat penghentian pembuangan sampah ke TPA suwung dan menunggu optimalisasi tempat pengolahan sampah di terminal Mengwitani, diperlukan mesin pencacah sampah organik, mesin press sampah residu serta mesin pengayak organik, truck pengangkut sampah residu.	2 Tertanganinya sampah yang selama ini ditiptikan di Tuban dimana sampah residu dikirim ke Tempat pengolahan sampah di Mengwitani ( sebelah Terminal) sedangkan sampah organik di komposting langsung ditempat lokasi pemilahan.	



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.2 Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung.	9 orang	9 org	3 Dengan semakin meningkat jumlah volume sampah maupun karakteristiknya sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Badung, perlu diadakan upaya-upaya pengelolaan sampah melalui sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle).	3 Mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat sumber, melalui penanganan sampah dengan menggunakan mesin thermal dan pemeliharaan mesin pengolah sampah di TPST Mengwitani serta tenaga manusia yang mengoperasikan peralatan tersebut.	
				5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.	6 unit	6 unit			
				5.4 Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung.	82 orang	82 orang	4 Semakin menurunnya kapasitas daya tampung TPA, diperlukan pembuatan jalan (akses) baru dan pemeliharannya.	4 Menyediakan agregat untuk perkerasan permukaan jalan (akses) penurunan sampah ke area penataan di TPA Suwung guna mengoptimalkan penataan sanitary landfill secara keseluruhan.	
				5.5 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.	994115 liter	883.115 liter			
				5.6 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.	105 unit	103 unit			
				5.7 Pembangunan TPST 3R di Kabupaten Badung.	2 unit	0 unit			
				5.8 Pengoperasian TPS 3R di Kabupaten Badung.	93 orang	93 orang			
				5.9 Pembersihan Sampah di Badan Air di Kabupaten Badung.	260 orang	260 orang			
				5.10 Pembersihan Sampah Pantai di Kabupaten Badung.	585 orang	585 orang			
				5.11 Pengadaan Bahan Agregat.	1000 m3	1000 m3			
				5.12 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.	1 paket	1 paket			
				5.13 Pemeliharaan Container.	15 unit	15 unit			
				5.14 Pemeliharaan Alat Angkut Sampah.	15 unit	15 unit			
				5.15 Pemeliharaan Saluran Air dan Atap di TPST Terminal Mengwi.	2 bulan	2 bulan			
				5.16 Pengadaan Ban Wheel Loader.	10 buah	10 buah			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.17 Pengadaan Truk Compactor.	2 unit	2 unit			
				5.18 Pengadaan Mesin Incenerator.	2 unit	2 unit			
				5.19 Pengadaan Alat Pengolah Sampah.	2 unit	2 unit			
				5.20 Pengadaan Wheel Loader.	4 unit	4 unit			
				5.21 Pengadaan Excavator.	2 unit	2 unit			
				5.22 Pendataan Timbulan Sampah Organik dan Anorganik.	10 buku	10 buku			
				5.23 Pengadaan Dump Truk.	25 unit	25 unit			
				5.24 Pengadaan Road Sweeper.	1 unit	1 unit			
				5.25 Pengadaan Pick Up.	2 unit	2 unit			
				5.26 Pengadaan Mini Spider Excavator.	1 unit	1 unit			
				<b>6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>86,17%</b>			
				Kegiatan :					
				6.1 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	105 lokasi	0			
				6.2 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung.	10 lokasi	0			
				6.3 Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).	55 kasus	6 kasus			
				6.4 Penilaian Dokumen Lingkungan.	400 dokumen	485 dokumen			
				6.5 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung.	1 dokumen	0			
				6.6 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung.	1 dokumen	0			
				6.7 Pemantauan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan dan Pengawasan Perijinan Penyimpanan Sementara Limbah B3.	12 usaha	12 usaha			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.8 Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha di Sepanjang DAS Tukad Mati (Seminyak, Legian, Kuta).	1 dokumen	1 dokumen			
				6.9 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung.	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>			
				Kegiatan :					
				7.1 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan.	100%	0			
				7.2 Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM).	10 desa proklam	10 desa proklam			
				<b>8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>97,53%</b>			
				Kegiatan :					
				8.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung.	2 dokumen	2 dokumen			
				8.2 Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	75 spanduk	75 spanduk			
				8.3 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung.	1 dokumen	0			
				8.4 Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung.	1 dokumen	0			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8.5 Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Badung.	1 dokumen	1 dokumen			
				8.6 Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem.	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b> Kegiatan :	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				9.1 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung.	106895,19 m2	106895,19 m2			
				9.2 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung.	400 Pohon	400 Pohon			
				9.3 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan.	299.224 Liter	299.224 Liter			
				9.4 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan.	129 Unit	129 Unit			
				9.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan.	35 Unit	35 Unit			
				9.6 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.	1 paket	1 paket			
				9.7 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Penyangga Tanaman Hias di Tanam Median	1 Paket	1 Paket			
				9.8 Penyusunan DED Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Tukad Mati Kelurahan Legian.	1 Dokumen	1 Dokumen			
				9.9 Penyusunan DED Penamaan Taman –Taman di Kabupaten Badung.	1 Dokumen	1 Dokumen			
				9.10 Penyusunan DED Penataan Kawasan Taman Gumil Banten Giri Lestari di Kecamatan Petang.	1 Dokumen	1 Dokumen			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.11 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan.	400 Pohon	400 Pohon			
				9.12 Pengadaan Sarana Pertamanan Penunjang Pariwisata.	106895,19 m2	106895,19 m2			
				<b>10 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>41.66%</b>			
				Kegiatan :					
				10.1 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung.	24 sekolah	10 sekolah			
				10.2 Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung.	6 calon	6 calon			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.17)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pembayaran Sudah sesuai dengan pemakaian sedangkan harga di DPA lebih tinggi dari harga riil di lapangan.
2. Adanya Penghapusan 5 unit kendaraan karena rusak berat
3. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat difokuskan untuk penanganan covid -19 berdasarkan surat edaran no. 223 tanggal 30 April 2020 tentang pelaksanaan Anggaran dan pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid – 19

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembayaran Sudah sesuai dengan pemakaian sedangkan harga di DPA lebih tinggi dari harga riil di lapangan.
2. Adanya Penghapusan 5 unit kendaraan karena rusak berat
3. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat difokuskan untuk penanganan covid -19 berdasarkan surat edaran no. 223 tanggal 30 April 2020 tentang pelaksanaan Anggaran dan pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid – 19

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana

yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid - 19

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid - 19

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid – 19
2. Pengadaan pada kegiatan ini tidak dilaksanakan atas dasar surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 900/4760/BPKAD/Sekre tanggal 15 Oktober

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid – 19
2. Pengadaan pada kegiatan ini tidak dilaksanakan atas dasar surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 900/4760/BPKAD/Sekre tanggal 15 Oktober

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid - 19

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid - 19
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
    1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19
    2. Pengadaan pada kegiatan ini tidak dilaksanakan atas dasar surat sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 900/4760/BPKAD/Sekre tanggal 15 Oktober 2020 untuk tidak melaksanakan Pelelangan, Kontrak atau Tender pada kegiatan APBD Perubahan Tahun 2020
  10. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    1. Realisasi belanja diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas agar dana yang tersedia dapat Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid - 19



**F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.112.579.581,96 dan realisasi sebesar Rp 14.355.763.586,00 atau 94,99 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel

3.1.1.18

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.18 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan			
				1.1 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	600 lembar materai	600 lembar materai			
					10 buku cek	10 buku cek			
					200 buah perangko	200 buah perangko			
				1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan			
				1.3 Penyediaan Alat Tulis kantor	42 jenis	40 jenis			
				1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28 jenis	28 jenis			
				1.5 Penyediaan peralatan Rumah tangga	7 jenis	6 jenis			
				1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	552 eksemplar	552 eksemplar			
					53 majalah	53 majalah			
				1.7 Penyediaan makanan dan minuman	6 jenis	6 jenis			
				1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	1 LS			
				1.9 Penyediaan bahan dekorasi	4 jenis	2 jenis			
				1.10 Penyediaan bahan Bakar kendaraan	21,684 liter	16,330 liter			
				1.11 Penyediaan bahan upacara keagamaan	12 jenis	11 jenis			
				1.12 Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.18

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor			
				1.14 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket	3 paket			
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>			
				2.1 Pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis			
				2.2 Pengadaan peralatan kantor	10 jenis	9 jenis			
				2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/	8 unit mobil 13 unit sepeda motor	8 unit mobil 13 unit sepeda motor			
				2.4 Pemeliharaan peralatan kantor	3 jenis	3 jenis			
				<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				3.1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				3.2 Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	4 dokumen	4 dokumen			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.18

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4 <b>Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD</b>	3 dokumen	3 dokumen			
				4.1 Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	3 dokumen	3 dokumen			
				5 <b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	97%	96%			
				5.1 Penataan Arsip Akta catatan sipil	5,200 buku	5,200 buku			
				5.2 Fumigasi dan anti rayap	20 paket	- paket			
				5.3 Pelayanan Akta Kelahiran	10,000 kutipan akta kelahiran	10,000 kutipan akta kelahiran			
				5.4 Pelayanan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	4,500 kutipan akta kematian	4,500 kutipan akta kematian			
					1,500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	1,500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak			
				5.5 Pelayanan jemput bola	62 desa/kel	62 desa/kel			
				5.6 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	10,500 kutipan akta perkawinan	10,000 kutipan akta perkawinan			
				5.7 Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	5 jenis buku	5 jenis buku			
				5.8 Pelayanan KTP-el dan Kartu Identitas Anak	52,000 KIA	52,000 KIA			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.18

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	
				5.9 Pelayanan penertiban dokumen kependudukan (DAK)	50,000	dokumen	78,000	dokumen					
				5.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	62	desa/kel	62	desa/kel					

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah Tertuang Dalam Tabel 3.1.1.18)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Adanya rasionalisasi dan refocusing tersebut berpengaruh terhadap capaian target kinerja program/kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tetap memprioritaskan kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik. Dengan menggunakan pagu anggaran yang telah mengalami rasionalisasi dan refocusing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih dapat mencapai target kinerja untuk program prioritas. Sedangkan untuk melaksanakan program rutin, menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin sehingga operasional kantor dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa kegiatan rutin yang belum mencapai target.

**G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.507.178.171,63 dan realisasi sebesar Rp. 10.369.390.882,00 atau (82,91)% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel  
3.1.1.19

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.19 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa; 2 Fasilitasi penyelenggaraan Bintek dan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan; 3 Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel; 4 Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa; 5 Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan; 6 Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG.	1. <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  Kegiatan :  1.1 Pelayanan jasa administrasi keuangan  1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	90.76%			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.7. Penyediaan makanan dan minuman 1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.9. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.10. Penyediaan dekorasi 1.11. Penyediaan bahan bakar kendaraan 1.12. Penyediaan upacara keagamaan 1.13. Penyediaan alat tulis kantor 1.14. Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat 2. <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 2.1. Pemeliharaan gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 jenis  204 eksemplar 5 jenis 1 Ls 1 orang 3 jenis 15.300 liter 13 jenis 19 jenis 1 Ls 100% 2 jenis 8 unit mobil, 12 unit sepeda motor	2 jenis  204 eksemplar 5 jenis 1 Ls 1 orang 3 jenis 14.700 liter 13 jenis 19 jenis - 73.81% 2 jenis 8 unit mobil, 12 unit sepeda motor			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.3. Pemeliharaan perlengkapan kantor 2.4. Pemeliharaan peralatan kantor 3. <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 4. <b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b> 4.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 5. <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b> 5.1. Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan 5.2. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	1 jenis  7 jenis  100%  12 bulan  4 dokumen  100%  3 dokumen  100%  46 desa 6 Kec,	-  7 jenis  69.92%  3 bulan  4 dokumen  100%  3 dokumen  100%  46 desa 6 Kec,			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>6. <b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b></p> <p>6.1. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)</p> <p>6.2. Pembinaan dan Evaluasi Kelompok /Perorangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung</p> <p>6.3. Rakornas Unit Pengelola Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Badung</p> <p>7. <b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b></p> <p>7.1. Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK</p> <p>7.2. Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Lomba KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS Kabupaten Badung/Kes, Posyandu, PHBS Kabupaten Badung</p> <p>7.3. Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung</p> <p>7.4. Jambore Kader PKK</p>	<p>32 Pasar Desa, 45 Bumdesa</p> <p>6 UPK dan SPP</p> <p>6 kelompok</p> <p>25 orang</p> <p>12 TP PKK Kab.,Kec. 5 Kec.</p> <p>5 Kec.</p> <p>62 desa/Kel. 6 Kec.</p> <p>12 orang (TP PKK)</p>	<p>1 Pasar Desa, 10 Bumdesa</p> <p>-</p> <p>6 kelompok</p> <p>-</p> <p>12 TP PKK Kab.,Kec. 5 Kec.</p> <p>5 Kec.</p> <p>62 desa/Kel. 6 Kec.</p> <p>12 orang (TP PKK)</p>			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.5. Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 bagi Kader PKK di Kabupaten Badung 8. <b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b> 8.1. Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk dan Perubahan 8.2. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung 8.3. Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung 8.4. Penyerahan, pembinaan dan monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung 9. <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b> 9.1. Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten	548 orang  62 Desa/Kel  46 Desa  46 Desa  34 Desa  46 Desa	443 orang  62 Desa/Kel  46 Desa  46 Desa  34 Desa  46 Desa			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9.2. Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam Membangun Desa	62 Desa/Kel	62 Desa/Kel			
				9.3. Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	62 Desa/Kel	62 Desa/Kel			
				9.4. Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa	5 Desa	5 Desa			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (Sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.19)
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari target kinerja program 100 % hanya tercapai 90,76 % disebabkan karena:  
1)Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dimana ditargetkan 10 buku cek, 150 lembar materai 3000, 350 lembar materai 6000 hanya tercapai 3 buku cek, 50 lembar materai 3000, 350 lembar materai 6000. Hal ini disebabkan karena kita sudah melakukan transaksi non tunai; 2)Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan hanya tercapai 14.700 liter dari yang ditargetkan 15.300 liter disebabkan karena realisasi sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran; 3)Kegiatan Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat target tidak tercapai karena rasionalisasi anggaran.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari target kinerja program 100 % hanya tercapai 73,81 % disebabkan karena:  
1)Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor target tidak tercapai karena rasionalisasi anggaran.
  - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari target kinerja program 100 % hanya tercapai 69,92 % disebabkan karena : 1)Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari target 12 bulan hanya tercapai 3 bulan disebabkan karena efisiensi anggaran.

- d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dari target kinerja program 100 % hanya tercapai 85,64 % disebabkan karena: 1)Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) ; dan 2) Kegiatan Rakornas Unit Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Badung target tidak tercapai karena rasionalisasi anggaran.
- e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dari target kinerja program 12 TP PKK Kab., Kec. tercapai 12 TP PKK Kab., Kec. tetapi pada : 1)Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 bagi Kader PKK di Kabupaten Badung dari target 548 orang untuk pembagian sembako, masker, sabun cuci hanya tercapai 443 orang karena sesuai usulan dari desa.

**H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan Alokasi Anggaran yang terintegrasi dengan pelaksanaan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.465.691.305,81 dan realisasinya sebesar Rp. 15.689.836.509,00 atau 84,97% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.20



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.20 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengendalian Penduduk dan	1. Dinas P2KBP3A	Meningkatkan akses Pembangunan yang berkualitas	1. <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.3 Pelayanan jasa administrasi keuangan 1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.8 Penyediaan makanan dan minuman	100%	100%  12 bulan 150 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 900 eks 12 bulan	100%  12 bulan 74 unit (tidak tersamast) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 558 eks (rasionalisasi)		





### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	3 bulan			
				1.1 Penyediaan Upacara 0 Keagamaan	12 bulan	12 bulan			
				1.1 Penyediaan bahan 1 bakar kendaraan dinas	29.200 lt	11.808 lt (rasionalisasi)			
				2. <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%	100%			
				2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 pkt	1 pkt			
				2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150 unit	50 unit (rasionalisasi)			
				2.3 Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 pkt	1 pkt			
				2.4 Pemeliharaan peralatan kantor	1 pkt	1 pkt			
				3 <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100%	100%			
				3.1 Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KKBP)	12 bulan	12 bulan			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  4.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100%			
				<b>5 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>  5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	100%	100%			
				<b>6 Program Keluarga Berencana</b>  6.1 Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	76.40%	79.27%	1 Belum optimalnya pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB 2 Belum optimalnya peran serta stakeholder dan lintas sektor dalam keterlibatan pelaksanaan program di Kampung KB	1 Memprioritaskan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Perangkat daerah terkait. 2 Meningkatkan koordinasi kepada stakeholder dan lintas sektor akan pentingnya keberadaan Kampung KB	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.2 Advokasi Program Keluarga Berencana pada Pasangan Usia Subur (PUS) unmetneed	6 kec	0 (covid)	3 Masih tingginya angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi	3 Melakukan sosialisasi terutama kepada kelompok masyarakat marjinal akan pentingnya program KB mengatur jarak kelahiran.	
				6.3 Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	6 kamp.K B	0 (covid)	4 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi	4 Membangun sistem pelayanan berbasis digital	
				6.4 Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 pkt	1 pkt			
				6.5 Rapat Kerja Forum Musyawarah dan Lokakarya Kampung KB Tingkat Desa dan Kecamatan	6.522 org	880 org (covid)			
				6.6 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	66 faskes	66 faskes			
				6.7 Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Dukungan Manajemen BOKB	393 org	250 org (covid)			
				6.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	40 unit	40 unit			




### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6.9 Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB</li> <li>6.1 Pengadaan Sarana 0 dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan</li> <li>6.1 Operasional 1 Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD</li> <li>6.1 Penyuluhan 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling</li> <li>6.1 Pengelolaan Alat dan 3 Obat Kontrasepsi</li> <li>7 <b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b></li> <li>7.1 Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kabupaten Badung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 BP</li> <li>1 kamp. KB</li> <li>62 desa</li> <li>3.500 PUS</li> <li>12 bln</li> <li>0.16%</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 BP</li> <li>1 kamp. KB</li> <li>62 desa</li> <li>347 PUS (covid)</li> <li>12 bln</li> <li>0.13%</li> <li>2 Juara</li> </ul>			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>8 Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga</b>  8.1 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh Kelompok BKL  8.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana BKB KIT dan BKL KIT <b>9 Program Pengendalian Penduduk</b>  9.1 Monitoring dan Evaluasi Program KB	98%	100%			
					12 bln	12 bln			
					12 pkt	12 pkt			
					2.10%	2.10%			
					6 Kec	6 Kec			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam table 3.1.1.20)
- 3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 Kegiatan, program belum bisa tercapai sesuai target disebabkan 7 kegiatan sudah mencapai target dan 4 kegiatan belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional  
Target sebesar 150 unit terealisasi 74 unit (tidak tersamsat) disebabkan karena adanya kendala teknis.
  2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari target 900 eks terealisasi 558 eks disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
  3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dari target 12 bulan terealisasi 3 bulan disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19
  4. Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas dari target sebesar 29.200 lt terealisasi 11.808 lt disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 Kegiatan , program ini belum bisa mencapai target disebabkan 3 kegiatan sudah mencapai target dan 1 kegiatan belum mencapai target yaitu sebagai berikut:
1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dari target sebesar 150 unit terealisasi 50 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

c. Program Keluarga Berencana terdiri dari 13 kegiatan, program ini belum bisa mencapai target disebabkan ada 8 kegiatan sudah mencapai target dan 5 kegiatan belum mencapai target yaitu sebagai berikut:

1. Advokasi program Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur (PUS) dari target 6 Kecamatan terealisasi 0 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
2. Monitoring dan Evaluasi Kampung KB dari target 6 Kampung KB terealisasi 0 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
3. Rapat Kerja Forum Musyawarah dan Lokakarya Kampung KB Tingkat Desa dan Kecamatan dari target 6.522 orang terealisasi 880 disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
4. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Dukungan Manajemen BOKB dari target 393 orang terealisasi 250 orang disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.
5. Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling dari target 3.500 PUS terealisasi 347 PUS disebabkan karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.



**I. URUSAN PERHUBUNGAN**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.291.026.604,31 dan Realisasi sebesar Rp 54.816281.571 atau 90,92% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.21

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.21 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERHUBUNGAN	1. Dinas perhubungan	Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  1.3 Penyediaan jasa keuangan 1.4 Penyediaan alat tulis kantor 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>100%</b>  5 nomor telepon, 2 lokasi air dan 3 lokasi rekening listrik  46 Unit  900 Lembar 6 jenis 23 jenis	<b>100%</b>  5 nomor telepon, 2 lokasi air dan 3 lokasi rekening listrik  46 Unit  900 Lembar 6 jenis 23 jenis			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 lokasi	3 lokasi			
				1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 media	10 media			
				1.8 Penyediaan bahan makanan dan minuman	600 kotak	600 kotak			
				1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Kali	20 Kali			
				1.10 Penyediaan dekorasi	74 Buah	74 Buah			
				1.11 Penyediaan bahan bakar kendaraan	13.050 liter	13.050 liter			
				1.12 Penyediaan upacara keagamaan	4 lokasi	4 lokasi			
				1.13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	2 Orang			
				1.14 Pengelolaan Kebersihan Kantor	9 Orang	9 Orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 2.1 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.4 Pemeliharaan perlengkapan kantor 2.5 Pemeliharaan peralatan kantor 2.6 Pengawasan, pengendalian dan penertiban Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	<b>100%</b>  146 Unit  2 lokasi  45 Unit  4 Unit  109 Unit  288 Kali	<b>100%</b>  146 Unit  2 lokasi  45 Unit  4 Unit  109 Unit  288 Kali			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<div> <div>2.7</div> <div>Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor</div> </div> <div> <div>2.8</div> <div>Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</div> </div> <div> <div>2.9</div> <div>Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung</div> </div> <div> <div>3</div> <div><b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b></div> </div> <div> <div>3.1</div> <div>Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</div> </div> <div> <div>3.2</div> <div>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah</div> </div>	<div>7 Unit</div> <div>25 kegiatan</div> <div>17 Unit</div> <div>10 Dokumen</div> <div>39 Orang</div>	<div>7 Unit</div> <div>25 kegiatan</div> <div>17 Unit</div> <div>10 Dokumen</div> <div>39 Orang</div>			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				4.1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	10 Buku	10 Buku			
				<b>5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>100%</b>	<b>90.88%</b>			
				5.1 Pengadaan sarana uji Kendaraan Bermotor	21000 set	11970 set			
				5.2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas jalan di Kabupaten Badung	45 Unit	45 Unit			
				5.3 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	12 lokasi	12 lokasi			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.4 Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	37 Simpang	37 Simpang			
				5.5 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	137 Orang	137 Orang			
				5.6 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung	450 Buah	450 Buah			
				5.7 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	12000 Titik	9480 titik			
				5.8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	10 buku			
				5.9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kecamatan Kuta	1 Paket	1 Paket			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.10 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kec Kuta Selatan	1 Paket	1 Paket			
				5.11 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kec Kuta Utara	1 Paket	1 Paket			
				5.12 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kec. Mengwi	1 Paket	1 Paket			
				5.13 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kec Abiansemal	1 Paket	1 Paket			




### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Desa dan Tempat - Tempat Strategis di Kecamatan Petang	1 Paket	1 Paket			
				5.15 Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	3 dokumen	3 dokumen			
				5.16 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan pada Kawasan Pariwisata Kabupaten Badung	613 titik	613 titik			
				<b>6 Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>					
				6.1 Pembinaan dan Pelatihan Pengemudi Pariwisata di Kabupaten Badung	150 orang	150 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>7 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia</b> <b>7.1</b>  Pelatihan Kesamaptaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	<b>100%</b>  137 Orang	<b>100%</b>  137 Orang			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.21)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Adanya rasionalisasi dan refocusing tersebut berpengaruh terhadap capaian target kinerja program/kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Badung tetap memprioritaskan kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik. Dengan menggunakan pagu anggaran yang telah mengalami rasionalisasi dan refocusing, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung masih dapat mencapai target kinerja untuk program kegiatan rutin. Sedangkan untuk melaksanakan program prioritas menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin sehingga meskipun ada beberapa kegiatan prioritas yang belum mencapai target.

Adapun Program /kegiatan yang tidak mencapai target adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, sedangkan kegiatan yang tidak mencapai target adalah Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung akibat dari rasionalisasi/refocusing, dimana yang dapat dilaksanakan hanya pengadaan material/bahan LPJ sebesar Rp. 199.160.500,-

**J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.008.313.763 dan Realisasi sebesar Rp. 57.282.083.609 Atau 98,75 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.22

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.22 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ( Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung		a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	100%	68,23%			
					1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	81%			
					1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	35 unit kendaraan + 1 unit kendaraan yang dikir	samsat 35 kendaraan + 1 kendaraan yang dikir			
					1.3 Rapat - rapat koordinas dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%	100%			
					1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	47%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.22

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	
					1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	25%					
					1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	25%					
					1.7 Penyediaan makanan dan minuman	100%	43%					
					1.8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%	100%					
					1.9 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	100%	100%					
					1.10 Penyediaan administrasi jasa keuangan	100%	26%					
					1.11 Penyediaan Dekorasi	100%	84%					
					1.12 Penyediaan bahan bakar kendaraan	100%	51%					

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.22

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	
					1.3 Pemeliharaan peralatan kantor	74 unit	17 unit					
					1.4 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100%	100%					
					1.5 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Badung	1 Dokum en	1 Dokume n					
					<b>Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100%	83,50%					
					1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	77%					
					1.2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	90%					
					<b>Program Penganggaran Perangkat Daerah</b>	100%	89%					
					1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)	100%	89%					

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.22

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
				b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	1 <b>Program Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	100%	89%	Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung	Mengoptimalkan sarana dan parasarana serta SDM yang tersedia		
				c.Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas	1,1 Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	100%	89%				
					Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	988 site	2 site ( pemeliharaan 63 akses point di gedung 8 Sekretariat dan RJ Sekda)				



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.22

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10	
					Pemeliharaan web Kabupaten Badung	1 web	1 web						
				d. Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	100%	88%						
					Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	5 System	7 system						
					Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis web (TI)	3 Kelompok	3 Kelompok						
					Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	144 orang	144 orang						
					1.8 Pelayanan Informasi publik	100%	42%						

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.22

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.9 Pengelolaan data dan informasi publik	100%	100%			
				1.10 Pengelolaan data center di Kabupaten Badung	8760 jam	8760 jam			
				1.11 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	9 media	9 Media			
				1.12 Pelayanan Informasi melalui lembaga penyiaran	18 media	18 Media			
				1.13 Pengelolaan pusat kendali Kabupaten Badung	10 orang	10 orang			
				1.14 Penyusunan Review Rencana induk Menara Telekomunikasi terpadu di Kab. Badung	100%	0%			
				1.15 Pengelolaan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Kabupaten Badung	9 Media	9 Media			
				1.16 Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth	1,50 GBPS	1,50 GBPS			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.22)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**PROGRAM KOMUNIKASI , IINFORMASI DAN MEDIA MASA**

- a. Pengembangan akses internet di Kabupaten Badung bertujuan untuk meningkatkan stabilitas koneksi internet di kabupaten Badung tahun 2019 telah tersedia 1101 akses point , dengan adanya pengembangan akses point di lingkungan Puspem dengan target 518 akses point terealisasi 534 akses poin maka tahun 2020 di Kabupaten Badung sudah tersedia 1635 akses point.
- b. Pengadaan perangkat manajemen bandwidth dan security, kegiatan ini bertujuan terjaganya keamanan data / informasi intranet/internet dan lebih terjaminnya kehandalan koneksi internet adapun kegiatan ini terdiri dari Belanja Lisensi Network security dan belanja modal perangkat manajemen bandwith yang sudah terlaksana 100%.
- c. Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung, kegiatan ini terkait dengan pengadaan tenaga ahli untuk melakukan audit aplikasi yang ada di data center dan memantau data center selama 8760 jam dalam setahun, tahun 2020 dilakukan pengadaan tenaga ahli sebanyak 3 orang, telah terealisasi 100%.
- d. Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung, kegiatan ini terkait dengan penyediaan 10 orang sumber daya manusia pengelola TI di Pemerintahan Kabupaten Badung berfungsi optimal, telah terealisasi 100%.
- e. Pemeliharaan infrastruktur jaringan internet/intranet di Kab.

Badung, kegiatan ini bertujuan menjaga kehandalan koneksi jaringan komunikasi data (intranet) dan internet, target pelaksanaannya adalah 988 site selama 12 bulan terealisasi 100%

1.6 Pemeliharaan CCTV Kabupaten Badung, tahun 2019 terealisasi pemeliharaan CCTV sebanyak 168 kamera, tahun 2020 terpelihara 178 CCTV

- f. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten Badung, Tahun 2019 menghasilkan 10 system, tahun 2020 ditargetkan 5 system yang terealisasi 100%

**K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.579.816.693,04 dan Realisasi sebesar Rp.2.916.052.820,- atau 81,46 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.23

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.23 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Koperasi ( Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koperasi	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Peningkatan Kualitas UMKM yang kreatif dan berdaya saing	1. <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM</b>	100%	100%	Produktifitas usaha UMKM masih rendah disebabkan karena kualitas SDM rendah terutama dalam hal : Akses pasar, Manajemen dan teknologi	Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, workshop dan seminar	
			Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	1.1 Kegiatan Wokrshop Wirausaha Pemula dan berkembang	0 orang	-			
			Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	1,2 Pelatihan dan Training Kewirausahaan	120 orang	120 orang			
			Membuka akses jaringan kerjasama						
				2. <b>Program Pengembangan Sistem Data/Informasi</b>					
				2.1 Penyusunan Profil Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	0 Buku	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.23

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. <b>Program Penciptaan Iklim Usaha - usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	100%	82%			
				3.1 Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil dan Menengah ( One Village One Product / OVOP )	3 Koperasi	3 Koperasi			
				3.2 Pembinaan Kelompok UMKM	40 Kelompok UMKM	8 Kelompok UMKM			
				3.3 Klinik Usaha kecil menengah (UMKM)	750 UMKM	750 UMKM			
				3.4 Publikasi UMKM di Kabupaten Badung dalam Era New Normal	1 Video UMKM di Kab.Badung	-			
				3.5 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Petang Kab.Badung	100 orang	100 orang			
				3.6 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Abiansema Kab.Badung	200 orang	200 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.23

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.7	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Mengwi Kab.Badung	200 orang	200 orang		
				3.8	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Kuta Utara Kab.Badung	200 orang	200 orang		
				3.9	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Kab.Badung	200 orang	200 orang		
				3.10	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Selatan Kab.Badung	200 orang	200 orang		
				4.	<b>Perogram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	100%	100%	Belum adanya pendampingan tenaga ahli dalam	Perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
				4.1	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	218 Orang	218 Orang	Penilai kesehatan koperasi belum memiliki	Perlu diadakan Bimtek bagi Penilai
				4.2	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang tidak RAT	50 Koperasi	50 Koperasi	Persaingan sangat ketat antara Lembaga	Perlu adanya fasilitasi akses



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.23

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4.3 Pendidikan Perkoperasian bagi anggota Koperasi	150 Orang	150 Orang			
				4.4 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	80 Orang	80 Orang			
				4.5 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang	80 Orang	80 Orang			
				4.6 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Mengwi	80 Orang	80 Orang			
				4.7 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	188 Koperasi	188 Koperasi			
				4.8 Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	120 Orang	120 Orang			
				4.9 Monitoring Dana Bergulir	0 Kali	-			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.23)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan Program Prioritas pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Kegiatan :

- a) Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang
- b) Pelatihan dan Training Kewirausahaan

Hasil pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran adalah untuk meningkatkan pengembangan kewirausahaan UMKM dimana target fisik program dan anggarannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100 % untuk fisik program dan 95,64% untuk keuangannya.

**2. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi**

Kegiatan :

- a) Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Kegiatan pada program Pengembangan Sistem Data/Informasi mengalami refocusing anggaran karena adanya pandemi Covid-19

**3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/OVOP )
- b) Pembinaan Kelompok UMKM
- c) Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- d) Publikasi UMKM di Kabupaten Badung dalam Era New Normal
- e) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Petang Kab.Badung
- f) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Abiansemal Kab.Badung
- g) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Mengwi Kab.Badung
- h) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Kuta Utara Kab.Badung
- i) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Kab.Badung
- j) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Selatan Kab.Badung

Hasil pelaksanaan program secara umum sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 82% untuk program dan 74,02% keuangannya, hal ini disebabkan karena kegiatan Publikasi UMKM di Kabupaten Badung sudah berproses, namun tidak terealisasi karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

**4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Kegiatan :

- a) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Perkoperasian
- b) Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang tidak RAT
- c) Pendidikan Perkoperasian bagi Anggota Koperasi

- d) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
- e) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang
- f) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Koperasi di Kecamatan Mengwi
- g) Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
- h) Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)
- i) Monitoring Dana Bergulir

Hasil pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran adalah untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% untuk fisik program dan 85,84% untuk keuangannya.

**L. URUSAN PENANAMAN MODAL**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.565.688.071,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.420.442.489,00 atau 79,42 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.24

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.24 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam Bidang Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan						
				1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	77%			
				1,1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	100%			
				1,2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit Mobil, 28 Unit Sepeda Motor	100%			
				1,3 Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	70%			
				1,4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23%			
				1,5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	888 Exemplar	100%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1,6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	100%			
				1,7 Penyediaan Dekorasi	12 bulan	28%			
				1,8 Penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	100%			
				1,9 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	18871 Liter	100%			
				1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	47%			
				1.11 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	2 orang	100%			
				1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	35%			
				1.13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	950 Materai, 16 Buku cek	100%			
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>			
				2,1 Pemeliharaan peralatan kantor	154 Unit, 2 Paket	29%			
				2,2 Pengadaan perlengkapan kantor	2 unit	100%			
				2,3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18 Unit Mobil, 28 Unit Sepeda Motor	65%			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2,4 Pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	24%			
				<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				3,1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 Orang	100%			
				3,2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	63 Buku	100%			
			Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman	<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>	Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemanfaatan kanal layanan pengaduan online seperti Sistem Pengaduan Masyarakat (Sidumas)	Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan oleh OPD terkait sebagai <i>Leading Sector</i> Sistem Sidumas agar menginformasikan keberadaan Sidumas kepada masyarakat pemohon layanan baik secara langsung maupun lew at media online.	
				4,1 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP	70 Orang	100%			
				4,2 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	2000 Izin	105%			
				4,3 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	2000 izin	105%			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4.4 Evaluasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	2000 Izin	105%			
				4.5 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 Izin Ekonomi	160%			
				4.6 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1000 izin Ekonomi	145%			
				4.7 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 Izin Ekonomi	160%			
				4.8 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 Izin Kesra dan Non Perizinan	155%			
				4.9 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 Izin Kesra dan Non Perizinan	155%			
				4.10 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 Izin Kesra dan Non Perizinan	155%			
				4.11 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 paket	100%			
				4.12 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu; ISO 9001:2015 dan Pendampingan Dokumen ISO 37001	2 paket	-			
				4.13 Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung	1 kali	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM	<b>5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	100%	100%			
				5,1 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	40 Pengaduan	100%			
				5,2 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	40 Pengaduan	100%			
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi	<b>6 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa</b>	100%	75%			
				6,1 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	14500 brosur dan 100 buku profil	-			
				6,2 Pemuktahiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	100%			
				6,3 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	1 Paket	100%			
				6,4 Pemuktahiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	1 paket	100%			
			Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi	<b>7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM</b>	100%	-			
				7,1 Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan Usaha bagi Pelaku UMKM	15 UMKM	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7,2 Penyusunan Kajian Rencana Integrasi Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	1 kajian	-			
			Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi	8 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	24,8%			
				8,1 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	150 PMA/PMDN	100%			
				8,2 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung.	150 PMA/PMDN	24%			
				8,3 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	1 kali forum matchmaking	-			
				8,4 Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal Terhadap Realisasi Investasi	1 dokumen	-			
				8,5 Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online	50 orang	-			
			Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi	9 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	33,33%	Pelaksanaan promosi tentang potensi investasi tidak berjalan secara maksimal karena adanya himbauan pemerintah untuk menghindari pertemuan dengan tatap muka langsung karena pandemi Covid-19.	Upaya yang dapat dilakukan dalam tatanan kehidupan baru dalam melaksanakan promosi potensi investasi dengan media online, meskipun cara ini belum begitu diminati oleh masyarakat/pelaku usaha. Terkait hal tersebut untuk kedepannya agar tetap dilakukan promosi secara langsung.	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.24

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9,1 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	20 buku	-			
				9,2 Informasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 kali	-			
				9,3 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 paket	100%			
			Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non	10 Program Pengembangan Data dan Informasi	100%	33,33%			
				10.1 Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	1 paket	-	-		
				10.2 Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi sebagai Skala Prioritas Daerah di Kabupaten Badung	1 kajian	-	-		
				10.3 Kajian dan Penyusunan Produk-produk Hukum Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	5 produk hukum	100%	-		
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan	11 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renstra,Renja, RKA)	100%	100%			
				11.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	60 buku	100%	-		

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.24)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19. Khususnya dalam memprioritaskan belanja-belanja yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif.
- Pada kegiatan Informasi Investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan perubahan APBD tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Realisasi Sesuai Dengan Skala Prioritas mengacu Surat Edaran Sekda Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus (Covid-19).

**M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 675.272.117,00 dan Realisasi sebesar Rp. 608.987.021,00 atau 90,18% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.25

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.25 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	1. <b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	100%	100%			
				1.1 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kabupaten Badung	1 tahun	1 tahun			
				1.2 Seleksi Jambore Pemuda Daerah Paskibraka dan Pelatihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	3 orang	3 orang			
				2. <b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	100%	100%			
				2.1 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	8 lokasi	8 lokasi			



3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.25)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Prestasi Bidang Kepeloporan, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu 1). Persentase prestasi bidang kepeloporan pada tingkat provinsi dan atau nasional, 2). Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional. Capaian kinerja tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%.
- Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu 1). Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional, 2). Persentase atlet yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional untuk capaian kinerja tahun 2020 belum mencapai target dikarenakan kondisi pada tahun 2020 terjadi pandemi covid sehingga penyelenggaraan Porjar pada tingkat provinsi tidak dilaksanakan. Walaupun demikian, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terus mengupayakan melengkapi sarana prasarana olahraga di seluruh kecamatan dan memaksimalkan pembinaan serta pelatihan sehingga tahun akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan

**N. URUSAN STATISTIK**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.447.200,- dan Realisasi sebesar Rp. 8.326.300,- atau 98,57 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.26

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.26 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Statistik ( Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Statistik		Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan	Program pengembangan Data /informasi/Statistik Daerah	100%	33,30%	1 Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung	1 Memaksimalkan ketersediaan dana dan SDM untuk melakukan pengumpulan data sehingga data statistik tetap tersedia	
				Penggandaan data sektoral statistik	227 Data	227 Data			
				Forum Data	1 kali	0			
				Sosialisasi simdasi Pemerintah Kabupaten	1 kali pertemuan	0			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.26)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH**

- a. Penggandaan Data Sektoral statistik, tahun 2019 menargetkan 450 dokumen terealisasi 100%, tahun 2020 kegiatan belum bisa dilaksanakan sehubungan adanya refofusing pada Tahun Anggaran 2020.
- b. Forum data statistik , tahun 2019 terlaksana 100% yang dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Bali, tahun 2020 tidak terealisasi karena adanya refofusing pada tahun anggaran 2020 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- c. Simdasi Pemerintah Kabupaten, kegiatan yang baru diusulkan Tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk mensosialisasikan Sistem Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) Badung kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Badan/ Lembaga / Instansi terkait. Tetapi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing pada Tahun anggaran 2020.

**O. URUSAN PERSANDIAN**

**DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.477.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 52.157.000,- atau 99,39 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.27

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.27 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persandian		Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM Sandi				Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung	Memaksimalkan pendayagunaan SDM yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan persandian	
				Program Pengelolaan teknis persandian	100%	20,31%			
				Pengelolaan teknis persandian	16 orang	13 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.27

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
					Pengelolaan pengamanan informasi , peralatan sandi, jaringan komunikasi sandi	6 buah	0		Akan di usulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya mengingat peralatan sandi, jaringan komunikasi sandi dipinjam dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN)	
					Kontra pengindraan / sterilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya	6 tempat	0		Akan di usulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya mengingat peralatan sandi, jaringan komunikasi sandi dipinjam dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN)	
					Sertifikat elektronik	10 OPD	0			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.27)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

#### **PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH**

- a. Kegiatan Pengelolaan teknis persandian, tahun 2019 tenaga pengelola teknis persandian sebanyak 16 orang, tahun 2020 tenaga pengelola teknis persandian berkurang menjadi 13 orang karena adanya mutasi intern di lingkungan Dinas Kominfo.
- b. Pengelolaan Forum data statistik , tahun 2019 terlaksana 100% yang dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Bali, tahun 2020 tidak terealisasi karena adanya refofusing pada tahun anggaran 2020 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- c. Simdasi Pemerintah Kabupaten, kegiatan yang baru diusulkan Tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk mensosialisasikan Sistem Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) Badung kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Badan/ Lembaga / Instansi terkait. Tetapi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing pada Tahun Anggaran 2020.



**P. URUSAN KEBUDAYAAN**

**DINAS KEBUDAYAAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.306.785.836,58 dan Realisasi sebesar Rp. 104.754.131.248,- atau 88,54 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.28

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.28 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan	Merevitalisasi Adat dan Budaya	<b>1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%			
				1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25 Sepeda Motor dan 22 Mobil	25 Sepeda Motor dan 22 Mobil			
				1.3 Pelayanan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.4 Penyediaan Jasa Jaga Malam	6 Orang	6 Orang			
				1.5 Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				1.8 Pengelolaan Kebersihan Kantor	9 Orang	9 Orang			
				1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.10 Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
				1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	1 Paket			
				1.12 Penyediaan dekorasi	12 Bulan	12 Bulan			
				1.13 Penyediaan bahan bakar kendaraan	26118 Liter	26118 Liter			
				1.14 Penyediaan upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%	100%			
				2.1 Pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	2 Unit			
				2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25 Sepeda Motor dan 22 Mobil	25 Sepeda Motor dan 22 Mobil			
				2.3 Pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				2.4 Pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				<b>3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	100%	100%			
				3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				3.2 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Laporan	4 Laporan			
				<b>4. Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	100%	100%			
				4.1 Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA SKPD (Renstra, Renja, RKA )	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>5. Program : Pengembangan Nilai Kebudayaan</b>	114 Upacara Keagamaan	114 Upacara Keagamaan	1. Dalam pengembangan seni dan budaya melalui ajang Festival baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten tidak dapat diselenggarakan karena adanya pandemi COVID - 19	1. Walaupun ajang festival seni dan budaya tidak terselenggara secara langsung, dengan perkembangan teknologi pementasan dapat dilaksanakan melalui Media Virtual.	
				5.1 Pelaksanaan lomba bahasa aksara dan sastra daerah Bali (nyastra Bali)	108 Orang	108 Orang			
				5.2 Pelaksanaan pesantian dan Malam Sastra Siwalatri dan Saraswati	35 Orang dan 3 Kali	35 Orang dan 1 Kali			
				5.3 Pembinaan sastra agama dan sastra daerah Badung	300 Orang	300 Orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.4	Peningkatan kegiatan keagamaan	25 Kegiatan	24 Kegiatan		
				5.5	Upacara Penganyaran	32 Upacara Keagamaan	32 Upacara Keagamaan		
				5.6	Pelayanan upacara yadnya bagi umat hindu di Kabupaten Badung	246 Sulinggih, 582 Pemangku	246 Sulinggih, 582 Pemangku		
				5.7	Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung	120 Kali	24 Kali		
				5.8	Peruman Sulinggih di Kabupaten Badung				
				5.9	Pelestarian dan pengembangan adat budaya bali di Kabupaten Badung	122 Bendesa, 546 Kelian Br. Adat	122 Bendesa, 546 Kelian Br. Adat		
				5.10	Pesta Kesenian Bali (PKB)	23 Sekaa	23 Sekaa		
				5.11	Pemberian penghargaan seni kerti budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun Mangupura				
				5.12	Kegiatan sekaa penabuh gong gargita budaya Kabupaten Badung	1 Sekaa	1 Sekaa		
				5.13	Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung	18 Sekaa			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.14 Festival seni budaya Kabupaten Badung di Kabupaten Badung					
				5.15 Pementasan seni budaya di Kabupaten Badung	7 Kali	4 Kali			
				5.16 Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung	122 Orang	122 Orang			
				5.17 Peningkatan Srada Bhakti bagi Wanita Hindu di Kabupaten Badung	60 Kali				
				5.18 Revitalisasi Kesenian langka	6 Sekaa				
				5.19 Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Kesenian	15 Barung	15 Barung			
				5.20 Peningkatan Kreatifitas Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	563 Sekaa Teruna dan Yowana	563 Sekaa Teruna dan Yowana			
				5.21 Penyediaan Upakara Panca Yadnya di Wewidangan Desa Adat seKabupaten Badung	704 Paket	704 Paket			
				5.22 Perayaan HUT Sekaa Teruna di	5 Sekaa	5 Sekaa			
				5.23 Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	498 Orang	438 Orang			
				5.24 Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali	1 kali	1 kali			
				5.25 Kreativitas seni Listibiya Kabupaten Badung	30 Sekaa	1 Sekaa			
				5.26 Pengadaan Insinye Sulinggih	10 Sulinggih	10 Sulinggih			
				5.27 Festival Seni Bali Jani					
				5.28 Pemilihan Bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa se Kabupaten Badung					
				5.29 Inventarisasi, Validasi dan Sosialisasi Jajar Kemiri Pura di Kabupaten Badung	80 SKT				

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.30 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung					
				5.31 Penghargaan pada Sanggar - Sanggar Seni dan kelompok penyelenggaraan kegiatan seni budaya tahun 2020					
				5.32 Pengadaan Perlengkapan Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di kabupaten Badung	15 Insinye	15 Insinye			
				5.33 Pemantauan Penegakan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Kelestarian Lingkungan Hidup (CHSE) dan Perubahan Perilaku Masyarakat di Kabupaten Badung menuju Pemulihan Sektor Pariwisata	3388 Orang	3388 Orang			
				<b>6. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	140 Cakep	140 Cakep			
				6.1 Pelestarian naskah kuno	30 kali, 15 lokasi	30 kali, 15 lokasi			
				6.2 Dokumentasi kekayaan budaya daerah	39 kegiatan	5 kegiatan			
				6.3 Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	3 cagar budaya				
				6.4 Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Badung					
				6.5 Pembuatan papan nama cagar budaya di Kabupaten Badung					
				6.6 Kajian dan sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	10 kajian cagar budaya				
				6.7 Pengumpulan Data Koleksi Museum dan Visualisasi Pelaksanaan Upacara Manuasia Yadnya	61 Desa Adat	24 Desa Adat			
				6.8 Operasional penyelenggaraan Museum	1 Paket	1 Paket			
				6.9 Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Daun Lontar dan Wasadhisastra					

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.28)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.626.289.497,88

adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 100%. pada perubahan anggaran 2020, pagu anggaran mengalami perubahan nilai. Pagu anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp.1.220.384.487,21 terealisasi sebesar Rp. 1.087.669.249,00. Secara presentase, capaian kinerja pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 77,28%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 452.880.000,00

Adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 100%. pada perubahan anggaran 2020, pagu anggaran mengalami perubahan nilai. Pagu anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp.237.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 209.349.600,00. Secara presentase, capaian kinerja pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 90,67%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 663.278.475,42

Adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 100%. pada perubahan anggaran 2020, pagu anggaran mengalami perubahan nilai. Pagu anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp.213.278.475,42 terealisasi sebesar Rp. 100.925.684,00. Secara presentase, capaian kinerja pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 47,32%.

d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.645.652,30

Adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 3 dokumen. pada perubahan anggaran 2020, pagu anggaran tidak mengalami perubahan nilai, dan terealisasi sebesar Rp. 10.164.872,00. Secara presentase, capaian kinerja pada program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah sebesar 87,28%.

e. Program pengembangan nilai budaya

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 247.893.027.666,36

Adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 114 upacara keagamaan. pada perubahan anggaran 2020, semua kegiatan mengalami perubahan nilai, bahkan ada kegiatan yang hilang pagu anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp.102.998.637.885,88 terealisasi sebesar Rp. 90.497.803.564,00 secara presentase, capaian kinerja pada program pengembangan nilai budaya sebesar 87,86%.



f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2020 sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.928.602.882,42

Adapun target kinerja dalam perjanjian Kinerja sebesar 100%. Pada perubahan anggaran 2020, pagu anggaran mengalami perubahan nilai. Pagu anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp.1.688.067.681,77, terealisasi sebesar Rp. 1.542.967.232,00. Secara presentase, capaian kinerja pada program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar 91,40%.

**Q. URUSAN KEARSIPAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.609.661.139 dan Realisasi sebesar Rp1.243.550.053 atau 77,26% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawahini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.29

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.29 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Mempercepat proses pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%			
				1.1 Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	1270 lembar	1270 lembar			
				1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 line/thn	10 line/thn			
				1.3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	1 paket	1 paket			
				1.4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket			
				1.5 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 pakrt			
				1.6 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1080 exp/bln	1080 exp/bln			
				1.7 Kegiatan makan dan minum	12 bln	12 bln			
				1.8 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 ls	1 ls			
				1.9 Kegiatan penyediaan dekorasi	1 jenis	1 jenis			
				1.10 Kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan	8670 liter	8525 liter			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.29

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.11 Kegiatan Penyediaan upacara keagamaan	13 jenis	13 jenis			
				1.12 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	27 kendaraan	27 kendaraan			
				<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	27 unit kendaraan	27 Unit kendaraan			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan	27 unit kendaraan			
				Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	1 paket			
				<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan penyusunan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah (AKIP)	4 dokumen	4 dokumen			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.29

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4 Program Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	3 dokumen	3 dokumen			
				Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, Renstra, RKA)	3 dokumen	3 dokumen			
				<b>5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	50 unit kerja	50 unit kerja	Hasil Pengawasan dan audit kearsipan pada Perangkat Daerah nilainya masih rendah	Di masing-masing Perangkat Daerah wajib memiliki tenaga pengelola kearsipan	
				<b>5.1 Kegiatan Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung</b>	50 unit kerja	50 unit kerja			
				<b>5.2 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	3 peraturan	3 peraturan			
				<b>5.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Pengolahan Arsip Statis</b>	15 orang	15 orang			
				<b>5.4 Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Kearsipan di Kabupaten Badung</b>	15 perangkat daerah	15 perangkat daerah			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.29

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	325 boks	325 boks			
				6.1 Kegiatan Penilaian Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip Yang di Bukukan	325 boks	325 boks			
				6.2 Kegiatan Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah			
				6.3 Kegiatan Pengakuisisian dan Preservasi Arsip Statis Perangkat Daerah	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah			
				<b>7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah			
				7.1 Kegiatan Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.29)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Terpenuhinya 100% pelayanan jasa adminitrasi keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Terpenuhinya 27 unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

3. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Terealisasi penyusunan laporan capaian kinerja selama 12 bulan

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Renstra, RKA)

5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- Terbinanya 50 unit kerja tentang pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

- Terdapat 325 box arsip In aktif dan arsip yang dibukukan

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- Terkelolanya arsip in aktif 1 Perangkat daerah

**III. URUSAN PILIHAN**

**A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DINAS PERIKANAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.929.358.466,02 dan realisasi sebesar Rp 9.439.573.101,72 atau 95,07 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.30



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.30 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Perikanan	1. Mengembangkan perikanan berdasarkan potensi wilayah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan			-
			2. Meningkatkan produksi produksi perikanan	1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan			
			3. Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26 kendaraan	26 kendaraan			
				1.3 Pelayanan jasa administrasi keuangan	500 materai, 5 buku cek	500 materai, 5 buku cek			
				1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	9 orang	9 orang			
				1.5 Penyediaan alat tulis kantor	32 item	32 item			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket		
				1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 kantor/ bangunan	5 kantor/ bangunan		
				1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	4 kantor/ bangunan	4 kantor/ bangunan		
				1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	576 exp/ bulan	576 exp/ bulan		
				1.10	Penyediaan makanan dan minuman	500 kotak	500 kotak		
				1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	1 LS		
				1.12	Penyediaan dekorasi	-	-		
				1.13	Penyediaan bahan bakar kendaraan	26 kendara	26 kendaraa		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.14	Penyediaan upacara keagamaan	5 bangunan	5 bangunan		
				2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	4 kantor/	4 kantor/ bangunan		
				2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	26 kendaraan	26 kendaraan		
				2.3	Pemeliharaan perlengkapan kantor	11 unit	11 unit		
				2.4	Pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	1 paket		
				2.5	Pembangunan BBI Baha	1 dokumen	1 dokumen		
				3.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>	<b>6 jenis dokumen</b>	<b>6 jenis dokumen</b>		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBUJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32 orang	32 orang		
				3.2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	130 exp	130 exp		
				4.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat</b>	<b>3 jenis dokume</b>	<b>3 jenis dokumen</b>		
				4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	60 exp	60 exp		
				5.	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>617 ton</b>	<b>624,53 ton</b>	1. Cuaca buruk cenderung terjadi pada awal tahun dan akhir tahun mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan.	1. Pada saat nelayan mengajukan surat permohonan rekomendasi BBM bersubsidi, petugas memberikan himbauan agar mengurangi aktivitas di musim cuaca

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.1 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	10 sampel	10 sampel			
				5.2 Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	26 petak	26 petak			
				5.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>6.816 ton</b>	<b>7.922,34 ton</b>			
				6.1 Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	1 unit	1 unit			
				<b>7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil</b>	<b>50 kelompok</b>	-			
				7.1 Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	50 kelompok	-			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	6.456 ton	6.480 ton			
				8.1 Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Ikan	50 orang	50 orang			
				9. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan			
				9.1 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	1 unit	1 unit			
				9.2 Sosialisasi Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Nelayan di	40 orang	40 orang			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.30)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Secara umum kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai dengan target kinerja. Namun ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi ataupun refocusing anggaran terkait adanya Pandemi Covid-19 mengacu Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 223 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 maka kegiatan yang berjalan memperhatikan skala prioritas.

#### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami refocusing anggaran terkait adanya pandemi Covid-19, beberapa kegiatan fisik seperti pengadaan sarana dan prasarana ditiadakan atau mengalami rasionalisasi. Sedangkan khusus untuk kegiatan Pembangunan BBI Baha berjalan sampai tahap perencanaan yaitu penyusunan DED BBI Baha, pembangunan fisik mengalami rasionalisasi anggaran dan ditunda ke tahun berikutnya.

#### **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan sesuai target kinerja. Pada program ini memiliki target 6 jenis dokumen diantaranya laporan kinerja (LKjIP), rencana aksi, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama

(IKU), rencana kinerja tahunan (RKT) dan review renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dapat tersusun tepat pada waktunya.

#### **Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**

Kegiatan pada Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berjalan sesuai target kinerja. Pada program ini memiliki target 3 jenis dokumen perencanaan seperti rencana kinerja (renja), rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). keseluruhan dokumen tersebut dapat tersusun tepat waktu.

#### **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan terdapat 3 (tiga) kegiatan dikarenakan mengalami rasionalisasi anggaran terkait adanya Pandemi Covid-19. Kegiatan yang berjalan antara lain Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan, Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras. Khusus pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras, pelaksanaan kegiatan hanya sampai pada tahap penyusunan dokumen perencanaan (DED), sedangkan pembangunan fisik mengalami rasionalisasi anggaran. Adapun target kinerja program ini yaitu produksi perikanan budidaya sebesar 617 ton dimana terealisasi sebesar 624,53 ton atau capaian kinerja sebesar 101,22%

#### **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Operasional PPI Diskan Kabupaten Badung dimana kegiatan ini mendukung dalam pengadaan bahan dan pangan di daerah pada sektor perikanan dengan berfokus pada pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan yang akan melaut sehingga mampu meringankan beban operasional nelayan. Pada program ini memiliki target kinerja berupa produksi perikanan tangkap sebesar 6.816 ton dan terealisasi sebesar 7.922,34 ton dengan capaian kinerja sebesar 116,23%.



**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil**

Pada program ini terdapat kegiatan Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok, namun dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.

**Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan**

Pada Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Ikan dimana kegiatan ini bekerja sama dengan Indonesia Chef Association (ICA) Badung, dilakukan bimbingan teknis penanganan mutu ikan untuk meningkatkan kemampuan kelompok pengolah ikan dalam mempertahankan kualitas ikan pasca panen. Pada program ini memiliki target kinerja jumlah hasil olahan hasil perikanan sebesar 6.456 ton dengan realisasi sebesar 6.480 ton dengan capaian kinerja sebesar 100,37%.

**Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata**

Pada Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata terdapat kegiatan Pembangunan Balai Kelompok Nelayan dan Sosialisasi Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Nelayan di Era "New Normal". Kedua kegiatan tersebut berjalan sesuai target kinerja dimana pembangunan balai kelompok nelayan sebanyak 1 (satu) unit pada kelompok Dharma Kanthi di kawasan Kelurahan Kedonganan dan sosialisasi keamanan, kesehatan dan keselamatan nelayan di era new normal dilakukan agar nelayan memahami dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19. Pada program ini memiliki target 1 (satu) kawasan dan terealisasi 1 (satu) kawasan atau mencapai 100%.

**B. URUSAN PARIWISATA**

**DINAS PARIWISATA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.889.698.466,96 dan realisasi sebesar Rp.19.263.862.808,00 atau 80.64% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.31

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.31 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pariwisata	1. Dinas Pariwisata	- Penyusunan data base DTW	1. <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%			
			-Pembanguna DTW Baru	1.1 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	600 lembar	600 lembar			
			- Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing DTW	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan			
			- Perbaikan manajemen pengelolaan DTW	1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	66 unit	66 unit			
			-Peningkatan SDM Pengelola DTW	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket			
			- Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata	1.5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket			
			-Kajian penyusunan data base industri pariwisata berbasis IT	1.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket			
				1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan			
			-Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan	1.8 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1 LS	1 LS			
			-peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1.9 Penyediaan Dekorasi	12 bulan	12 bulan			
				1.10 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	107100 liter	107100 liter			
				1.11 Penyediaan Upacara Keagamaan	12 bulan	12 bulan			
				1.12 Penganyaran dan persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	1 kali	-			
				1.13 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	12 bulan			
				1.14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 paket	1 paket		.....
				1.16	Pengelola Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan		.....
				<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>		
				2.1	Pengadaan Peralatan Kantor	16 unit	0		
				2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30 unit	0		
				2.3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit	0		
				2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	66 unit	67 unit		
				2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 paket	0		
				2.6	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket		
				2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	68 unit	68 unit		
				2.8	Pengadaan perlengkapan sarana proses pada pos balawista Badung	616 unit	300 unit		
				2.9	pemeliharaan pos balawista	24 pos	2 pos		
				2.10	pengecatan mobil ambulance	2 unit	2 unit		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

[illegible]

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.8	Branding and Tagline Pariwisata di Kabupaten Badung	100 buku	0.00		
				5.9	Taman Ayun Barong Festival	45 orang	0.00		
				5.10	Informasi Kepariwisata di Kabupaten Badung	12 bulan	12 bulan		
				5.11	Publikasi Aktivitas Kepariwisata Kabupaten Badung melalui Media Cetak	2 media cetak	2 media cetak		
				5.12	Pameran Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Badung	2 event	2 event		
				5.13	Analisa Pangsa Pasar Wisatawan Mancanegara dan Penguatan Strategi Promosi Pariwisata	1 paket	-		
				5.14	Pelaksanaan Verifikasi Kesiapan Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Badung Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019	116 usaha	116 usaha		
				5.15	Publikasi Kepariwisata di Kabupaten Badung dalam Era New Normal melalui Media Digital	1 publikasi	0.00		
				5.16	Indonesia Tourism Outlook 2021 di Kabupaten Badung	300 peserta	300 peserta		
				5.17	Gathering Kepariwisata : Implementasi Protokol Kesehatan CHSE Menuju Pariwisata Kabupaten Badung Berkualitas di Kecamatan Kuta Utara	150 orang	150 orang		
				5.18	Gathering Kepariwisata : Implementasi Protokol Kesehatan CHSE Menuju Pariwisata Kabupaten Badung Berkualitas di Kecamatan Kuta Selatan	150 orang	150 orang		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.19 Gathering Kepariwisata : Implementasi Protokol Kesehatan CHSE Menuju Pariwisata Kabupaten Badung Berkualitas di Kecamatan Kuta	150 orang	150 orang			
				5.20 Informasi Kepariwisata Kabupaten Badung Tentang Protokol Kesehatan CHSE	1 informasi	1 informasi			
				5.21 Pemulihan Kepariwisata Badung dalam Masa Pandemi Covid-19 melalui Program Explore Badung dengan mengutamakan Implementasi Protokol Kesehatan CHSE di Destinasi Wisata	1 program (3 Trip )	1 program (3 Trip )			
				6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100%	100%			
				6.1 Pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	6 kecamatan			
				6.2 Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal	1 desa wisata	1 desa wisata			
				6.3 Penataan desa wisata Sangeh Kec. Abiansemal	1 desa wisata	1 desa wisata			
				6.4 Rehab Berat Pos Balawista di Pantai Berawa	1 unit	1 unit			
				6.5 Monitoring dan Evaluasi Desa Wisata di Kabupaten Badung	5 desa wisata	5 desa wisata			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	4	5	6	7	8	9	10
		6.6 Penataan Desa Wisata Carang Sari Kec. Petang	1 desa wisata	1 desa wisata			
		6.7 Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung	1 kawasan	1 kawasan			
		6.8 Penataan Desa Wisata Mengwi Kec, Mengwi	1 desa wisata	1 desa wisata			
		6.9 Penataan Desa Wisata Pangsan Kec, Petang	1 desa wisata	1 desa wisata			
		6.10 Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait Kecamatan Kuta Selatan	1 unit	1 unit			
		6.11 DED Penataan Wisata Desa Alam Dedari di Desa Wisata Kuwum	1 dokumen	1 dokumen			
		6.12 Penataan Kolam Beji Taman Tirta Pada Era New Normal di Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	1 kolam beji	1 kolam beji			
		6.13 Kegiatan Padat Karya pada Tanjung Benoa I	1 lokasi	1 lokasi			
		6.14 Kegiatan Padat Karya pada Tanjung Benoa II	1 lokasi	1 lokasi			
		6.15 Kegiatan Padat Karya pada Ayung River	1 lokasi	1 lokasi			
		6.16 Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Healing Tanah Hyang	1 DTW	1 DTW			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.17	Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Klinik Sadha Jiwa	1 DTW	1 DTW		
				6.18	Stimulus Protokol CHSE pada Wisata Minat Khusus Paralayang Gunung Payung	1 DTW	1 DTW		
				6.19	Stimulus Protokol CHSE pad Wisata Minat Khusus Via Ferrata Malini Agropark	1 DTW	1 DTW		
				6.20	Stimulus Protokol CHSE pad Wisata Minat Khusus Royal Sporthorse Bali	1 DTW	1 DTW		
				6.21	Stimulus Protokol CHSE pad Wisata Minat Khusus Bali Swing	1 DTW	1 DTW		
				6.22	Stimulus Protokol CHSE pad Wisata Minat Khusus Penglukatan Air Panas Pinikit	1 DTW	1 DTW		
				6.23	Stimulus Protokol CHSE pad Wisata Minat Khusus Taman Bunga Belok/Sidan	1 DTW	1 DTW		
				6.24	Gerakan Era New Normal di Desa Wisata Munggu	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.25	Gerakan Era New Normal di Desa Wisata Carangsari	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.26	Gerakan Era New Normal di Desa Wisata Baha	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.27	Peduli Covid-19 di Desa Wisata Pangsan	1 desa wisata	1 desa wisata		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.28	Peduli Covid-19 di Desa Wisata Belok	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.29	Peduli Covid-19 di Desa Wisata Kapal	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.30	Peduli Covid-19 di Desa Wisata Petang	1 desa wisata	1 desa wisata		
				6.31	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Pantai Petitenget	1 DTW	1 DTW		
				6.32	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Alas Pala Sangeh	1 DTW	1 DTW		
				6.33	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Taman Ayun	1 DTW	1 DTW		
				6.34	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Air Terjun Nungnung	1 DTW	1 DTW		
				6.35	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Pantai Legian	1 DTW	1 DTW		
				6.36	Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Pantai Melasti	1 DTW	1 DTW		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6.37 Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa	1 DTW	1 DTW			
				6.38 Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu	1 DTW	1 DTW			
				6.39 Kegiatan Pelaksanaan Program Hibah Pariwisata di Kab.Badung	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>7 Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				7.1 Sertifikasi Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung	30 orang	0			
				7.2 Aksi dan Peningkatan Wawasan Kepariwisata Terkait Program Sapta Pesona di Kab. Badung	75 orang	75 orang			
				7.3 Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Badung	120 orang	0			
				7.4 Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya Kabupaten Badung	40 orang	0			
				7.5 Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang Kabupaten Badung	15 orang	15 orang			
				7.6 Pelatihan Pemandu Wisata Balawista Kabupaten Badung	58 orang	58 orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7.7	Pelatihan Pemandu Wisata Selancar Kabupaten Badung	40 orang	0		
				7.8	Pelatihan Pemandu Wisata Trekking Kabupaten Badung	40 orang	0		
				7.9	Pelatihan Homestay Kabupaten Badung	55 orang	55 orang		
				7.10	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Badung	55 orang	55 orang		
				7.11	Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata Kabupaten Badung	75 orang	0.00		
				7.12	Pelatihan CHSE Terhadap Anggota Balawista Kabupaten Badung	175 orang	175 orang		
				7.13	Pelatihan Pramuwisata Terkait Program CHSE Kabupaten Badung	75 orang	75 orang		
				7.14	Pelatihan Desa Wisata Terkait Program CHSE Kabupaten Badung	75 orang	75 orang		
				7.15	Pelatihan CHSE kepada anggota gahawistri Kabupaten Badung	150 orang	150 orang		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.31

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8 <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata</b>	100%	100%			
				8.1 Pembinaan dan Pengawasan usaha Industri Pariwisata	150 usaha	150 usaha			
				8.2 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	8 dtw	8 dtw			
				8.3 Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	3 kegiatan	0			
				8.4 Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	150 usaha	0.00			
				8.5 Pemutahiran Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	1 SIG	0.00			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.31)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pada Table 3.1.1.31 dapat dilihat target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2020, dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 pada Dinas Pariwisata ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan, baik Program Rutin maupun Program Prioritas.

**C. URUSAN PERTANIAN**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.511.005.233,30 dan realisasi sebesar Rp 11.752.543.589,00 atau 86,98% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel  
3.1.1.32

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.32 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan)

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39 rekening	39 rekening			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	159 kendaraan dinas	159 kendaraan dinas			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	50 buku	50 buku			
					1.350 Lembar	1.350 Lembar			
					180 Lembar	180 Lembar			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	21 Orang	21 Orang			
				Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Paket	9 Paket			
				Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	849 Eksemplar	849 Eksemplar			
				Penyediaan makanan dan minuman	20 kotak	20 kotak			
					3 kg	3 kg			
					6 kg	6 kg			
					3 kotak	3 kotak			
					30 Galon	30 Galon			
					66 dus	66 dus			



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Ls	1 Ls			
				Penyediaan dekorasi	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan bahan bakar kendaraan	38.676 Liter	38.676 Liter			
					1.344 Liter	1.344 Liter			
				Penyediaan upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
				Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1 orang			
				Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	1 Ls	-	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
					1 Paket	-			
				Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat					
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>			
				Pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	-	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Paket	4 Paket			
					1 Paket	1 Paket			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159 unit	159 unit			
				Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket			
					51 Unit	51 Unit			
				Pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	1 paket			
				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>			
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	3 Bulan	Adanya perubahan anggaran untuk skala prioritas		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
					1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	15 buku	15 buku			
					15 buku	15 buku			
				<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>110 orang</b>	<b>0</b>			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pelatihan Pemuda Tani	0 Orang				
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	0 gapoktan	0 Gapoktan	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung					
					15.000 biji	15.000 biji			
					63.900 Kg	63.900 Kg			
					10 Liter	10 Liter			
					8 Jenis	8 Jenis			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	180 Orang	0	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga pertemuan tidak dapat dilaksanakan		
				<b>Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>96,5</b>	<b>0</b>			
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	24 Kelompok	24 Kelompok	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	0 gapoktan				

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Peningkatan jalan usaha tani subak tirta amerta	1 Paket	0 Paket	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pelatihan operasional alsintan	0 Orang				
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Upaya khusus (UPSUS) pejalan dan peningkatan mutu intensifikasi (PMI) padi, kedelai	1 jenis laporan	1 jenis laporan	pertemuan tidak bisa dilaksanakan akibat adanya rasionalisasi anggaran		
				<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian</b>	<b>5 kali</b>	<b>0</b>			
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	0 Kali	0 kali	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	0 Kali				
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	7 jenis	7 jenis	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan pertemuan tidak dapat dilaksanakan		
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Peringatan hari kopi sedunia di Kabupaten Badung	0 Kali				
			Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor pariwisata	Publikasi Potensi Pertanian di Kabupaten Badung Dalam Menunjang Pariwisata Di Era New Normal Melalui Media Digital	1 Paket				

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>Program peningkatan produksi pertanian</b>	<b>130.000 ton</b>	<b>130.000 ton</b>			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0 kios				
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	700 Pohon	700 pohon	-		
					17.000 pohon	17.000 pohon	-		
					424 pohon	424 pohon	-		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	1 Paket				
			Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	Lomba Kelompok Wanita Tani	0 Kelompok				
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Pengembangan Tanaman Hortikultura	10 Ha	0 Ha	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	1,50 Ton	1,65 ton	0		
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	10 Orang	10 Orang	Belum optimalnya manajemen SDM dan pemasaran pada pengelolaan sentra peternakan rakyat		
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pengelolaan sentra ternak sobangan	25 Orang	25 Orang	Belum optimalnya SDM pengelolaam Sentra Ternak Sobatan		
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobatan	2.774.000 kg	2.334.555 kg	Belum optimalnya pengadaan pakan ternak dengan jumlah ternak sapi yang ada di sentra sobangan		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kaw asan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	0 Kelompok				
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Peraw atan Kandang dan Pemeliharaan Burung	7 unit	7 unit	masih ditemuinya sifat kanibalisme antara sesama burung		
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pasca Panen Pengolahan Kopi	0 Kelompok				
					0 Kelompok				
			Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Pengembangan Kebun Bibit Vanili					
					0 subak abian				
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pelatihan Pengeolahan Pangan Lokal bagi Kelompok Wanita Tani	30 Orang	30 Orang			
				<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan</b>	<b>45 orang</b>	<b>45 orang</b>			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan BPP Mengwi	43 are	0	Karena adanya perubahan skala prioritas anggaran		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan BPP Abiansemai	40 are	0	Karena adanya perubahan skala prioritas anggaran		
					40 are	0	Karena adanya perubahan skala prioritas anggaran		
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan BPP Petang	25 are	0	Karena adanya perubahan skala prioritas anggaran		
					43 are	0	Karena adanya perubahan skala prioritas anggaran		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Ururan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan BPP Kuta Utara	1 unit	1			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	57 Orang	57			
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	Pengelolaan BPP Mumbul	1 kecamatan	1			
				<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>28.428 ekor</b>	<b>3.400 ekor</b>			
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	0 Ekor	0	Pengendalian penyakit hew an tidak bisa dilaksanakan maksimal karena situasi copid- 19		
					0 Paket				
					1 Paket				
					0 Paket				
					23.500 Ekor				
					0 Ekor				
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hew an	50 sampel	50 sampel	Pengambilan sampel otak anjing dilakukan terbatas		
					0 sampel				
					0 sampel				
					0 sampel				
				<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>5 kelompok</b>	<b>0 kelompok</b>			
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan w aji bunting)	0 Kelompok				

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.32

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>	<b>24 Kelompok</b>	<b>0 kelompok</b>			
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Agribisnis Sentra Ternak Babi untuk Mendukung Desa Taman Badung sebagai Desa Ternak	0 ekor				
				Pelatihan Barista	25 Orang				
				<b>Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian</b>					
			Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung	Pelaksanaan cacah jiw a ternak	6 kecamatan	6 kecamatan	belum optimalnya akurasi pengambilan data cacah jiw a ternak		
			Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	0 buku				
			Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	750 plot				
				<b>Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh</b>	<b>714 sampel</b>	<b>444 sampel</b>			
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pemeriksaan bahan pangan hew ani	230 sampel	230 sampel	Pengambilan sampel bahan pangan asal hew an tidak dilaksanakan maksimal karena pandemi covid-19		
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hew an untuk Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	62 lokasi		Pemeriksaan AM-PM hew an Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan tidak dilaksanakan secara maksimal karena pandemi covid-19		
			Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	Pengelolaan UPT RPH Mambal	1 Paket	1 Paket			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.32)

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : target 110 orang, realisasi 0 orang, dikarenakan adanya perubahan skala prioritas anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pelatihan untuk petani mengalami penundaan dan akan diajukan pada Tahun berikutnya.
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian ; target 5 kali, realisasi 0 kali, dikarenakan semua kegiatan promosi pertanian dibatalkan dikarenakan masih adanya Covid-19, tetapi kami dari Dinas tetap berupaya untuk melaksanakan promosi produk pertanian melalui media elektronik dan media sosial seperti WA, FB dan Instagram.
3. Program peningkatan produksi pertanian : target 130 ton, realisasi 0 ton,. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan irigasi di beberapa Subak yang menyebabkan terjadinya tunda tanam yang berimbas kepada pencapaian target Indeks Pertanaman (IP).
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan ; Target 45 orang, realisasi 45 orang. Kegiatan terealisasi 100%.
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : target 28.428 ekor, terealisasi 3.400 ekor. Hal ini disebabkan karena:
  - adanya serangan yang diduga penyakit ASF pada Babi. Untuk menghadapi serangan ini kami dari Dinas berusaha untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan ternak keliling.



- Pengendalian penyakit hewan tidak bisa dilaksanakan maksimal karena situasi covid- 19.
6. Program Pengembangan Agribisnis ; target 24 kelompok, realisasi 0 kelompok. Hal ini disebabkan karena adanya skala prioritas anggaran sehingga masih perlu digali lebih lanjut potensi-potensi komoditi pertanian yang berorientasi agribisnis.
  7. Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian ; target 5 jenis data, realisasi 0. Hal ini disebabkan karena adanya skala prioritas anggaran sehingga Belum optimal akurasi pengambilan data cacah jiwa ternak, tetapi tetap dilaksanakan survey seperti metode sensus
  8. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh : Pengambilan sampel bahan pangan asal hewan tidak dilaksanakan maksimal karena pandemi covid-19.

**D. URUSAN PERDAGANGAN**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.201.682.490,- dan realisasi sebesar Rp. 1.923.593.778,- atau 87,37 % melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.33

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.33 Pelaksanaan Urusan Pilihan Pada Urusan Perdagangan ( Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perdagangan	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Membuka akses jaringan kerjasama	1. <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	100%	72,22%	Masih kurangnya kesadaran bagi pengusaha kecil untuk mencari informasi dan peluang pasar	Memberikan pelatihan pemasaran Online bekerjasama dengan Google, Tokopedia, Buka Lapak dengan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Besar	
				1.1 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	0 Perusahaan	0 Perusahaan			
				1.2 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	6 pasar	6 pasar			
				1.3 Pasar Murah	48 Pelaku Usaha	48 Pelaku Usaha			
				1.4 Pemantauan Harga Komoditi di konsumen dalam rangka Inpput Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	96 Kali	16 kali			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.33

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan</b>	100%	100%			
				2.1 Kajian Pasar Hgienis di Kabupaten Badung	0 Dokumen	0 Dokumen			
				2.2 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Geger Kabupaten Badung	96 Orang	96 Orang			
				2.3 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Peninsula Kabupaten Badung	50 Orang	50 Orang			
				2.4 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Melasti Kabupaten Badung	27 Orang	27 Orang			
				2.5 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Obyek wisata Jembatana Tukad Bangkung, Air Terjun Nung Nung, Kawasan Pura Sada Kapal	42 Orang	42 Orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.33

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.6	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Petang, Abiansemal dan Mengwi Kabupaten Badung	30 Orang	30 Orang		
				2.7	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung	34 Orang	34 Orang		
				2.8	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Pandawa Kabupaten Badung	158 Orang	158 Orang		
				2.9	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Uluwatu Kabupaten Badung	60 Orang	60 Orang		
				2.10	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Legian Kabupaten Badung	223 Orang	223 Orang		

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.33

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.11 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung	209 Orang	209 Orang			
				2.12 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Sangeh dan Taman Ayun Kabupaten Badung	145 Orang	145 Orang			
				2.13 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Nusa Dua Kabupaten Badung	96 Orang	96 Orang			
				2.14 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang-Padang Kabupaten Badung	39 Orang	39 Orang			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.33

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. <b>Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor</b>	100%				
				3.1 Pembuatan buku profil Pelaku dan Produk ekspor Kabupaten Badung	0 Buku	0 Buku			
				4. <b>Program Peningkatan Tertib Ukur</b>	100%	77,26%	Masih kurangnya personil Penerima untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang mempergunakan UTTP	Perlu adanya sosialisasi ke pengusaha dan masyarakat pengguna UTTP agar secara rutin menera/menera ulang UTTP-nya sesuai perundang-undangan yang berlaku dan untuk melindungi konsumen / masyarakat terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang yang tidak standar sehingga tercipta tertib ukur kalangan pengusaha dan masyarakat	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.33

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4.1 Verifikasi Alat Ukur Standar Kab. Badung	1 paket	1 paket	Rendahnya kesadaran masyarakat/ pengusaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat UTTP yang dimiliki	Memberikan pembinaan dan pendampingan agar pengusaha kecil/ bisa mengidentifikasi peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar	
				4.2 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	4.000 UTTP	2.181 UTTP			



3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.33)

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada urusan Pilihan ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan Program Prioritas pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Kegiatan :

- a) Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis.
- b) Pasar Murah.
- c) Pemantauan Harga Komoditi di Konsumen dalam rangka Input Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- d) Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Pelaksanaan program dengan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan 100%, terealisasi sebesar 72,22% untuk fisik program dan 78,01% untuk keuangan, hal ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

**2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri**

Kegiatan :

- a) Kajian Pasar Hgienis di Kabupaten Badung
- b) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Geger Kabupaten Badung
- c) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Peninsula Kabupaten Badung
- d) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Melasti Kabupaten Badung
- e) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Obyek wisata Jembatana Tukad Bangkung, Air Terjun Nung Nung, Kawasan Pura Sada Kapal
- f) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Petang, Abiansemal dan Mengwi Kabupaten Badung
- g) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pengelola Pasar di Kec. Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung
- h) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Pandawa Kabupaten Badung
- i) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Uluwatu Kabupaten Badung
- j) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Legian Kabupaten Badung
- k) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Kuta Kabupaten Badung
- l) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Sangeh dan Taman Ayun Kabupaten Badung
- m) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Nusa Dua Kabupaten Badung

- n) Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Para Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang-Padang Kabupaten Badung

Pelaksanaan program dengan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan untuk peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% untuk fisik program dan 85,78% untuk keuangan program.

**3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Kegiatan :

- a) Pembuatan Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor

Kegiatan pada program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

**4) Program Peningkatan Tertib Ukur**

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang .

- b) Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran yang dipergunakan membiayai kegiatan dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 77,26% untuk fisik program dan 98,04% untuk keuangan, Hal ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

**E. URUSAN PERINDUSTRIAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.404.744.695,43 dan realisasi sebesar Rp 10.520.816.310,00 atau 92,25%, melaksanakan program dan kegiatan sesuai tabel di bawah ini.

- 3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.34

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.1.34 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian ( Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perindustrian	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas UMKM yang kreatif dan berdaya saing pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	300 Industri Kecil dan Menengah (IKM)	86 Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. Keterbatasan pelaku IKM untuk mendapatkan pasokan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan berkualitas serta berkesinambungan/kontinyu	1. Memberikan pengetahuan ttg pemilihan bahan baku kpd pelaku IKM mll pembinaan dan pendampingan guna pemenuhan bahan baku yang diperlukan pelaku IKM	
				1.1 Pelatihan Keterampilan IKM	0	0			
				1.2 Pembinaan IKM	52 IKM	52 IKM			
				1.3 Penyusunan Kajian Naskah Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri di Kab.Badung	0	0	2. Kemampuan SDM pelaku IKM yang belum optimal	2. secara online dan juga offline yang berkelanjutan dengan melibatkan narasumber yang profesional dan berkompeten dibidang- nya, sehingga dapat meningkat- kan kemampuan dan keterampilan para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
				2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	100%			
				2.1 Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	1 Gugus	1 Gugus			

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.34

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Membuka Akses jaringan kerjasama	1. <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah</b>					
				1.1 Pendampingan IKM	20 IKM	20 IKM	3. Akses permodalan yang masih terbatas untuk mengembangkan usahanya	3. memfasilitasi pelaku IKM dlm mengakses bantuan modal baik bantuan permodalan dari pemerintah yang dikeluarkan dlm masa pandemi Covid-19 maupun akses permodalan program KUR dan juga program CSR serta program PKBL dari BUMN	
				1.2 Pengenalan Produk IKM	14 pelaku usaha	14 pelaku usaha	4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku IKM	4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan pelaku IKM melalui mentoring dan bintek shg dpt menjadi wirausaha yg tangguh dan punya fighting spirit dlm menjalani persaingan usaha	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.34

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5. Akses dan pemanfaatan teknologi modern yg belum optimal	5. Pengenalan dan pelatihan pemanfaatan teknologi modern baik teknologi informasi mp teknologi produksi dlm membantu pengembangan usaha pelaku IKM yg dilakukan scr online dan melalui pembinaan	
							6. Penciptaan dan pengembangan produk baru dlm mengatasi persaingan dan masa pandemi Covid 19 yg blm optimal	6. Bintek dan webinar dg berbagai stakeholder dlm upaya membuka wawasan pelaku IKM untuk mencari peluang dlm penciptaan dan pengembangan produk baru mengatasi persaingan dan jg mengatasi masa pandemi Covid-19 yg terjadi pd th 2020	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.34

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7. Rendahnya penyerapan produk yg dihasilkan IKM di tahun 2020 akibat pandemi Covid 19	7. - Melaksanakan promosi dan pengenalan produk IKM melalui pasar digital atau market palace selain juga melaksanakan pameran pasar gotong royong dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19 - Meningkatkan pemasaran berbasis jaringan kemitraan dan kerja sama antar IKM dan stkeholder terkait lainnya sehingga tercipta sistem pemasaran terintegrasi dalam jaringan pemasaran terikat	
							8. Penerapan protokol kesehatan dlm proses berproduksi dan pengelolaan usaha yang blm optimal	8. Pelatihan penerapan protokol kesehatan bagi pelaku IKM secara online dan scr offline shg dpt memahami dan mengaplikasikan dlm proses berproduksi dan pengelolaan usaha	



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Lanjutan Tabel 3.1.1.34

[illegible]

3.1.1. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.34)

3.1.2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tahun 2020 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi fisik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 78,57% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana antara lain : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; (pelaksanaan hanya pada triwulan I), Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura – Pura Kahyangan Jagat. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya penanganan terhadap pandemi covid 19 yang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam penerapan physical distancing/pembatasan kontak dekat. Pagu anggaran untuk kegiatan - kegiatan tersebut ditiadakan untuk penanganan pandemi covid 19 dan akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan situasi yang ada. Disamping itu juga disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan; Kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya

refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.

b. Program Peningkatan sarana dan Parasarana Aparatur

Realisasi fisik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 50 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : Pengadaan Perlengkapan Kantor; Pengadaan Peralatan Kantor; Pemeliharaan Perlengkapan Kantor; Kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan pelaksanaannya akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan memperhatikan situasi yang ada.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi

Realisasi fisik Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi sebesar 25 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target disebabkan karena kegiatan pendukung program tersebut tidak mencapai target yaitu : kegiatan Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak mencapai target disebabkan karena adanya refocusing

anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan pelaksanaannya akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan memperhatikan situasi yang ada.

- e. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah  
Realisasi Pelaksanaan Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.
- f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dari target penetapan kinerja sebanyak 300 IKM dapat terealisasi sebanyak 86 IKM, maka capaian kinerja 28,67%. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya seperti kegiatan pembinaan IKM, kegiatan pelatihan keterampilan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, kegiatan pendampingan IKM dan kegiatan pengenalan produk IKM yang anggarannya terkena rasionalisasi terkait dengan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.
- g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian kinerja 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut karena dukungan dari Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu yang pelaksanaannya dilakukan di Perusahaan Prima Collection dengan nama Gugus Prima Collection Maju

**II. KEBIJAKAN STRATEGIS**

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan Strategis yang ditetapkan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2020**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2	Penguatan Program Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020	Di Bidang Pangan : Menyediakan kecukupan Pangan bagi Masyarakat
3	Penguatan Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020	- Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas - Meningkatnya partisipasi sekolah pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar - Meningkatnya jumlah guru bersertifikat pendidik - Tersedianya sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dengan berkondisi baik
4	Penguatan Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020	Memberikan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Badung, dengan harapan meningkatnya kesejahteraan pekerja di Kabupaten Badung
5	Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan	Perda Nomor 5 tahun 2020	- Melaksanakan Upacara Keagamaan Dengan Protokol Kesehatan yang ketat Dengan harapan kegiatan bisa berlangsung dan tingkat Kesehatan masyarakat tetap terjaga.

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			- Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali secara virtual. Dengan tujuan seniman tetap bisa berkarya dan Kesehatan juga tidak terabaikan.
6	Penguatan Bidang Pariwisata	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020	- meningkatnya DTW yang berdaya saing dan berkelanjutan - meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara - meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian; dan - meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari - melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam Daerah, luar Daerah maupun luar Negeri - melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media
7	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020	Peninjauan tarif Pajak Parkir dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung (pelaksanaan ditunda mengingat situasi Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat)
8	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020	Peninjauan tarif Pajak Hiburan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung (pelaksanaan ditunda mengingat situasi Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat)

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
9	Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan tempat rekreasi dan olahraga air yang berdaya saing dan berkelanjutan</li> <li>- Meningkatkan kontribusi tempat rekreasi dan olahraga air (RHU) terhadap PAD Badung</li> </ul>
10	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020	Merupakan Laporan dibuat sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 sesuai ketentuan yang berlaku
11	APBD TA 2020	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Daerah APBD Menjadi Dasar Untuk Dapat atau Bisa Melaksanakan Pendapatan Dan Juga Belanja Daerah Ditahun Bersangkutan
12	APBD TA 2021	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021	Peraturan Daerah APBD Menjadi Dasar Untuk Dapat atau Bisa Melaksanakan Pendapatan Dan Juga Belanja Daerah Ditahun Bersangkutan
13	Road Map Repromasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019-2021	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020	Pedoman dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
14	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha industri pariwisata
15	Penataan dan pembinaan Pasar Perbelanjaan toko Swalayan	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020	Tujuannya untuk mengatur jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat karena semakin menjamurnya jumlah toko swalayan

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
16	Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020	Memberikan kepastian hukum dalam susunan organisasi dan Tata Kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi RSD Mangusada yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
17	Uraian Tugas Dinas	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020	Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas.
18	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Penagihan dan Kedaluarsa Retribusi Pelayanan Tera.	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020	Jika dalam waktu 14 hari para wajib terabelum memenuhi kewajiban untuk pembayaran Retribusi setelah adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, maka petugas pemungut langsung mendatangi wajib tera tersebut.
19	Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya</li> <li>- Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu</li> <li>- Memberi kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik</li> <li>- Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusi).</li> </ul>
20	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemkab. Badung	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan informasi/konten</li> <li>- Mempermudah dalam surat menyurat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik (TTE)</li> </ul>



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
21	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya kepada PNS yang bersumber dari APBD	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020	Sesuai ketentuan PP No 24 Tahun 2020 seluruh PNS diberikan THR maka perlu ditetapkan PERBUP Petunjuk Teknis Pemberian THR
22	Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020	Pemberian pengurangan secara jabatan dalam proses perhitungan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak. Tujuannya agar tidak terjadi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan secara signifikan yang dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.
23	Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020	Untuk memenuhi persyaratan penetapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung
24	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020	Sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan minimal yang harus didapatkan oleh masyarakat.
25	Penetapan NJOP PBBP (Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wilayah Badung Utara dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wilayah Badung Selatan)	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan NJOP PBB P2 wilayah Badung Utara dan Badung Selatan, sesuai hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penetapan NJOP Tahun 2020, bahwa Penetapan NJOP PBB P2 cukup dengan Keputusan Bupati Badung. Pada Tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian NJOP PBB P2 dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 233/052/HK/2020 tentang Penetapan NJOP PBB P2 Wilayah untuk Badung Utara dan Keputusan Bupati Badung Nomor 234/052/HK/2020 tentang Penetapan NJOP PBB P2 Wilayah untuk Badung Selatan.

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
26	Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020	Sebagai pedoman pembagian dan penggunaan Dana Desa
27	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak daerah dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020	Merupakan Insentif Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Badung khususnya dalam rangka penanganan dampak ekonomi Covid 19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
28	SOP pada Bapenda / Pasedahan Agung	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020	Melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan Daerah/Paseahan Agung Kabupaten Badung, karena adanya penyempurnaan dan pembaharuan SOP.
29	Tatacara Pemberian Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan teras/ Tera Ulang	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020	Untuk memberi keringanan tenggang waktu kepada wajib tera apabila pada saat pelaksanaan tera
30	Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020	Sebagai pedoman pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
31	Pendistribusian dan Teknis Penyaluran Benih Ikan Produksi UPT Balai Ikan Kabupaten Badung	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020	Memberikan kemudahan akses operasional bagi pelaku usaha budidaya perikanan
32	Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020	Sebagai pedoman pengadaan barang/jasa di Desa
33	Remunirasi Pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020	Sebagai dasar untuk memberikan Remunerasi kepada Pegawai BLUD UPTD Puskesmas

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
34	Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Pelayanan Dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020	Sebagai dasar dalam memberikan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Pelayanan Dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
35	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020	- Memberikan Kepastian Hukum secara teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.  - Memberikan Dukungan dalam peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
36	Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Badung No. 71 Th 2014	Mengurangi / menghilangkan dampak buruk dari asap rokok pada: fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat lain
37	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020	Mengurangi / menghilangkan dampak buruk dari asap rokok pada: fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat lain
38	Pengelolaan Pertamanan	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020	- Meningkatkan estetika di Kabupaten Badung - Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Badung

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
39	Masterplan Agro Techno Park Di Kec. Petang	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020	Agar ada kepastian hukum / payung hukum untuk kawasan Agro Techno Park. Karena kegiatan ini tidak untuk jangka waktu pendek, sehingga dengan adanya Perbup ini akan ada dasar hukum utk melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu yang panjang
40	Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghimbau masyarakat umum agar selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu pakai masker bila melakukan aktifitas di luar rumah</li> <li>- Selalu menghindari kerumunan atau jaga jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang sering dilakukan masyarakat</li> <li>- Memberikan sanksi denda kepada masyarakat atau usaha yang tidak mematuhi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020</li> </ul>
41	Pelaksanaan Pengembangan Program Krama Badung Sehat Melalui Penerapan Aplikasi Personal Health Record	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020	Sebagai lentera untuk nakes dalam penanganan kasus yang urgensi terutama pada pasien yang tidak sadarkan diri.
42	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan</li> <li>- Memberikan kepastian Hukum tugas kepala lingkungan dalam membantu lurah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
43	Pembentukan Gerai Pelayanan Publik Di Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keterjangkauan, Keamanan, dan Kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan</li> <li>- Memperluas cakupan dan jenis penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan</li> <li>- Kolaborasi dan kerjasama pelayanan antar penyelenggara pelayanan publik sehingga menjadi One Stop Service di tingkat kecamatan</li> </ul>
44	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020	Tercapainya Standar Biaya sebagai pedoman dalam melakukan proses perencanaan Penyusunan Anggaran sehingga efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
45	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020	Maksud disusunnya Pola Karier yaitu untuk menjamin kepastian arah Pengembangan Karier PNS di Pemerintah Daerah, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki
46	Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Oleh Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pusat di Daerah</li> <li>- Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Publik di Daerah</li> </ul>
47	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Bantuan Sosial	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020	Penerima bantuan Sosial harus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
48	Pedoman Penyusunan APBD Kab. Badung TA 2021	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020	Tersusunnya APBD Badung Sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2020

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
49	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020	Menurunkan beban penyakit , Menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan,meningkatkan produktifitas penduduk, menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan
50	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020	Sebagai pedoman penyusunan APBDes Tahun 2021
51	Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Pelayanan Dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020	Sebagai Dasar untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019
52	Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TA 2020	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020	Melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, menyesuaikan dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.
53	Tatacara Penagihan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020	Melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, dengan adanya perubahan pada jangka waktu Surat Teguran, pemasangan spanduk dan penyitaan serta penyegeralan.

**III. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2019. Tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap Rekomendasi DPRD Kabupaten Badung yang diberikan pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Badung tahun 2019**

No .	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
<b>I. Kebijakan Pemerintah Daerah</b>				
<b>1. Pendidikan, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.</b>				
a.	Dewan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung meneruskan program beasiswa kepada anak yang tidak mampu dan yang memiliki prestasi sampai jenjang perguruan tinggi (baik strata 1, strata 2 dan strata 3)	Sesuai Dengan Perbup No 70 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu dimana proses ini sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati yang jumlahnya SD Rp. 1.500.000, SMP Rp. 2.000.000 dan Mahasiswa Perguruan Tinggi S1/D4 Rp. 7.500.000	Meringankan beban orang tua siswa atau mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu terhadap biaya pendidikan, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat khususnya dikabupaten badung serta mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan daya saing daerah dan kemajuan pembangunan di	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			Kabupaten Badung namun terkait dengan biaya-biaya S2 dan S3, masih kami menunggu kajian dan Koordinasi dengan Instansi terkait fan dengan Instansi terkait dikarenakan jenjang ini belum terealisasi.	
b.	Untuk meningkatkan mutu, akses dan daya saing sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun sejalan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Bali dan salah satu Program Pemerintah Pusat yaitu NAWACITA	Berdasarkan Nawacita no. 5 dari Bapak Presiden Jokowi Dodo meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia program Indonesia dan Indonesia sejahtera	Agar supaya masyarakat seluruh Indonesia menonjolkan pendidikan dari jenjang SD dan SMA dengan gratis serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-Sektor strategis ekonomi domestic.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
c.	Pelaksanaan Program Pemasangan Wifi Gratis di Kabupaten Badung secara umum sudah berjalan dengan baik, menurut hemat kami pemasangan wifi lebih ditingkatkan hingga ke desa yang belum terakses oleh wifi/internet	Mengusulkan pengembangan penyediaan layanan akses internet di banjar/lingkungan, puskesmas, sekolah dasar, sekolah menengah pertama	Meningkatkan layanan akses internet bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Badung agar dapat dipergunakan secara optimal	Dinas Kominfo



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

d.	Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Badung melakukan kajian dan sosialisasi sistem <i>online</i> tentang zonasi terkait penerimaan peserta didik baru di sekolah. masih banyak siswa tidak mendapatkan sekolah sesuai zonasi, dikarenakan wilayah yang padat penghuninya tidak sesuai dengan jumlah sekolah, sehingga perlu sosialisasi secara simultan tentang sistem <i>online</i> penerimaan peserta didik baru dan pendirian unit sekolah baru.	Sesuai dengan peraturan Kemendikbud Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB dimana pelaksanaan PPDB belum dilaksanakan secara optimal di seluruh daerah dengan itu perlu adanya tata cara penerimaan PPDB pada tingkat SD dan SMP belum dapat mengakobodir perkembangan kebutuhan layanan Pendidikan di masyarakat, untuk itu dengan jumlah dan zonanya sudah barang tentu ada perbedaan pendukung dengan sekolah dimana sona yang dipakai adalah zona desa atau kelurahan kadang-kadang di satu sisi sekolah ada yg tidak dapat murid karna pendukung sekolah ada di perbatasan wilayah, desa pendukung yg kurang atau tidak ada muridnya untuk itu kami sudah bekerja sama dengan komimfo terkait dengan ini apapun	Agar supaya tidak terjadi penumpukan atau kelebihan siswa maka diatur dengan jalur apirmasi, jalu prestasi, dan jalur perpindahan orang tua yang sesuai dengan sona sekolah pendukung. Maka dari itu setiap satuan pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dari unsur satuan pendidikan sebagai panitia untuk kelancaran pelaksanaannya yang berkoordinasi dengan kelian dinas, kaling kepala desa/perbekel/lurah untuk bersama-sama membuat antara satuan pendidikan suatu keputusan tentang sona, jalur lingkungan local sesuai dengan daya tamping satuan pendidikan setempat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
----	---	---	---	---------------------------------------

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		masalah yg muncul terkait dengan zona		
e.	Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Badung membuat regulasi terkait <i>full day school</i> agar ada kepastian atau payung hukum dalam melaksanakan program ini. oleh karena sebagian besar sekolah swasta maupun negeri sudah menerapkan <i>full day school</i>	Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dimana pasal 2 berisi ayat; hari sekolah selama 8 jam sehari dimana system pendidikan sekolah dilakukan seharian penuh dimana anak-anak memiliki jadwal belajar dari pagi hingga sore hari sekolah mengadaptasi system belajar di rumah, dimana murid diberikan istirahat untuk makan dan bermain di sela waktu belajar sekolah yang telah melaksanakan fullday skol adalaah SMP 2 Kuta, SMP 4 Abiansemal, SD 1 Seminyak, SD 1 Legian, SD 2 Legian, SD 3 Legian	Memberikan Program pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah dimana proses belajar mengajar dengan jadwal seharian penuh dsari pagi pukul 07.00- 15.00 wita dari sini juga mengatur jadwal mata pelajaran dan pendalaman, Akibat pandemi covid 19 sekarang acara pembelajaran fullday scool tidak bisa dilanjutkan karna wilayah badung kerna zona merah (PSPB)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>2. Kesehatan</b>				
a.	Dewan mendorong Pemerintah Kabupaten Badung segera membuat kerjasama dengan Rumah Sakit Univ. Udayana di Jimbaran, dalam rangka peningkatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memberikan dana hibah sebesar Rp.55.409.454.140, 65 tahun 2018	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	<p>pelayanan bagi masyarakat Badung Selatan dan menjadikan <i>Badung International Hospital</i>, (rumah sakit berstandar internasional untuk <i>tourism</i>/ pariwisata).</p>			
b.	<p>Pengendalian terhadap penyakit menular perlu dioptimalkan peran dan fungsi petugas jumentik yang tersebar di setiap banjar, dengan upaya melakukan pemetaan penyakit dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penyelidikan epidemiologi dan juga sebagai alat bantu untuk memantau kondisi daerah terhadap penyakit tersebut.</p>	<p>Aplikasi pelaporan untuk petugas jumentik sudah dilakukan namun masih dalam proses penyempurnaan dan penyesuaian agar hasil output lebih optimal</p>	<p>Data yang diperoleh / didapat secara real time</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
c.	<p>Peningkatkan peran pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dalam pengendalian dan penanganan penyakit menular</p>	<p>Kegiatan Monev Terintegrasi untuk menular melalui dana DAK</p>	<p>Untuk meningkatkan peran Puskesmas ( Promotif , Preventif dalam pengendalian penyakit menular</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
d.	<p>Melakukan pengkajian terhadap penurunan jumlah pasien di RSUD</p>	<p>- Mengusulkan pembangunan RS kls C di daerah yang jangkauan</p>	<p>- Meningkatkan Akses masyarakat terhadap</p>	<p>RSUD</p>

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	<p>Mangusada, karena kemungkinan adanya penurunan disebabkan oleh faktor pasien yang cenderung memilih rumah sakit swasta terdekat dengan tempat tinggal yang melayani jaminan kesehatan nasional. oleh karena itu, penting memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan jumlah rumah sakit daerah di Kabupaten Badung</p>	<p>pelayanan agak jauh dari RSUD Mangusada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses jaringan dan kualitas internet antar Faskes</li> </ul>	<p>pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas rujukan dan rujukan balik pasien</li> </ul>	
e.	<p>Melakukan pengkajian terhadap penurunan jumlah pasien di RSUD Mangusada, karena kemungkinan adanya penurunan disebabkan oleh faktor pasien yang cenderung memilih rumah sakit swasta terdekat dengan tempat tinggal yang melayani jaminan kesehatan nasional. oleh karena itu, penting memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan jumlah rumah sakit daerah di Kabupaten Badung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan pembangunan RS kls C di daerah yang jangkauan pelayanan agak jauh dari RSUD Mangusada</li> <li>- Peningkatan akses jaringan dan kualitas internet antar Faskes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas rujukan dan rujukan balik pasien</li> </ul>	RSUD

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

f.	Melengkapi alat medis untuk menguatkan pelayanan masyarakat lebih luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap layanan yg sudah ada, mengusulkan alat Kesehatan.</li> <li>- Terhadap layanan baru, segera mengusulkan alat kesehatan</li> </ul>	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	RSUD
<b>3. Pembangunan Ekonomi</b>				
a.	Dewan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan modal kerja kepada industri rumah tangga, umkm, minimal senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)		Kami sependapat dengan saran Dewan terkait dengan pemberian bantuan modal kerja kepada IKM dan UKM sebesar Rp. 5.000.000 untuk melindungi dan memulihkan UMKM ditengah pandemi Covid 19. UMKM memiliki peranan penting dalam pertahanan perekonomian bangsa untuk itu dipandang perlu segera merumuskan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan anggaran</li> <li>2. Kriteria penerima bantuan modal kerja apakah dengan dana bergulir.</li> </ol>	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
b.	Pemerintah Kabupaten Badung agar segera melakukan investasi daerah/	Telah dilaksanakan kajian pembentukan BUMD Agro Techno Park (ATP) bekerjasama	Untuk mengelola kawasan ATP	Bagian Ekonomi

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	pengembangan usaha melalui BUMD	dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana		
c.	Segera melakukan <i>saving/</i> cadangan keuangan daerah dan ditempatkan melalui penyertaan modal di PT. BPD Bali atau dalam bentuk surat berharga lainnya	Hal ini belum bisa kami tindak lanjuti mengingat kondisi keuangan daerah serta pandemi Covid 19 yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Hal ini menyebabkan PAD Badung menurun drastis.	Hal ini sebenarnya telah dilakukan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif akan menyertakan modal kepada Bank BPD Bali sesuai dengan Perda penyertaan modal kepada BPD Bali nomor 2 tahun 2015 akan menyertakan modal kepada Bank BPD Bali	BPKAD
d.	Mendorong Pemerintah Kabupaten Badung agar segera menyelesaikan kewajiban penyertaan modal ke PT BPD Bali sesuai dengan penyertaan yang telah disepakati, dimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas	Telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK Bupati NO 2196/01/HK/2015 tentang penyertaan modal	Kami sepakat apa yang menjadi usul saran dewan terkait percepatan penyertaan modal kepada Bank BPD Bali sesuai perda Kabupaten Badung Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, Namun untuk sementara ini hal ini belum bisa	BPKAD

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	Bank Pembangunan Daerah Bali		dilakukan krn adanya vandemi copid 19 shg pendapatan menurun sangat tajam semoga hal ini segera pulih kami berjanji kalau di perubahan ini PAD meningkat maka kami akan segera melakukan investasi berupa penyertaan modal kepada Bank BPD Bali	
e.	Pembangunan Ekonomi dengan cara membagi 3 (tiga) wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi di wilayah badung, <b>perlu dipertimbangkan membuat data statistik maupun laporan kinerja dibidang pembangunan secara rinci dari masing-masing wilayah,</b> untuk melihat gambaran kemajuan dan pemerataan pembangunan bidang ekonomi antara wilayah Badung Utara, Tengah dan Selatan, maka perlu data i-o ( <i>input-output</i> ) dari masing-masing sektor usaha yang ada sesuai	Diawali dengan review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing kecamatan dan sudah ditindaklanjuti dengan RDTR Kecamatan Kuta selatan sudah menjadai PERDA (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2018 ) tentang RDTR DAN PZ KECAMATAN KUTA SELATAN 2018-2038, Rancangan RDTR Kec. Kuta dan Kuta Utara masih tahap persetujuan substansi dari kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI serta Rancangan RDTR Kec. Mengwi Abiansema dan Petang sedang menunggu	Mereview perkembangan potensi wilayah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing kecamatan.	Bappeda

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	pembagian wilayah, antara lain wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan.	rekomendasi dari Gubernur Bali.		
f.	Pemerintah Kabupaten Badung sebaiknya <b>melakukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan update data BPS Kabupaten Badung agar data dapat diterbitkan sebelum LKPJ Bupati Badung disampaikan kepada Legislatif. termasuk data laju inflasi</b> tanpa harus menginduk kepada kota Denpasar. sehingga data statistik tersebut dapat menjadi salah satu barometer lkpj	Pemerintah Kabupaten Badung sudah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kab Badung terkait persyaratan untuk ditetapkan sebagai kota yang dihitung angka inflasinya atau ditetapkan sebagai kota sampel Indek Harga Konsumen (IHK). Penjelasan dari BPS : Penetapan Kab/Kota yang dihitung angka inflasinya atau ditetapkan sebagai Kota IHK ditetapkan oleh BPS RI dan saat ini ditetapkan sebanyak 90 Kab/Kota sebagai kota IHK. Pertimbangan ditetapkan sebagai kota IHK : 1) Kab/Kota tempat lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia. 2) Survey Biaya Hidup (SBH) pada Kab/ Kota	Mendapatkan informasi suatu Kab/Kota ditetapkan sebagai kota sampel IHK atau dihitung angka inflasinya.	Bagian Ekonomi



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>tsb sudah ditetapkan.</p> <p>3) Lokasi Kab/Kota tsb jauh dari Kab/Kota yang sudah ditetapkan sebagai kota sampel IHK.</p> <p>Kab/Kota di Provinsi Bali yang sudah ditetapkan sebagai kota sampel IHK atau yang dihitung angka inflasinya adalah Denpasar dan Singaraja, sedangkan Badung tidak ditetapkan sebagai kota IHK, karena lokasinya berdekatan dengan kota Denpasar.</p> <p>Apabila Kabupaten Badung merencanakan untuk ditetapkan sebagai kota IHK, maka harus atas persetujuan dan penetapan dari BPS RI.</p>		
g.	<p>Pemerintah Kabupaten Badung perlu memikirkan strategi dari aspek kebijakan, pembinaan dan payung hukum yang jelas supaya partisipasi masyarakat UMKM dan warung-warung</p>	<p>Dari 46 Desa yang telah mempunyai Bumdesa, 38 Bumdesa yang bergerak di usaha perdagangan melayani kebutuhan warung-warung di desa/masyarakat desa maupun</p>	<p>Dalam rangka mengoptimalkan peran Bumdes diperlukan komitmen bersama baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk bersama-sama</p>	<p>Dinas PMD</p>

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	<p>tradisional di pedesaan tetap mampu bertahan dan bersaing dengan hadirnya mini market modern. meningkatkan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pertumbuhan baga usaha padruwen desa adat (Bupda), dengan memberikan suntikan bantuan dana cuma-cuma maupun berupa modal bergulir. sehingga mampu berefek kepada peningkatan ekonomi kerakyatan di masing-masing desa dinas maupun desa adat</p>	<p>kebutuhan pemerintah desa. Seiring dengan pelayanan juga melakukan kerjasama bermitra dengan Pihak ke-3 (tiga) dan telah membentuk perkumpulan bersama Bendesa se Badung dalam Rangka mengoptimalkan usaha perdagangan Bumdes/supermarket desa.</p>	<p>memanfaatkan keberadaan dan usaha Bendesa untuk memenuhi pelayanan dalam kebutuhan masyarakat. Masalah yang diselesaikan : mendekatkan pelayanan dalam kebutuhan perekonomian masyarakat di desa.</p>	
h.	<p>Untuk menyelamatkan keberadaan LPD yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, maka perlu ada himbauan melalui otoritas pemerintah daerah agar mengeluarkan surat resmi tentang pemberian keringanan dan relaksasi kepada debitur (peminjam) atas pembayaran cicilan dan pemberian pembebasan bunga</p>	<p>Pemerintah Kab Badung sudah berkoordinasi dengan LPLPD. LPLPD Provinsi Bali telah menerbitkan surat himbauan Nomor 24/LPLPD.B/III/2020</p>	<p>Antisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan UMKM</p>	<p>Bagian Ekonomi</p>

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	selama masa pandemic			
<b>4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				
a.	Kepada seluruh ASN agar memahami tupoksi dan mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi dengan meningkatkan penggunaan sistem teknologi informasi; meningkatkan disiplin dan menjaga kode etik ASN	Mengadakan pembinaan ke masing-masing OPD terkait disiplin dan kode etik ASN dan memaksimalkan tim Smart City yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dengan koordinasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.	Bagi ASN yang melakukan pelanggaran Disiplin dan kode etik sudah ditindak/dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada.	BKPSDM
b.	Mendorong Pemerintah Kabupaten Badung memperhatikan asn yang memiliki jabatan fungsional; memberikan apresiasi/ <i>reward</i> bagi asn yang berprestasi setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten Badung	Mengadakan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN (Rapat Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dengan menghadirkan narasumber dari BKN Pusat dan Kanreg X BKN Denpasar yang diikuti oleh Pejabat Fungsional dan perwakilan dari masing-masing perangkat daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan sosialisasi mengenai jabatan fungsional tertentu mengingat di Kabupaten Badung terdapat 88 jenis Jabatan Fungsional dan baru terisi 34 jenis (Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2017 tentang Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung);</li> <li>- Mendorong ASN di Lingkungan Pemerintah</li> </ul>	BKPSDM

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			<p>Kabupaten Badung untuk berkarier dalam Jabatan Fungsional Tertentu dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kaya fungsi dengan struktur organisasi yang datar/flat yang juga merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>- Mengajukan kajian kepada TAPD untuk dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pejabat fungsional sehingga dapat menarik minat ASN untuk dapat duduk dalam jabatan fungsional.</p>	
c.	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Badung agar meningkatkan standar pelayanan minimal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. agar tercapainya kepuasan pelayanan</p>	a) Koordinasi yang intensif antar instansi / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar kedepannya dalam penyusunan Laporan	<p>Dalam pengumpulan data laporan standar pelayanan minimal (SPM) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, data pendukung atau kertas kerja dari Perangkat Daerah sudah lengkap dan tepat</p>	Bagian Tata Pemerintahan

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	yang di terima oleh masyarakat Kabupaten Badung; walaupun dalam menghadapi pandemi covid-19 melalui <i>Work From Home</i> (WFH)	Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat lebih baik serta tepat waktu ; b) Sosialisasi kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, sehingga memahami arti pentingnya Standar Pelayanan Minimal.	waktu dari yang ditentukan	
d.	Mendorong Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah agar meningkatkan nilai LKIP dari BB menjadi A	Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai LKIP dengan langkah-langkah antara lain : 1. Bimbingan Teknis SAKIP (pohon kinerja) terhadap seluruh pejabat structural di Kabupaten Badung. 2. Pembentukan Tim Peningkatan kinerja dan SAKIP Pemerintah Kabupaten Badung	1. Seluruh pejabat structural memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang SAKIP 2. Meningkatnya koordinasi dan percepatan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah	Bagian Organisasi
<b>5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman</b>				
a.	<i>Performance</i> Bidang Infrastruktur masih perlu ditingkatkan,	Telah diupayakan melakukan kajian dan kerjasama	Masalah Pembiayaan yang menjadi kendala	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	dengan menyediakan Public Goods terutama di kawasan yang menjadi <i>Icon Destination</i>	untuk pembangunan jalan lingkar Selatan Kabupaten Badung yang akan menjadi icon pariwisata Badung disamping untuk memperlancar akses destinasi wisata Badung selatan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	pembangunan akan dapat teratasi melalui Skema KPBU, dimana telah ditandatanganinya kesepakatan induk antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah Kabupaten Badung Tanggal 10 Agustus 2020 tentang penyediaan Fasilitas Penyiapan proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan kabupaten Badung	
b.	Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 meliputi Program Lingkungan Sehat Perumahan, beberapa saluran gorong-gorong di kawasan pemukiman seluruh badung perlu dipetakan dan dibuat skala prioritas dengan baik sehingga tercipta lingkungan sehat	Telah ditindaklanjuti melalui Kegiatan Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman (termasuk database gorong – gorong /saluran drainase) pada tahun 2020, namun akibat adanya refokusing anggaran sehingga belum dapat terealisasi, dan telah diusulkan kembalinya penganggarnya pada tahun 2021, namun belum bisa dimasukkan pada APBD 2021.	Pemetaan/ Database gorong – gorong/ saluran drainase di Kabupaten Badung	Dinas Perkim

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

c.	Terkait persoalan sampah yang belum teratasi secara paripurna, maka setiap perumahan dan kawasan pemukiman hendaknya dirancang Fasos dan Fasum yang sekaligus terdapat ruang pengelolaan sampah mandiri (sebagai tambahan sarat bagi pengembang untuk melengkapi AMDAL/UPL-UKL dengan tempat pengelolaan sampah setempat/mandiri, TPSS). mendorong pemerintah meningkatkan pembiayaan di bidang kebersihan lingkungan, banjar dan desa sehingga wilayah badung benar-benar bersih, rapi dan nyaman khususnya dari sampah plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pemilahan sampah di sumbernya sebagai implementasi dari Pergub Bali No. 97 Tahun 2019 dan Perbup No. 47 dan 48 tahun 2018</li> <li>- telah dilakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPST Mengwitani ± 9 – 10 truck perhari yang berasal dari wilayah Mengwi dan sekitarnya</li> <li>- telah dibuat perencanaan penanganan sampah di 9 lokasi di wilayah Kabupaten Badung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk memberikan kesadaran semua pihak untuk tidak membuang sampah pada tempatnya serta melakukan pemilhan sampah pada sumber sampah dihasilkan</li> <li>- telah dilakukan penanganan sampah di TPST Mengwitani sebanyak 12 ton sampah per hari, sehingga telah ada upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA Sarbagita Suwung</li> <li>- Sebagaimana kebijakan Bupati Badung tentang Badung Mandiri Sampah, maka setiap Desa</li> <li>- /Kelurahan wajib melakukan penanganan sampahnya dengan membangun TPS 3R.</li> </ul>	DLHK
d.	Perketat pengawasan (supervisi, monitoring dan evaluasi) pembangunan perumahan di kabupaten Badung	Telah dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan Laporan disampaikan ke Satpol PP untuk	Teridentifikasi pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten maupun RDTR Kecamatan	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	agar tidak melanggar RDTR Kecamatan	proses penegakan Perda		
e.	Terkait bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung agar menunjukkan Spek/bestek yang merupakan standar kabupaten badung dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat tidak mampu, sehingga rumah layak huni dimaksud berdaya guna tinggi. penting data yang riil dan valid mengenai keluarga yang layak mendapatkan bantuan.	<p>Spek/bestek yang menjadi kriteria rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki di Kabupaten Badung berdasarkan PERBUP NO 46 Tahun 2019 yang meliputi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni</li> <li>- Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk</li> <li>- Lantai terbuat dari tanah,papan,bambu/</li> <li>- Semen,atau kramik dalam kondisi rusak</li> </ul> <p>Adapun bantuan rumah tidak layak huni yang sudah terealisasi dari tahun 2008 sampai dengan 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2008 (200 RTS)</li> <li>- Tahun 2009 (250 RTS)</li> <li>- Tahun 2010 (1000 RTS)</li> </ul>	<p>Adapun tujuan dari bantuan rumah layak huni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Badung</li> <li>- agar rumah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni dan tempat berlindung bagi keluarga</li> <li>- Agar terpenuhi rasa kenyamanan dan tercipta ketahanan keluarga</li> </ul>	Dinas Sosial



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2011 (1000 RTS)</li> <li>- Tahun 2012 (1280 RTS)</li> <li>- Tahun 2013 (1000 RTS)</li> <li>- Tahun 2014 (600 RTS)</li> <li>- Tahun 2015 (600 RTS)</li> <li>- Tahun 2016 (600 RTS)</li> <li>- Tahun 2017 (625 RTS)</li> <li>- Tahun 2018 (2474 RTS)</li> </ul> <p>Jumlah Keseluruhan sebanyak <u>9.629</u></p> <p>Mengingat bantuan rumah tidak layak huni dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat (PKRS) telah dapat dituntaskan sebanyak 9.629</p> <p>Dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2018 adanya rasionalisasi kegiatan dimana kegiatan PKRS masuk dalam rasionalisasi kegiatan sampai saat ini.</p>		
b	Perlu menata kembali peranan subak sehingga kondisi fisik pengairan di subak dapat diremajakan, sehingga hasil	Telah membentuk Forum Majelis Madia Subak Kabupaten Badung sesuai SK Bupati Nomor 442/052/HK/2018	Tujuannya adalah untuk memperkuat eksistensi lembaga subak di Kabupaten Badung serta memberikan atau mencari solusi	Bapenda

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	pertanian dapat maksimal	sebagai wadah komunikasi diantara seluruh Pekaseh/Klian Subak se Kabupaten Badung, forum ini juga melibatkan perangkat daerah terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR dan Bapenda/Pasedahan Agung. Selain itu, Pemerintah secara regular memfasilitasi Paruman Pekaseh / Klian Subak di masing-masing Kecamatan untuk membahas permasalahan yang dialami oleh masing-masing Subak.	atas permasalahan yang dihadapi oleh krama subak.	
<b>6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender</b>				
a.	Dalam rangka mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung, diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang inovatif dan	Program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang inovatif dan menyentuh secara langsung serta tepat sasaran telah diterapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung, antara lain pada kegiatan :  1. Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien, adapun	Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien dan pemberian perlindungan dan rehabilitasi sosial lanjut usia adalah sebagai berikut:  - untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan	Dinas Sosial

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	menyentuh secara langsung serta tepat sasaran.	<p>kriteria dari penerima bantuan sosial bagi penunggu pasien yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penunggu dan pasien adalah warga yang ber KTP dan KK Badung</li> <li>Pasien yang dirawat di ruang kelas III di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Mempunyai Kartu KIS/KBS</li> <li>Surat Keterangan sudah berdomisili minimal 5 tahun di Kabupaten Badung</li> <li>Mempunyai rekening BPD Bali atas nama Penunggu</li> <li>Penunggu Pasien yang berhak mengajukan bantuan sosial adalah: suami/ istri/ anak/ orang tua/ pihak lain yang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak</li> <li>- Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan lanjut usia yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar</li> </ul>	
--	--	--	---	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>dikuasa-kan oleh pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Sosial Penunggu Pasien diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam setahun.</li> <li>- Bantuan Sosial Penunggu pasien terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari;</li> <li>b. uang transport sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari dan;</li> <li>c. uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari</li> </ul> </li> <li>- Bantuan Sosial Penunggu Pasien diberikan</li> </ul>		
--	--	---	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>dalam bentuk non tunai dan ditransfer langsung kepada Penunggu Pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan lamanya rawat inap, terhitung mulai sehari setelah pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien rawat inap pulang</li> </ul> <p>2. Bantuan Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia, adapun kriteria dari penerima bantuan Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lansia yang ber KTP dan KK Badung</li> <li>b. Lansia yang tidak potensial paling rendah berusia 75 tahun atau bedridden yang telah mencapai usia 60 tahun</li> </ul>		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>c. Surat Keterangan sudah berdomisili minimal 5 tahun di Kabupaten Badung</p> <p>d. Mempunyai rekening BPD Bali atas nama lansia bersangkutan</p> <p>e. Membuat fakta integritas yang ditandatangani pihak keluarga</p> <p>- Bantuan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberikan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>- Pencairan bantuan perlindungan dan rehabilitasi sosial lanjut usia dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.</p>		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		- Bantuan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberikan dalam bentuk non tunai dan ditransfer langsung kepada lansia bersangkutan		
b.	Untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan, diharapkan pemerintah semakin mengembangkan berbagai kegiatan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender serta memperluas akses peran perempuan. oleh sebab itu seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan program/kegiatan berperspektif gender	pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender (pprg), 2. sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi opd dan instansi Vertikal,	Melaksanakan sosialisasi perda Pengarusutamaan gender Kabupaten Badung No 17 tahun 2018, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah opd, Kecamatan, Desa dan kelurahan, termasuk juga lembaga maupun organisasi masyarakat, dunia usaha dan media, sehingga semua dapat mengambil peran dalam percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Badung. Hasil yang diharapkan nanti dalam sosialisasi ini adalah perangkat daerah mampu mengenali isu-isu gender yang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			kemudian diintervensikan untuk upaya mewujudkan kesetaraan gender, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam mengatasi kesenjangan gender agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten badung	
c.	Pemerintah lebih optimal melaksanakan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui upaya pelatihan-pelatihan dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan P2WKSS,</li> <li>2. Pembinaan UPPKS,</li> <li>3. Pameran keterampilan perempuan,</li> <li>4. Pembinaan KWT,</li> <li>5. Pelatihan Pengolahan hasil pertanian,</li> <li>6. Pembinaan Hatinya PKK ,</li> <li>7. Pelatihan kewirausaha-an</li> </ol>	Ketahanan keluarga haruslah menjadi perhatian pemerintah mengingat keluarga sebagai entitas sosial terkecil, merupakan modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kekuatan keluarga akan mempengaruhi kekuatan suatu negara. Untuk meningkatkan kemadirian dan jiwa kewirausahaan bagi perempuan, maka perlu diadakan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha . Bantuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			dapat berupa berupa permodalan, pelatihan pengembangan produk yang inovatif sesuai potensi lokal yang ada, serta bagaimana memasarkan produk baik secara offline maupun online.	
d.	Program Pemberdayaan Perempuan yang direkomendasikan antara lain meliputi: penguatan organisasi perempuan, pelibatan kelompok perempuan dalam kebijakan dan peningkatan kemampuan perempuan dibidang kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar Perempuan,</li> <li>2. Pelatihan bagi Forum Puspita Kab Badung,</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM perempuan di bidang politik,</li> <li>4. pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,</li> <li>5. sosialisasi kebijakan tentang perempuan dan anak,</li> <li>6. Pertemuan rapat koordinasi organisasi perempuan</li> </ol>	tantangan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak adalah persoalan perempuan, dimana persoalan perempuan juga merupakan persoalan laki-laki (isu gender dan ketidakadilan) Maka dari itu dalam menghadapi tantangan global diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, inovatif, percaya diri, mampu dalam manajemen waktu, serta berperspektif gender. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			<p>satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Yang harus dilakukan ke depan adalah melaksanakan pendidikan politik, pelatihan wawasan kebangsaan, pelatihan kemandirian dan kewirausahaan, serta pelatihan kapasitas perempuan baik dari bidang kesehatan, sosial dan hukum, sehingga hasilnya dapat meningkatkan jumlah partisipasi di perempuan dalam jabatan publik dan jabatan politik.</p>	
e.	<p>Program Perlindungan Anak meliputi: melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan, pencegahan kenakalan remaja (<i>juvenile delinquency</i>). membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memberikan pendampingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan anak dengan sasaran siswa siswi SD dan SMP serta masyarakat , meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran orang tua, keluarga dan anak dalam mencegah kekerasan seksual anak</li> <li>2. Psiko Edukasi untuk</li> </ol> </li> </ul>	<p>Meningkatkan pemahaman orang tua, keluarga, masyarakat ,lingkungan sekolah, dan anak itu sendiri tentang peran dan tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis maupun seksual dengan tujuan</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	<p>bidang hukum maupun psikologi. dan membangun <i>shelter</i> (untuk menampung korban kekerasan rumah tangga).</p>	<p>mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah (stop Bullying dan diskriminasi terhadap anak)</p> <p>3. Bahaya Narkotika bagi remaja (bekerjasama dengan BNK Kabupaten Badung)</p> <p>4. Pencegahan HIV-AIDS dan kesehatan reproduksi bekerja sama dengan KPPAD Kabupaten Badung</p> <p>• Sampai saat ini sudah ada Lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Badung yang memberikan layanan pengaduan, pendampingan/konsultasi hukum, layanan konseling psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan (KDRT). Namun berdasarkan SE</p>	<p>terbangunnya Gerakan bersama lindungi anak dari kekerasan dimanapun mereka berada</p> <p>Memberikan layanan dan penanganan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan ( KDRT ) maupun layanan pendampingan bagi Anak Berhadapan Hukum</p>	
--	---	--	---	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>Mendagri Nomor : 060/1417/OTDA (Bupati/ Walikota) tanggal 10 Maret 2020 tentang percepatan pembentukan UPTD PPA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, diharapkan setiap Kabupaten Kota membentuk UPTD PPA .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat ini belum dibentuk shelter (rumah aman) bagi korban, namun bilamana ada korban yang membutuhkan layanan rumah aman / shelter kami bekerja sama dengan Yayasan Maha Bhoga Marga</li> </ul>	<p>Perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh perlindungan / penempatan rumah aman sampai kasus yang dialami dapat diselesaikan</p>	
<p><b>7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</b></p> <p><b>A. Bidang Penataan Ruang</b></p>				
a.	Menjadikan Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dalam satu kegiatan utuh dan berkesinambungan sehingga dapat	Penyusunan rencana tata ruang sudah menerapkan asas hierarkis komplementer menjabarkan RTRW Kabupaten	Tersedianya Perda RTRW dan RDTR sebagai dasar penerbitan ijin	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat maupun bagi investor. dengan demikian, kepastian hukum atas penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ) bagi semua pihak bisa diterapkan	kedalam RDTR di 6 kecamatan dan		
b.	Penyempurnaan Ranperda RDTR masing-masing kecamatan yang belum antara lain : Mengwi, Petang, Abiansemal, perlu dipercepat termasuk penyusunan <i>master plan</i> dan <i>detail engineering development (DED)</i> , penataan kawasan taman bumi banten di kecamatan petang dan beberapa tempat yang diyakini mempunyai nilai strategis harus terus ditindaklanjuti dan segera diimplementasikan untuk mengendalikan disparitas pengembangan wilayah antara badung selatan, tengah dan utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Penyusunan RDTR Mengwi, Abiansemal dan Petang telah dilakukan Harmonisasi dengan peraturan terbaru Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/ Kota</li> <li>- Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang dan Pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang</li> </ul>	Percepatan penetapan Raperda RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan	Dinas PUPR
c.	Kajian-kajian dan implementasi pemanfaatan ruang dalam bumi yang disesuaikan dengan	Kajian pemanfaatan ruang dalam bumi akan dituangkan di dalam Dokumen	Pengaturan ruang dalam bumi untuk pemanfaatan fasilitas bangunan Gedung, sistem	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	RTRW Provinsi Bali harus segera ditindaklanjuti terutama di daerah-daerah pariwisata untuk memanfaatkan sistem utilitas perkotaan dan <i>basement</i>	Revisi RTRW Kabupaten Badung	jaringan prasarana maupun fasilitas khusus akan dikaji lebih lanjut dalam Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Badung dengan mempertimbangan dasar kebutuhan, asas dan klasifikasi serta studi pemanfaatan ruang dalam bumi	
d.	Mewujudkan kekhasan tata ruang sesuai dengan potensi dan lingkungan yang dapat memberikan dampak tersendiri untuk dapat membuka objek wisata baru seperti agrowisata di petang, wisata pantai di kuta selatan, kuta dan kuta utara, wisata budaya dan wisata desa tradisional yang ada di wilayah Badung	Penjabaran rencana pola ruang di RDTR masing-masing kecamatan disesuaikan dengan potensi wilayah sesuai pedoman penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Menyiapkan rencana pola ruang sesuai dengan kebutuhan dan potensi perkembangan masing-masing kecamatan.	Dinas PUPR
e.	Mengingat belum jelasnya kewenangan masing-masing kelembagaan tentang pengaturan pantai-pantai potensial dan ruang-ruang strategis di badung, perlu diadakan koordinasi secara terstruktur dengan pemerintah dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan pengaturan pantai mengacu pada rencana pola ruang Kawasan sempadan pantai</li> <li>- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang baik dari sisi aspek perencanaan,</li> </ul>	Dalam RDTR diatur muatan peraturan zonasi pemanfaatan ruang di Kawasan sempadan pantai.	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	provinsi bali dalam satu sistem kelembagaan.	pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung yang telah dibentuk sesuai dengan Permendagri 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah		
f.	Khusus untuk Kuta Selatan yang telah memiliki Perda tentang RDTR, perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana terperinci dan penataan sistem utilitas perkotaan.	Penyusunan Rencana terperinci dari RDTR berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang kawasannya sudah ditetapkan sebagai Bagian Wilayah Perencanaan yang diprioritaskan pengembangannya	Penyelesaian terhadap 5 RDTR di Kabupaten Badung sehingga seluruh wilayah diatur dalam RDTR	Dinas PUPR
<b>B. Lingkungan Hidup</b>				
a.	Untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini, agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta lingkungan bisa dijalani sejak kecil melalui sekolah-sekolah	1). Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adi Wiyata dimana gelar sekolah ini diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dan program ini	Menggalakan pelestarian lingkungan yang begitu penting dilakukan oleh peserta didik dengan masyarakat karena risiko dampak lingkungan supaya dapat dikurangi.	Dinas Pendidikan dan Olah Raga

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>merupakan sebuah program dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang mempunyai prinsip utama yaitu Edukatif (pendidikan), Partisipasif, Berkelanjutan.</p> <p>2). Sekolah ini juga merupakan gelar bagi sekolah yang dianggap sudah baik dan ideal sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan serta norma dan etika bagi siswa dan siswinya sehingga sebagai dasar untuk terciptanya kesejahteraan</p>	<p>Belum sadarnya masyarakat tentang budaya lestari dan budaya hidup bersih</p>	
b.	<p>Penilaian Dokumen Lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL) harus dilaksanakan oleh satu tim yang kuat dan <i>capable</i> sehingga mampu memberikan izin, arah, serta pengawasan di lapangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan persyaratan harus dilaksanakan secara konsekuen seperti halnya pengelolaan limbah B3,</p>	<p>-Untuk penilaian Dokumen Lingkungan sudah dilaksanakan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Badung yang merujuk pada ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang terdiri dari :</p> <p>1) Ketua Komisi Penilai Amdal dijabat oleh pejabat setingkat es II dalam hal ini</p>	<p>- Dapat memberikan penilaian secara objektif dan akuntabel sesuai peraturan Perundang-undangan.</p>	DLHK



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	identifikasi sumber-sumber pencemaran dan pengambilan air di bawah tanah	<p>adalah Kadis LHK.</p> <p>2) Sekretaris Komisi Penilai Amdal dijabat oleh pejabat setingkat es III yang mempunyai tupoksi menilai Dokumen Lingkungan, yaitu Kabid Tata Lingkungan. Sekretaris Komisi sekaligus merupakan Ketua Tim Teknis KPA. Persyaratan sebagai Ketua Tim Teknis KPA yaitu harus memiliki setidaknya Sertifikat Amdal Penyusun dan Penilai. Ketua Tim Teknis dibantu oleh anggota yang terdiri dari:</p> <p>a. Ahli dari instansi teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda Kab. Badung</li> <li>- Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung</li> <li>- Dinas Penanaman Modal Pelayanan</li> </ul>		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Pariwisata Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.</li><li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Perikanan Kabupaten Badung</li><li>- Dinas Pertanian dan Pangan</li></ul>		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		Kabupaten Badung - Dinas Perhubungan Kabupaten Badung - Kantor Pertanahan Kabupaten Badung - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. b. Ahli Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali – Nusra), Ahli Biologi, Ahli Geofisika, Ahli Kimia, Ahli Ekonomi, Ahli Bidang Sosial Budaya, Ahli Bidang Perencanaan		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>Pembangunan, Ahli Bidang Kesehatan, Ahli SDA, Ahli GIS, Ahli Lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Lingkungan.</p> <p>3) Sekretariat Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas di bidang kesekretariatan yang dalam hal ini dijabat oleh pejabat ess IV yaitu Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan.</p> <p>4) KPA dalam menjalankan tugasnya harus mendapatkan lisensi yang ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan Rekomendasi Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.</p> <p>- Untuk pengawasan Dokumen Lingkungan dilaksanakan oleh PPLHD. Kewajiban dalam rangka pengawasan setiap Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan wajib dilakukan</p>	<p>- Dalam temuan di lapangan apabila tidak taat akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan amanat Perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>pengawasan, sehingga target jumlah dokumen yang diawasi disesuaikan dengan jumlah ijin yang dikeluarkan atau Rekomendasi yang diterbitkan. Dalam hal tersebut diatas sehingga dibutuhkan penyesuaian anggaran. PPLHD yang dimiliki saat ini sebanyak 6 PPLHD yang sudah dilantik. Dalam proses perencanaan pengeluaran dokumen, PPLHD hendaknya dilibatkan dari proses perencanaan.</p> <p>- Untuk Penerbitan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan oleh Tim Validasi dan Verifikasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Pengelolaan Air Limbah. Untuk penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, jika</p>		
			<p>Jika validasi dokumen dan verifikasi lapangan terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Dinas LHK mengeluarkan surat Rekomendasi untuk izinnya dapat diproses. Apabila hasil validasi dokumen dan verifikasi lapangan belum memenuhi</p>	

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		ada permohonan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan air limbah dari Dinas PMPTSP, tim Validasi dan verifikasi perijinan DLHK akan melakukan validasi dokumen permohonan izin oleh pemohon dan melakukan verifikasi lapangan untuk melihat secara langsung persyaratan teknisnya.	persyaratan administrasi maupun teknis, Kepala Dinas LHK mengeluarkan Surat Rekomendasi penolakan/ Izin belum dapat diproses sampai syarat administrasi dan teknis terpenuhi.	
c.	Terkait upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, dewan mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengacu pada Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. hal ini sebagai upaya untuk menghindari alih fungsi lahan produktif (pertanian) sehingga target pengembangan RTH tersebut tidak mengorbankan lahan-lahan produktif. agar rth	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan RTH yang sudah ditetapkan dalam Perda 26 Tahun 2013 telah dijabarkan ke rencana detail tata ruang dengan peruntukkan yang sama sebagai Zona RTH</li> <li>- Untuk menghindari alih fungsi di dalam rencana detail tata ruang juga sudah ditetapkan sebagai Lahan</li> </ul>	<p>Menyediakan ruang terbuka hijau yang berfungsi publik sebesar 20% dari luas Kawasan perkotaan Kabupaten Badung</p> <p>Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian</p>	Dinas PUPR

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	yang sudah dibangun mendapat perawatan dan pembersihan dan dilengkapi dengan sarana penerangan yang memadai	Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Pembangunan RTH sudah direncanakan melalui DED yang sudah mempertimbangkan estetika untuk penerangan, ketersediaan air dan kelengkapan lainnya.		
d.	Pengembangan Taman-taman Tematik (taman yang menggambarkan ciri khas atau ikon wilayah bersangkutan), perlu terus dikembangkan dalam rangka mendukung dan mempromosikan wilayah tersebut menjadi objek wisata.	Melaksanakan pembangunan Taman-taman Kota : - Taman Laksmana Duta di Desa Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal - Taman Rama Shinta di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi - Taman Bencingah Puri Ageng Mengwi di Bencingah Mengwi kecamatan Mengwi - Taman Hanoman di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi - Taman Dewa Ruci di Jl. By Pass Ngr. Rai di Kecamatan Kuta - Taman Panca Pandawa di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta	Taman-taman tersebut sekarang sudah menjadi ikon wisata di masing-masing wilayah.	DLHK

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman Satrya Gatot Kaca di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta</li> <li>- Kawasan Taman Maparek Sradhaning Dewata di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan</li> </ul> <p>Selanjutnya akan dibuatkan SK Bupati</p>		
<b>8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan</b> <b>A. Pariwisata</b>				
a.	<p>Strategi Prioritas Pariwisata: 1) Membentuk kebijakan pemasaran destinasi secara langsung maupun tidak langsung termasuk di media online dan media sosial; 2) Membentuk kebijakan kerjasama publikasi dengan semua dinas terkait untuk menumbuhkan citra destinasi yang positif, aman dan nyaman; 3) Mengingat adanya kejadian pandemic covid-19; 4) saat ini perlu ditentukan topik kerja pariwisata 2020 <i>"partnership for success tourism in</i></p>	<p>Telah dilaksanakan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Kepariwisata di Kabupaten Badung tentang Prokes.</li> <li>- Program Explore Badung dengan mengutamakan implementasi Prokes CHSE di Destinasi Wisata</li> <li>- Gathering Kepariwisata implementasi Prokes CHSE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi Kepariwisata di Kabupaten Badung tentang prokes melalui media digital.</li> <li>- Melibatkan instansi terkait dan masyarakat sebagai peserta.</li> <li>- Melibatkan <i>stakeholder</i> kepariwisataan</li> </ul>	Dinas Pariwisata



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	2020', kerjasama dan sinergi pemangku kepentingan untuk sukses pariwisata 2020.			
b.	<p>Target Pariwisata 2020, target yang perlu dicanangkan untuk pariwisata badung 2020 adalah peningkatan pendapatan pariwisata (tidak mengacu pada peningkatan kunjungan wisatawan semata), melainkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan manajemen atraksi wisata (<i>visitor attraction and experience targets</i>);</li> <li>2) Peningkatan kreasi budaya (<i>cultural tourism program targets</i>);</li> <li>3) Pengembangan sdm pariwisata (<i>community tourism development program targets</i>);</li> <li>4) Peningkatan kualitas penelitian pariwisata sebagai dasar kebijakan pariwisata (<i>research program targets</i>); dan</li> <li>5) Peningkatan daya saing produk lokal (<i>skill development program targets</i>)</li> </ol>	<p>Telah dilaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Desa Wisata.</li> <li>- Pelatihan SDM Pariwisata</li> <li>- Pameran Produk ekraf Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pengetahuan Pengelola Desa Wisata terkait manajemen atraksib wisata di wilayahnya.</li> <li>- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM Pariwisata</li> <li>- Peningkatan Daya saing produk ekraf kabupaten Badung.</li> </ul>	Dinas Pariwisata

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

B. Pertanian dan Kebudayaan				
a.	Guna dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian maka penerapan teknologi tepat guna, pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, subsidi benih dan pupuk, asuransi pertanian serta perbaikan infrastruktur perlu terus dimantapkan dengan baik.	Untuk penerapan teknologi tepat guna dilaksanakan dengan lebih mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan agar mampu berinovasi dan juga kami sudah melaksanakan beberapa pelatihan untuk petani. Penanggulangan Penyakit sudah kami persiapkan dengan pengadaan pestisida. Asuransi Pertanian juga tetap kami laksanakan dengan memprioritaskan kawasan yang rentan terserang hama penyakit dan gagal panen. Perbaikan infrastruktur kami lakukan dengan perbaikan Jalan Usaha Tani dan juga pembangunan Irigasi air tanah Dangkal melalui dana DAK Pusat	Peningkatan Produktivitas, penerapan teknologi tepat guna, pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, Asuransi Pertanian, Perbaikan infrastruktur	Dinas Pertanian
b.	Meningkatkan <i>bio security</i> dan <i>early warning system</i> , melakukan vaksinasi, dan pengobatan yang cepat dan tepat untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan	Untuk pencegahan penyakit ternak menular kami sudah meningkatkan peran Puskesmas dan juga UPT peternakan di masing-masing	Pencegahan penyakit menular ternak	Dinas Pertanian

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	penyakit menular pada ternak maupun tanaman budidaya pertanian di Kabupaten Badung	Kecamatan dan juga melakukan tindakan vaksinasi secara rutin		
c.	Pemerintah Daerah agar lebih aktif mendorong sektor pertanian menghasilkan komoditi pertanian berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, memfasilitasi penyaluran dan pemasaran hasil sektor pertanian secara luas dengan membangun mekanisme dan jaringan pasar yang dekat kepada konsumen	Untuk menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, kami senantiasa memberikan pendampingan kepada Petani sesuai dengan potensi masing-masing daerah baik melalui dana APBD maupun APBN, seperti contoh petani Kopi di Petang. Untuk meningkatkan peluang pasar, kami sudah menggarap kegiatan publikasi potensi pertanian di Kabupaten Badung	Peningkatan kualitas komoditi pertanian, Pemasaran	Dinas Pertanian
d.	Kegiatan Festival Budaya Pertanian dan Festival Bahari diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, berkesinambungan, dengan perencanaan dan pendanaan yang memadai agar inovatif dan komunikatif, merupakan media strategis memantapkan	Untuk Festival Pertanian tahun ini tidak dapat kami laksanakan karena adanya pandemi covid-19, tetapi kami sudah melakukan evaluasi pelaksanaan sebelumnya guna meningkatkan kualitas dari FBP	Kualitas kegiatan Festival Budaya Pertanian	Dinas Pertanian

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan sekaligus sebagai daya tarik wisata			
e.	Perlu intervensi pemerintah daerah dalam menghasilkan suatu terobosan dalam pengembangan produk pertanian berkualitas berbasis kawasan guna meningkatkan produktivitas pertanian lahan sempit dan nilai tambah produk pertanian secara signifikan serta memudahkan dalam pemasarannya	Kami sudah menggandeng Bank Pembangunan Daerah Bali dalam kegiatan CSR untuk merancang kegiatan ‘ Masyarakat Tanam Cabai dan juga Pelajar Gemar Bertani	Terobosan Pengembangan Produk Pertanian	Dinas Pertanian
<b>9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
a.	Meningkatkan kegiatan yang bersifat pre-emptif, tindakan awal sebelum pencegahan. melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pemahaman akan hukum, supaya masyarakat turut serta menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	-	Kesbangpol

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

b.	Meningkatkan kegiatan yang bersifat preventif, tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan	Mengoptimalkan sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan melaksanakan patroli di masing-masing wilayah;	Meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan	Pol. PP
c.	Melaksanakan pencegahan hukum upaya penindakan hukum baik secara yustisial maupun non yustisial terhadap peristiwa pelanggaran	Melaksanakan Patroli terpadu bersama dengan aparat di desa/kelurahan dan perangkat penegak hukum	Pelanggaran yang dilakukan tidak sampai pada penindakan hukum baik secara yustisial maupun non yustisial terhadap peristiwa pelanggaran	Pol. PP
d.	Terus digiatkan pola kegiatan pengamanan terpadu: pengamanan yang dilakukan secara bersama-sama dan selaras oleh Kepolisian Republik Indonesia, Aparat Pemerintah Daerah dan Institusi terkait lainnya, serta potensi masyarakat yang dibina oleh pemerintah daerah, atas pertimbangan pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tingkat kerawanan di daerah	Terus ditingkatkan kegiatan sinergitas dengan aparat TNI,Polri, Satpolpp dan Linmas	Terwujudnya Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pol. PP

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

e.	Membuat sistem pungutan pajak dengan <i>online</i> dan <i>real time</i> , sehingga pajak dapat di hitung langsung dan di ketahui langsung hari ke hari ( <i>day today</i> ).	Sejak Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Badung. Selanjutnya, Bupati Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016, sebagai peraturan teknis pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Badung.	Tujuan pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah yaitu untuk mewujudkan transparansi dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem Online Pajak Daerah meliputi ; - Sistem online pembayaran pajak daerah yang bertujuan agar pembayaran pajak daerah dapat dilaksanakan secara online dimana saja oleh wajib pajak dan langsung dapat dimonitor secara online melalui aplikasi pemantau - Sistem online pelaporan pajak daerah bertujuan memudahkan Wajib pajak dalam melakukan pelaporan melalui e SPTPD - Sistem online pencatatan data transaksi usaha wajib pajak melalui pemasangan alat dan system monitoring seperti tapping box, cash register online dan web service	Bapenda
----	--	--	--	---------

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

			<p>- Sistem Online data dan informasi perpajakan daerah yaitu pengiriman penetapan secara online dan penerimaan informasi dari wajib pajak secara online</p> <p>Sistem online perijinan dan perpajakan daerah terintegrasi yakni integrasi sistem pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Bapenda</p>	
<b>II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
<b>A. Pendapatan Daerah</b>				
a.	Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan upaya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan 8 kelompok Petugas Pendataan dan Pendaftaran dalam rangka mendata wajib pajak baru, wajib pajak tutup dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah</li> <li>- Penilaian individual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan</li> </ul>	Tujuannya adalah untuk memperluas dan menyempurnakan database pajak daerah serta mengintensifkan potensi pajak daerah yang sudah ada ataupun yang baru sehingga bermuara pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Bapenda

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>Perkotaan seperti Villa, Hotel, Ruko dan sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi Data dengan Dinas Perijinan untuk proses penerbitan Ijin Reklame dan TDUP dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)</li> <li>- Secara berkala melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendata Wajib Pajak Air Tanah (penerbitan ijin pengelolaan air tanah)</li> <li>- melakukan peninjauan tarif Pajak Hiburan dan Pajak Parkir</li> </ul> <p>Intensifikasi dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membentuk kelompok Pemeriksa Pajak Daerah dalam rangka pemeriksaan kepada Wajib Pajak</li> <li>- membentuk kelompok Penagihan Pajak Daerah dalam</li> </ul>		
--	--	---	--	--



### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>rangka melakukan penagihan pajak daerah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- melakukan pembacaan meter air tanah secara berkala</li><li>- melakukan validasi piutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li><li>- melakukan penagihan piutang secara paksa dengan pemasangan spanduk</li><li>- melakukan penagihan piutang terhadap Wajib Pajak Pailit</li><li>- melakukan integrasi data dengan instansi terkait seperti Dinas Perijinan, Kantor Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperkuat database dan validasi data wajib pajak daerah</li><li>- memperluas akses pembayaran pajak daerah melalui</li></ul>		
--	--	--	--	--

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>kerjasama dengan pihak perbankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan pemasangan alat dan sistem monitoring transaksi usaha pada wajib pajak</li> </ul>		
b.	<p>Meningkatkan pengawasan serta pembinaan melalui media sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai wajib pajak. melakukan pengkajian secara komprehensif untuk menentukan subyek dan obyek pajak baru</p>	<p>Pengawasan dan pembinaan dilakukan baik secara tatap muka oleh petugas maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial (facebook, instagram, twitter dan website), pemasangan spanduk, baliho dan media cetak</p>	<p>Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya yang telah terdaftar sebagai wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah</p>	Bapenda
c.	<p>Mendorong pemerintah membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah terintegrasi yang bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya. meningkatkan kompetensi dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi petugas pajak daerah. melakukan koordinasi dengan dinas terkait.</p>	<p>Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan lintas perangkat daerah terkait. Integrasi data perpajakan daerah dengan perangkat daerah seperti Dinas Penanaman</p>	<p>Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam upaya menggali potensi PAD.</p>	Bapenda

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah	Modal dan PTSP, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung serta Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, peningkatan kompetensi Juru Sita Pajak Daerah dan Petugas Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui sosial media.		
d.	Senantiasa mendorong melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan dengan sistem pembayaran dan pelaporan secara <i>online</i> (e-sptpd) yang bertujuan memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan daerah	Pembayaran Pajak Daerah telah dapat dilakukan secara online melalui kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Bank Mandiri. Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran pajak daerah melalui fasilitas yang disediakan oleh perbankan seperti <i>teller</i> , ATM, <i>mobile banking</i> dan <i>internet banking</i> .	Tujuannya adalah untuk memperluas akses pembayaran pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.  Pelaporan Pajak Daerah secara online dilakukan untuk mewujudkan percepatan penyampaian laporan pajak,	Bapenda

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		<p>Selain itu, juga dapat melalui mitra perbankan seperti LPD, PT Pos Indonesia dan Gopay.</p> <p>Pelaporan Pajak Daerah dilakukan secara online melalui aplikasi e SPTPD. Saat ini Wajib Pajak Daerah telah 100% melakukan pelaporan pajak daerah secara online.</p>	efisiensi waktu dan akuntabilitas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak daerah.	
e.	Memaksimalkan potensi pajak dari rumah tinggal menjadi pondok wisata sebagai objek pajak	Telah dilakukan pendataan oleh kelompok pendataan bekerjasama dengan aparat desa melalui pembentukan <i>whatsapp group</i> serta melalui <i>tracing</i> pada aplikasi penjualan akomodasi secara online, sehingga dapat diketahui potensi Wajib Pajak Baru.	Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi pajak hotel (villa dan rumah kos mewah) yang selama ini secara sembunyi-sembunyi melakukan usaha penjualan akomodasi secara online.	Bapenda
<b>B. Belanja Daerah</b>				
a.	Terhadap beberapa program yang belum mencapai target disarankan agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh	Akan disesuaikan dan diusahakan untuk anggaran berikutnya sehingga target tercapai.	Target anggaran tercapai.	BPKAD

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

b.	<p>Penajaman peran <i>person in charge</i> (pic) anggaran untuk menyusun rka-kl perangkat daerah dengan prinsip-prinsip penyusunan detail anggaran adalah kombinasi antara <i>top down</i> dan <i>bottom up</i>. melakukan <i>self monitoring/ mereview</i> pelaksanaan anggaran oleh pic, serta penguatan koordinasi antar lembaga</p>	<p>Terkait hal ini sesuai saran dari DPRD kami akan mempertajam pic dan juga akan lebih berkoordinasi dengan PD sehingga apa yang menjadi usulan PD baik <i>tp down</i> maupun <i>up down</i> berjalan secara berimbang.</p>	<p>Tersusunnya RKA-KL Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	BPKAD
c.	<p>Melakukan analisis kebutuhan secara komprehensif</p>	<p>Asal usul dan saran dewan untuk membuat Analisa kebutuhan secara komprehensif pada dasarnya hal ini telah dilakukan namun untuk hal tersebut untuk berikutnya kami akan mempertajam Analisa kebutuhan.</p>	<p>Tersusunnya analisa kebutuhan secara mendetail.</p>	BPKAD
d.	<p>Perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan</p>	<p>Untuk SOP sebenarnya sudah kami buat untuk hal-hal yang bersifat umum misalnya terkait prosedur penyusunan APBD kemudian SOP terkait pengamprahan, SOP terkait pencatatan dan pelaporan BMD</p>	<p>Tersusunnya SOP kegiatan Perangkat Daerah.</p>	BPKAD

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

		dan sesuai usulan Dewan mungkin ada beberapa SOP yang nantinya bisa mempermudah dan menseragamkan PD untuk pelaksanaan Kegiatannya.		
<b>C. Pembiayaan</b>				
a.	Mencermati kondisi yang berkembang akibat wabah covid-19. dimana tingkat <i>occupancy</i> hotel hanya di bawah 1 digit, maka Disparda Badung perlu memperkuat hubungan <i>g to g</i> ( <i>government to government</i> ) dengan seluruh konsulat yang ada di Bali	Telah dilakukan Koordinasi dengan Konsulat-konsulat yang ada di Bali	Agar terjadi peningkatan kunjungan wisatawan manca Negara tetapi hampir semua Negara membatasi warganya berpergian ke luar negeri.	Dinas Pariwisata
b.	Disparda dapat memanfaatkan waktu untuk menyusun strategi <i>recovery</i> pasca pandemi covid-19, seperti melengkapi objek dan destinasi dengan sarana prasarana sanitasi yang berstandar tinggi, meningkatkan <i>accessibilitas</i> dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya, dan memberikan edukasi pada pokdarwis tentang peningkatan	Telah dilaksanakan kegiatan : 1. Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman) di DTW 2. Pelatihan Anggota Gahawistri, Desa Wisata, Pramuiwisata, dan Balawista terkait CHSE	Untuk meningkatkan standar Proses di destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Badung serta meningkatkan kemampuan Pokdarwis terkait CHSE.	Dinas Pariwisata

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	kemampuan <i>hospitality</i>			
c.	Mendorong BUMD mendayagunakan aset daerah, mampu berperan sebagai <i>countervailing power</i> terhadap kekuatan ekonomi melalui pola kemitraan, menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam maupun luar negeri melalui <i>joint venture/joint operation company (jv/oc)</i>	Secara umum bahwa BUMD sudah efektif menggunakan aset daerah dan terkait usulan dewan agar BUMD bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain hal ini telah dijalankan namun apa yang menjadi usulan dewan akan dikomunikasikan lagi dengan PD terkait.	Mempergunakan Asset Daerah secara efektif.	BPKAD
d.	Perlu adanya optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisme dari aspek manajemen sumber daya. mengoptimalkan peran bumd dengan langkah strategik yaitu mendiagnosis kemampuan organisasi BUMD, mengoperasikan organisasi secara efektif, mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar dengan cara revitalisasi pasar tradisional dengan pola kerjasama antara pemerintah	Kegiatan revitalisasi pasar Baha akan dilaksanakan pada Tahun 2021	Terkait dengan revitalisasi pasar tradisional, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 tidak ada revitalisasi pasar tradisional, sedangkan pada tahun 2021 ada kegiatan revitalisasi untuk pasar Baha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

### Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	dan swasta yang terencana, pengembangan produk baru dan integrasi horizontal atau vertical			
c.	Mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan peran bumdes, dengan membuat atau mengelola supermarket desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa setempat	Penyertaan modal kepada Bumdesa sudah dilakukan melalui APBDes dengan analisa kelayakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan peran Bumdesa memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggairahkan usaha ekonomi produktif UMKM sesuai potensi desa yang tentunya dapat menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan asli desa. Sedangkan melalui anggaran daerah Kabupaten Badung dilaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi evaluasi Bumdesa serta bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM (manajemen, regulasi AD/ART) dalam pengelolaan Bumdesa yang kreatif dan inovatif.	Meningkatkan tata kelola Bumdesa untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah yang diselesaikan: perbaikan pelayanan umum dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di desa	Dinas PMD





### **BAB IV**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan tugasnya menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berpijak pada UUD 1945 tersebut, maka Pemerintah dengan segala kewenangannya menyerahkan urusan pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi yang merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di Daerah.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yaitu pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan pemerintah tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa penyelenggaraan azas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik serta menciptakan keselarasan dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan

#### **Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**

---

Tugas Pembantuan ini, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana APBN kepada Pemerintah Daerah serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tugas pembantuan mempunyai arti yang sangat strategis untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun demikian, sejak rancangan awal sampai dengan terjadinya pandemi Covid-19 dalam rentang **Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Badung tidak menerima dana Tugas Pembantuan maupun Penugasan dari Pemeritah Pusat.**

### BAB V PENUTUP

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020 ini, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Badung merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung selama Tahun 2020 yang memuat tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020 merupakan laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progress report*) RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 5 (lima) tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan.

Tahun Anggaran 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya Pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan dan penganggaran. Pemerintah Daerah merevisi APBD Tahun Anggaran 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja non prioritas untuk diarahkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Ditengah berbagai kendala serta keterbatasan yang ada, masih terdapat keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu Tahun 2020, sebagai cerminan komitmen dan sinergitas yang kuat serta

## **Bab V Penutup**

---

keharmonisan antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Badung. Namun kita sadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik lagi.

Mangupura, Maret 2021

BUPATI BADUNG,

**I NYOMAN GIRI PRASTA**